# DAMPAK KRISIS GLOBAL PERKUAT KETAHANAN PANGAN NASIONAL

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

# MAJELIS

EDISI NO.05/TH.XVI/MEI 2022

## PENYUSUNAN RUU SISDIKNAS
# PERLU KAJIAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Refleksi
Tuntaskan Melalui Proses Hukum

16 Nasional
Mengukuhkan Syarif Hasan Sebagai Profesor

39 Selingan
Meninggalkan Eksklusifitas Menuju Inklusivitas

62 Sosialisasi
Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

# Daftar Isi

**08 BERITA UTAMA**

## Perlu Kajian Keterlibatan Masyarakat

Revisi UU Sisdiknas diperlukan sebagai upaya menjawab tantangan di sektorapendidikan di masa kini dan mendatang. Namun, penyusunan revisi UU Sisdiknas harus dilakukan secara cermat. Salah satu bentuk kecermatan adalah dengan melakukan kajian mendalam dan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.

**16** Nasional

**Mengukuhkan Syarief Hasan Sebagai Profesor**

**60** Sosialisasi

**Perayaan Hari Sunyi Nyepi Tahun Baru Saka 1944**

**39** SELINGAN

**Menuju Inklusivitas**

**76** Profil

**KH, Aus Hidayat Nur**

Pengantar Redaksi ..... 04

Perspektif ..... 06

Kolom ..... 34

Aspirasi Masyarakat ..... 47

Gema Pancasila ..... 48

Varia MPR ..... 69

Wawancara ..... 70

Figur ..... 72

Ragam ..... 74

Dari Rumah Kebangsaan ..... 80

Rehal ..... 82

COVER

Edisi No.05/TH.XVI/Mei 2022

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

**Budi Muliawan**
Redaktur Pelaksana

# Pengantar Redaksi

## Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

BEBERAPA waktu lalu muncul polemik di tengah masyarakat berkaitan dengan beredarnya draf Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Pangkal persoalannya adalah hilangnya frasa "madrasah" dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Berbagai kelompok masyarakat, terutama organisasi masyarakakat Islam, mengeluhkan dan keberatan dengan hilangnya frasa "madrasah" dalam RUU Sisdiknas.

Keberatan berbagai kalangan masyarakat wajar. Sebab, RUU Sisdiknas ini berbeda dengan UU Sisdiknas sebelumnya, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 yang secara eksplisit menyebutkan lembaga pendidikan madrasah. Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat."

Tidak itu saja. RUU Sisdiknas mengatur pendidikan keagamaan dalam pasal 32 dan sama sekali tak menyebut kata 'madrasah'. Adapun draf RUU Sisdiknas di pasal 32 itu berbunyi, "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama."

Seperti kita ketahui, madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki kiprah panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah mencatat, kehadiran madrasah jauh sebelum Indonesia merdeka. Lembaga pendidikan madrasah pertama kali muncul pada tahun 1909. Kemudian diikuti dengan pendidikan serupa di beberapa tempat. Berselang beberapa tahun, di Pulau Jawa, organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga mengembangkan madrasah.

Pada tahun 1960-an, madrasah sudah tersebar di berbagai daerah di hampir seluruh Nusantara. Dengan biaya pendidikan yang murah, madrasah telah membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin dan marjinal untuk mengenyam pendidikan. Intinya, sejak awal pendidikan madrasah telah memberikan sumbangan signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak peserta didik. Madrasah menjadi saksi bisa perjuangan pendidikan di Indonesia.

Maka, sangat disayangkan apabila pendidikan madrasah ini hilang dalam RUU Sisdiknas. Untung saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) cepat tanggap. Lewat keterangan pers, Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa madrasah tidak hilang dalam RUU Sisdiknas. Madrasah tetap tercantum dalam RUU Sisdiknas.

Polemik mengenai RUU Sisdiknas memperlihatkan pentingnya kecermatan dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang. Agar tidak menimbulkan polemik maka RUU Sisdiknas memerlukan telaah dan kajian kembali. Penyusunan RUU ini pun perlu masukan dan melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan, seperti pemerhati, pakar, dan akademisi pendidikan, kemudian asosiasi-asosiasi terkait lembaga pendidikan, pun penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan. Sebab, pendidikan bukan hanya milik pemerintah tetapi juga masyarakat secara luas.

Revisi UU Sisdiknas memang penting sebagai upaya untuk menyesuaikan tantangan saat ini dan mendatang. Namun, jangan dilupakan proses penyusunan RUU tersebut perlu kajian yang lebih mendalam serta melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan sehingga ketika RUU Sisdiknas sudah terwujud tidak lagi menimbulkan polemik. ❑


MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

**PENASEHAT**
Pimpinan MPR-RI
**PENANGGUNG JAWAB**
Ma'ruf Cahyono
**PEMIMPIN REDAKSI**
Siti Fauziah
**DEWAN REDAKSI**
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
**REDAKTUR PELAKSANA**
Budi Muliawan
**KOORDINATOR REPORTASE**
Ario Setiawan
**REDAKTUR FOTO**
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
**REPORTER**
Bayu Nugroho, Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta
**FOTOGRAFER**
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
**PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI**
Cucu Riwayati
**STAF DISTRIBUSI**
Ati Oktafia, Amiruddin, Anggun Permana, Armansyah
**SEKRETARIS REDAKSI**
Djarot Widiarto
**TIM AHLI**
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

**ALAMAT REDAKSI**
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

ILUSTRASI: SUSTHANTO

## Kasus Spekulasi Mafia Kebutuhan Pokok Rakyat

# Tuntaskan Melalui Proses Hukum Agar Tidak Menjadi Preseden

PENGAKUAN regulator negara tentang kekalahan dari mafia minyak goreng sudah direspons oleh Presiden Joko Widodo melalui penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. BLT jadi pilihan solutif agar rakyat tidak terus didera kesulitan. Kasus spekulasi minyak goreng oleh mafia pasar hendaknya dituntaskan melalui proses hukum agar tidak menjadi preseden di kemudian hari.

Penimbunan dan manipulasi stok minyak goreng menyebabkan berbulan-bulan kelangkaan di pasar, terhitung sejak awal tahun 2022. Kalau proses hukum atas kasus ini tidak berlanjut hanya karena Presiden sudah menerapkan kebijakan BLT, kasus ini akan dicatat dan dikenang publik sebagai fakta kekalahan regulator negara dari sepak terjang mafia yang mengacak-acak mekanisme pasar kebutuhan pokok masyarakat.

Patut digarisbawahi bahwa pembiaran atas kekalahan itu akan menjadi sangat fatal, karena berpotensi menjadi preseden. Kalau sejak awal 2022 mafia kebutuhan pokok masyarakat itu dibiarkan leluasa memporakporanda jalur distribusi minyak goreng, di kemudian hari, kelompok mafia yang sama akan melakukan tindakan serupa untuk komoditas lainnya.

Kecenderungan itu setidaknya sudah terlihat pada temuan kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pada Rabu (30/3), Kodim 0503 Jakarta Barat menggerebek tempat pembuangan akhir (TPA) di Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat . TPA itu ternyata dijadikan tempat penimbunan belasan ton solar. Sebelumnya, polisi juga menggerebek lokasi penimbunan BBM bio solar subsidi di salah satu rumah warga di Jambi. Sebanyak 10 ton minyak bio solar disita.

Beberapa temuan kasus pidana penimbunan minyak goreng pun sudah terungkap. Para pelaku pidana penimbunan minyak goreng maupun BBM itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Regulator negara harus berani bersikap dan bertindak tegas, sebelum persoalan serupa berulang dan tereskalasi.

Pidana penimbunan komoditas atau produk selalu merugikan masyarakat kebanyakan. Bukan hanya menyebabkan kelangkaan, tetapi pada gilirannya harga produk itu terdongkrak naik. Dan, kelangkaan produk dalam kelompok kebutuhan pokok masyarakat selalu menghadirkan kesulitan bagi jutaan keluarga.

Tak hanya masyarakat yang dirugikan. Negara pun dirugikan. Penimbunan oleh mafia komoditas menyebabkan tujuan alokasi anggaran subsidi minyak goreng dan BBM menjadi tidak tepat sasaran. Produk yang ditimbun itu dijual kepada pihak lain dengan harga lebih mahal, sehingga para mafia penimbun itu menikmati keuntungan berlipat ganda.

Dalam kasus kelangkaan minyak goreng 2022, kerugian negara bahkan menjadi lebih besar, karena pemerintah pada akhirnya harus mengambil lagi dana dari kas negara untuk membiayai BLT minyak goreng. Tentu menjadi sulit diterima akal sehat karena negara dan rakyatnya dipaksa kalah dari ulah segelintir orang melakukan penimbunan dan manipulasi peruntukan stok minyak goreng.

Padahal, masyarakat disuguhi informasi bahwa ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng yang terkumpul dalam kebijakan domestic market obligation (DMO) sudah cukup besar. Bahkan, stok minyak goreng dilaporkan melebihi jumlah rata-rata kebutuhan nasional. Sejak awal Februari, pasar sudah diguyur lebih dari 100 juta liter dan terdistribusi ke semua tempat.

Nyatanya, langkah-langkah itu tidak juga menyelesaikan masalah. Muncul dugaan adanya gangguan pada aliran distribusi. Di beberapa tempat, ditemukan adanya penimbunan. Namun, upaya memperlancar aliran distribusi tidak juga menyelesaikan masalah. Akhirnya, selepas pekan kedua Maret 2022, terungkap bahwa ada ulah mafia di balik kelangkaan itu. Oleh mafia, sebagian besar alokasi minyak goreng untuk konsumen dalam negeri diselundupkan

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**
Ketua MPR RI

ke sektor industri hingga diekspor.

Mestinya tidak sulit-sulit amat untuk meng-identifikasi mereka yang menimbun dan memanipulasi peruntukan stok minyak goreng itu. Persoalannya bergantung pada keberanian dan sikap tulus regulator untuk menindak dan memberi sanksi tegas kepada semua pelaku. Bukankah ada kementerian, Polisi hingga intelijen ekonomi.

Namun, karena persoalannya terus diambangkan, Presiden terpaksa memilih pendekatan lain agar masyarakat tidak lagi didera kesulitan. Pada awal April 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang yang berjualan makanan gorengan. Kebijakan pemberian BLT minyak goreng sangat jelas menjadi penanda kekalahan regulator dari ulah mafia pasar.

Pemberian BLT menjadi opsi yang dipilih Presiden karena para pembantunya sebagai regulator tidak juga bisa menyelesaikan persoalan. Disebutkan bahwa ada mafia yang menimbun dan memanipulasi peruntukan minyak goreng, tetapi hingga sejauh ini tidak jelas siapa mereka dan seperti apa pendekatan hukum kepada mereka. Padahal, kasus ini harus direspons dengan sikap tegas agar tidak menjadi preseden.

Jika regulator kalah dari sepak terjang mafia kebutuhan pokok masyarakat, tentu saja kekalahan itu sangat fatal dan juga sangat berbahaya karena bisa menjadi preseden di kemudian hari. Dan, kalau spekulasi atas kebutuhan pokok menjadi preseden, dinamika perekonomian nasional nantinya akan lebih disibukan oleh kegiatan merespons sepak terjang para spekulan

Dengan bersikap dan memberi sanksi tegas kepada para spekulan, pesan yang ingin disampaikan menjadi sangat jelas; bahwa regulator negara tidak akan pernah menyerah atau kalah dari sepak terjang mafia yang coba bermain-main dengan komoditas kebutuhan masyarakat. Kalau ada unsur birokrat yang menjadi bagian aktif dari mafia itu, mestinya tidak ada keraguan sedikit pun untuk menindak. Sebab, sangat berbahaya bagi birokrasi negara jika ada unsur mafia di dalamnya. Mereka akan terus menggerogoti negara dan masyarakat dengan berbagai modus.

Regulator harus mau dan berani bersikap tegas. Salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua kementerian adalah regulator. Legalitas Tupoksi sebagai regulator negara itu dipayungi oleh undang-undang (UU) negara, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) serta kebijakan atau peraturan para menteri hingga peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub).

Semua orang paham bahwa UU hingga Perda mutlak dibutuhkan dan diberlakukan untuk mengatur dan menata kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban umum, sehingga setiap individu memp-eroleh kepastian, manfaat dan keadilan. Jika setiap unsur regulator dalam organisasi atau administrasi pemerintahan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan itu dengan konsisten dan tanpa kompromi, ketertiban umum niscaya terwujud. Dan, mafia tidak akan pernah bisa mengalahkan reglator negara. ❑

Penyusunan RUU Sisdiknas

# Perlu Kajian Keterlibatan Masyarakat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Revisi UU Sisdiknas diperlukan sebagai upaya menjawab tantangan di sektor pendidikan di masa kini dan mendatang. Namun, penyusunan revisi UU Sisdiknas harus dilakukan secara cermat. Salah satu bentuk kecermatan adalah dengan melakukan kajian mendalam dan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.**

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menggelar keterangan pers bersama-sama. Kedua menteri ini memberi penjelasan mengenai polemik raibnya kata "madrasah" dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Keterangan pers bersama-sama itu disampaikan di tengah kehebohan dan polemik RUU Sisdiknas.

Kedua menteri di bawah pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo itu satu suara. Keduanya menegaskan bahwa satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, yaitu madrasah, tetap ada dalam RUU Sisdiknas. "Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana menghapus sekolah madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbesit sekalipun di benak kami," jelas Nadiem Makarim dalam keterangannya bersama Menteri Agama, di Jakarta, akhir Maret 2022.

Nadiem menekankan bahwa sekolah maupun madrasah secara substansi akan terap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas. "Yang kami lakukan adalah memberikan fleksibilitas agar penamaan bentuk satuan pendidikan, baik untuk sekolah maupun madrasah, tidak diikat di tingkat undang-undang," tuturnya.

Maksud dari pernyataan pendiri GoJek itu adalah bahwa penamaan secara spesifik, seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Artinya, boleh jadi, namanya (seperti sekolah dasar, madrasah, atau lainnya) bisa berubah tetapi substansinya tetap sama.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperkuat pernyataan Mendikbudristek. Menurut Yaqut, Kementerian Agama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kemendikbudristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas. "RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap ekosistem pesantren dan madrasah. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU

Sisdiknas," tutur Yaqut.

Menag meyakini dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas maka mutu pembelajaran untuk semua peserta didik Indonesia akan meningkat. "Kualitas sistem pendidikan kita pun akan semakin baik di masa depan," ujarnya.

Memang, tidak ada angin, tidak ada hujan, masyarakat tiba-tiba dikejutkan dengan polemik RUU Sisdiknas. Pemerintah sendiri belum secara resmi menyampaikan RUU Sisdiknas ke DPR. Namun, draf RUU Sisdiknas ternyata telah beredar di masyarakat. Beberapa komunitas pendidikan dan organisasi Islam mengkritisi draf RUU Sisdiknas. Pangkal soal adalah hilangnya frasa satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA hingga madrasah dalam draf RUU Sisdiknas. RUU yang masih mentah ini menuai kontroversi di sana sini.

Lebih jelasnya, draf RUU Sisdiknas tidak menyebut istilah madrasah dan satuan pendidikan lainnya seperti SD, SMP, hingga SMA. Hal ini berbeda dengan aturan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas berbunyi, "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat."

Selain itu, RUU Sisdiknas juga hanya mengatur pendidikan keagamaan dalam pasal 32 dan sama sekali tak menyebut kata 'madrasah'. Adapun draf RUU Sisdiknas di pasal 32 itu berbunyi, "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama."

Frasa madrah yang hilang dalam RUU Sisdiknas itu pun menuai kontroversi. Muhammadiyah, melalui Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, khawatir jika madrasah tidak masuk dalam draf RUU Sisdiknas bakal timbul berbagai masalah baru, seperti adanya dikotomi pendidikan nasional, kesenjangan mutu pendidikan, hingga masalah disintegrasi bangsa.

## Revisi UU Sisdiknas

Terlepas dari polemik RUU Sisdiknas, saat ini memang ada desakan untuk melakukan revisi atau perbaikan UU Sisdiknas. Pasalnya, telah terjadi perkembangan dan perubahan di masyarakat karena pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi. Perubahan dan perkembangan zaman ini perlu diantisipasi lewat UU Sisdiknas.

Wakil Ketua MPR, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., berpendapat bahwa UU Sisdiknas memang perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. UU Sisdiknas sudah berjalan selama 19 tahun

sejak disahkan tahun 2003. "Saat sekarang sudah banyak perubahan. Misalnya, pola ajar dan pola asuh sudah berubah. Media pengajaran juga sudah berubah. Mungkin 19 tahun lalu, perubahan yang terjadi sekarang ini tidak pernah terpikirkan," ujarnya kepada *Majelis*.

Apalagi, lanjut Lestari, selama dua tahun belakangan Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang mengubah semua tatanan kehidupan dan melahirkan norma-norma baru yang menjadi kenormalan baru. "Mau tidak mau kita harus melihat apakah UU Sisdiknas yang sudah berjalan 19 tahun ini bisa memenuhi kebutuhan saat ini," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga berpendapat serupa bahwa UU Sisdiknas memang perlu dilakukan perubahan, revisi. Pasalnya, UU Sisdiknas sudah berlaku sejak 2003. Padahal, telah terjadi perkembangan di masyarakat. "Jadi UU Sisdiknas memang harus kita ubah. UU itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau diurut waktunya, UU Sisdiknas sudah berlaku sejak 2003. Jadi, memang sudah waktunya dilakukan perubahan, karena sudah lebih dari 19 tahun," katanya seperti dikutip dari wawancara di Majalah *Majelis* edisi April 2022.

Dede mengakui, Komisi X belum menerima naskah RUU Sisdiknas. Karena itu, Dede Yusuf menduga draf RUU Sisdiknas yang beredar di masyarakat sebagai bentuk uji publik, semacam *test the water* (mengetes psikologi dan reaksi publik). "Jadi draf RUU Sisdiknas yang beredar di masyarakat adalah draf yang masih uji coba karena belum masuk ke DPR. Kita menganggap hal ini baru semacam *test the water*. Seharusnya memang dilakukan uji publik terhadap naskah RUU Sisdiknas," kata Dede Yusuf yang juga Wakil Ketua Komisi X yang membidangi masalah pendidikan.

Berkaitan dengan polemik hilangnya frasa

**Dede Yusuf** FOTO-FOTO: ISTIMEWA

"madrasah" dalam RUU Sisdiknas itu, Dede Yusuf mengungkapkan banyak lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang datang ke Komisi X. Mereka semua mengeluhkan RUU Sisdiknas yang menghilangkan frasa "madrasah" dalam batang tubuh (pasal). "Kita sudah memberikan teguran kepada pemerintah. Maka DPR (Komisi X) bersama Kemendikbudristek perlu mengkaji naskah itu," ujarnya.

Menurut Dede Yusuf, pendidikan di Indonesia juga dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satunya melalui madrasah. Karena itu, tumbuh Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah

**H.A. Mujib Rohmat**

Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan sebagainya (lihat bagian kedua, "Kiprah Panjang Madrasah"). "Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah ada sebelum negara Indonesia lahir," jelasnya.

Karena itu, Dede Yusuf meminta agar frasa "madrasah" dimasukkan kembali ke dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. "Kalau diletakkan dalam penjelasan RUU maka tidak menjadi jurisprudensi atau tidak menjadi dasar hukum yang kuat. Tetapi jika dimasukkan dalam batang tubuh maka sudah spesifik. Karena itu dalam konteks ini, madrasah harus kita tarik ke dalam batang tubuh RUU Sisdiknas," pintanya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H.A. Mujib Rohmat, MH., juga sepakat bahwa bila dilihat dari waktunya maka UU Sisdiknas memang perlu dilakukan revisi dan perbaikan-perbaikan. Pasalnya, UU Sisdiknas harus mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Ambil contoh, pada saat pandemi Covid-19, ada satu model pengajaran baru yaitu pengajaran secara online atau daring. Juga telah terjadi perkembangan teknologi 4.0.

"Kita tertatih-tatih menghadapi perubahan seperti itu. Banyak kondisi di daerah yang bermasalah karena ketiadaan jaringan internet, jaringan tidak bagus, keterbatasan kuota. Revisi UU Sisdiknas merupakan upaya menghadapi tantangan seperti itu, juga teknologi 4.0, " ujarnya kepada *Majelis*. Berbagai isu di bidang pendidikan, lanjut Mujib Rohmat, membutuhkan adanya revisi dan perbaikan UU Sisdiknas.

## Kajian Mendalam

Lebih lanjut, Rerie menyatakan, revisi UU Sisdiknas diperlukan sebagai upaya menjawab tantangan di sektor pendidikan di masa kini dan mendatang. Namun, penyusunan revisi UU Sisdiknas harus dilakukan secara cermat. Salah satu bentuk kecermatan adalah dengan melakukan kajian

mendalam dan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan.

Rerie menyebut agar tidak menimbulkan polemik, RUU Sisdiknas perlu ditelaah kembali. Dalam rangka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini di masyarakat, sebelum melakukan perubahan atau penyesuaian (revisi UU), perlu dilakukan kajian mendalam dengan mendengarkan semua masukan dari berbagai pihak.

**Lestari Moerdijat**

"Jadi saya rasa inilah saat yang tepat untuk dilakukan penelaahan kembali. Tapi bagi saya yang paling penting adalah ketika kita melakukan perubahan, penyesuaian atau apapun itu namanya harus dilakukan kajian secara mendalam dan mendengarkan masukan dari semua pihak. Selain itu, memberikan ruang yang cukup luas untuk keterlibatan semua elemen masyarakat. Para *stakeholder* harus terlibat sehingga hasilnya nanti kalaupun tidak sempurna, paling tidak sudah melengkapi dan bisa menjawab semua permasalahan yang ada," papar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem ini.

"Maka dari itu, seperti saya bilang tadi, bahwa revisi UU Sisdiknas ini harus berorientasi kepada kemajuan pendidikan nasional kita saat ini dan di masa akan datang. Untuk itulah, sebelum melakukan revisi harus melakukan kajian dengan melibatkan semua pihak yang peduli kemajuan pendidikan nasional Indonesia, sehingga ketika revisi itu terjadi, hasilnya tidak akan menimbulkan polemik baru," imbuhnya.

Tidak jauh berbeda, Dede Yusuf juga mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan UU harus melalui proses. Dia mengaku sudah menyampaikan ke Kemendikbudristek untuk proses perubahan UU Sisdiknas. Bila dimasukkan dalam Prolegnas maka akan memerlukan waktu yang panjang. Padahal tahun 2023, semua anggotaa dewan akan mempersiapkan Pemilu 2024. "Karena itu, kita minta Kemendikbud untuk melakukan komunikasi publik dengan *stakeholder* pendidikan. *Stakeholder* pendidikan bukan hanya Komisi X DPR tetapi juga dunia pendidikan," katanya.

Lebih rinci soal proses revisi UU, Mujib Rohmat menghendaki berbagai isu berkaitan dengan pendidikan tertuang lebih dulu dalam naskah akademik perubahan UU Sisdiknas. Dengan naskah akademik ini maka bisa diketahui *reasoning* dan tujuan mengapa harus dilakukan perubahan (bahkan penggantian) terhadap UU Sisdiknas. "Semua membutuhkan naskah akademik yang berisi landasan filosofis, juridis, dan landasan sosiologis yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan UU Sisdiknas," jelasnya.

Mujib berharap, pemerintah (Kemendikbudristek) sudah mempersiapkan naskah akademik perubahan UU Sisdiknas. Selain itu, Mujib juga meminta Kemendikbudristek untuk menyosialisasikan naskah akademik perubahan UU Sisdiknas kepada pemerhati dan pakar pendidikan, serta lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. "Sebab penyelenggara pendidikan bukan hanya pemerintah, tetapi lebih banyak swasta. Bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, seperti lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, NU, dan lainnya," tambahnya.

Karena itu, lanjut Mujib, revisi UU Sisdiknas perlu dibicarakan atau didiskusikan dengan masyarakat, yaitu para akademisi, penyelenggara pendidikan, juga para alim ulama karena ada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. "Naskah akademik untuk revisi UU Sisdiknas harus bisa memotret hasil pendidikan nasional. Sebab, pendidikan di Indonesia berbeda dengan pendidikan di dunia Barat. Pendidikan di Indonesia juga membangun karakter bangsa, karakter ke-Indonesiaan. Ini menjadi tujuan utama pendidikan kita," sebutnya.

Mujib menekankan bahwa revisi UU Sisdiknas sangat penting tetapi jangan lupa memerhatikan proses manajerial perubahan UU itu, seperti urutan-urutan dalam penyusunan UU yang dimulai dengan naskah akademik, para penyusun UU harus mengundang dan meminta masukan dari para tokoh pendidikan, akademisi, dan penyelenggara lembaga pendidikan.

"Kita harapkan manajerial atau tahapan dalam penyusunan UU bisa dilakukan dengan baik, didiskusikan dengan masyarakat, karena pendidikan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik masyarakat. Kemudian dituangkan dalam RUU yang sudah dalam bentuk setengah matang ketika disampaikan ke DPR," pungkasnya. ❑

**DER/BSC**

# Kiprah Panjang Madrasah

Madrasah menjadi saksi bisu perjuangan pendidikan di Indonesia. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki kiprah panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia.

DALAM sejarah pendidikan Islam, madrasah memegang peranan penting sebagai tempat transformasi ilmu bagi anak didik umat Islam. Kata "madrasah" sendiri berasal dari akar kata "darasa-yadrusu-darsan". Kata "madrasah" menunjuk arti "tempat belajar" secara umum, atau tidak merujuk pada suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, baik di rumah, di surau atau langgar, di masjid maupun di tempat lain sesuai situasi dan kondisi.

Pada waktu lalu, madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang umumnya berada di samping masjid atau pesantren. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata "madrasah" adalah sekolah. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis kata "madrasah" dikonotasikan secara sempit, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilum agama, juga ilmu umum.

Madrasah menjadi saksi bisu perjuangan pendidikan di Indonesia. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki kiprah panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah mencatat, madrasah pertama kali berdiri di Kota Padang, Sumatera Barat. Yaitu, Madrasah Adabiyah, berdiri tahun 1909, didirikan oleh Syeikh Abdullah Ahmad. Setelah itu, madrasah lain pun tumbuh bak jamur di musim hujan.

Pada tahun 1910, Syaikh M. Taib Umar mendirikan Madrasah Schoel di Batusangkar. Pada tahun 1918, M. Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madrasah School. Pada tahun 1907, Syeikh Abdul Karim Amrullah mendirikan Madrasah Tawalib di Padang Panjang. Kemudian, H. Abdul Somad mendirikan Madrasah Nurul Uman di Jambi.

Di Pulau Jawa, madrasah mulai berkembang tahun 1912. Berbeda dengan madrasah di Sumatera, di Jawa ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya. Ada juga madrasah yang mengadopsi sistem pendidikan Belanda plus. Seperti organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Pada tahun 1912 Muhammadiyah di Yogyakarta mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum, dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah.

Ada juga model Al Iryad di Jakarta. Syeikh Ahmad Sokarti mendirikan Madrasah Al Irsyad pada tahun 1913. Berikutnya, pada 1926, salah satu orgnisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asyhari dan K.H. Wahab Hasbullah, mulai banyak mendirikan madrasah.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan respon terhadap sekolah-sekolah umum yang didirikan pemerintah Hinda Belanda yang tidak memasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam. Belanda tentu saja resah dengan perkembangan madrasah. Lalu, keluarlah peraturan yang menetapkan madrasah sebagai "sekolah liar". Belanda juga mengeluarkan sejumlah peraturan yang melarang atau membatasi madrasah. Akan tetapi, madrasah tetap berdiri dimana-mana.

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan Islam madrasah sudah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Islam pesantren. Madrasah sudah memasukkan pelajaran-pelajaran umum. Metode pengajarannya pun sudah mengikuti metode pendidikan modern barat, yaitu menggunakan ruang kelas, kursi, meja, dan papan tulis untuk proses belajar mengajar.

Perkembangan serta kemajuan pendidikan Islam terus meningkat secara signifikan. Pada pertengahan dekade 60-an, madrasah sudah tersebar di berbagai daerah di hampir seluruh provinsi Indonesia. Madrasah telah membuka akses atau kesempatan bagi masyarakat miskin dan marginal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan karena biaya yang relatif murah dan menjangkau daerah-daerah terpencil. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sudah sejak awal pendidikan madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberi perhatian pada madrasah. Dalam PP No. 33 Tahun 1949 dan PP No. 8 Tahun 1950, pemerintah memberi bantuan kepada madrasah dengan subsidi per siswa sebesar Rp 60.000. Pada masa reformasi, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 3, madrasah diakui statusnya sederajat dengan sekolah umum.

Pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2003 membawa pendidikan Islam ke dalam babak baru. Sebab, dalam UU itu sistem pendidikan Islam dikukuhkan sebagai pranata pendidikan nasional. Misalnya, jenjang pendididkan dasar, selalu dikaitkan dengan Madrasah Ibtidaiyah, sekolah memengah pertama dikaitkan dengan Madrasah Tsanawiyah, dan sekolah menengah atas dikaitkan dengan Madrasah Aliyah.

Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 12 ayat (2) PP itu menyebutkan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Namun, PP ini tidak jalan. Banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perimbangan dana kepada madrasah. Dana 20% pendidikan di APBD masih menyisakan sangat sedikit untuk madrasah.

Baru pada tahun 2022 ini, Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) untuk madrasah tahap I. Untuk program ini terdapat 1.688.601 siswa penerima PIP madrasah tahap I. Jumlah ini terdiri atas 778.195 siswa MI, 595.611 siswa Madrasah Tsanawiyah atau MTs, dan 314.795 siswa Madrasah Aliyah atau MA. Total anggaran PIP Madrasah yang dicairkan pada tahap I mencapai Rp 903.470 miliar.

"Proses verifikasi dan validasi tahap I sudah selesai. Mulai 23 April 2022, PIP untuk Madrasah Ibtidaiyah sudah mulai cair. Ada 778.195 siswa dengan jumlah anggaran Rp 336,1 miliar. Untuk MTs dan MA, saat ini sedang proses pembuatan no rekening," kata M. Ishom Yusqi, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, di Jakarta, Ahad 24 April 2022.

Besaran PIP untuk MI adalah Rp 450 ribu per siswa (Kelas VI hanya diberikan setengahnya). Untuk MTs, Rp 750 ribu per siswa (Kelas IX hanya mendapat setengahnya), sedangkan untuk MA sebesar Rp 1 juta (Kelas XII hanya diberikan setengahnya).

Berdasarkan laporan statistik Indonesia, saat ini (tahun ajaran 2021/2022), terdapat 30.606 unit sekolah Raudhatul Athfal (RA) yang dikelola di bawah Kementerian Agama. Diikuti Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 26.129 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 18.759 unit, Madrasah Aliyah (MA) berjumlah sebanyak 9.448 unit. Sedangkan jumlah siswa madrasah diperkirakan lebih dari 5 juta siswa.

Pada waktu lalu, sekolah madrasah dianggap tidak memiliki prestise dibandingkan sekolah umum. Hal itu tidak lepas dari image yang menggambarkan lulusan-lulusan madrasah tidak mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari sekolah umum. Lulusan madrasah hanya mampu menjadi seorang ustadz atau guru agama.

Tapi, dalam konteks kekinian, image madrasah atau sekolah Islam telah berubah. Madrasah sekarang sudah diminati siswa dari masyarakat golongan kelas menengah atas. Penyebabnya, sekolah-sekolah Islam atau madrasah elit telah bermunculan dan kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Sebut saja, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam Al Azhar, Sekolah Islam Al Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, Madania School, dan lain sebagainya. Apalagi madrasah sekarang ini sudah menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. ❑

**BS** dari berbagai sumber

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM** Wakil Ketua MPR RI

# RUU Sisdiknas Perlu Kajian dan Libatkan Stakeholder Pendidikan

*UNDANG-UNDANG Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) atau UU No. 20 Tahun 2003 sudah berlaku selama 19 tahun. Sejak UU Sisdiknas berlaku hingga saat ini telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan di masyarakat. Sebut saja, perkembangan pesat teknologi informasi atau penggunaan gadget secara masif yang juga memengaruhi pendidikan. Mau tidak mau, UU Sisdiknas harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena itu, pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional) berencana menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).*

*RUU Sisdiknas sudah terbentuk. Namun faktanya, sebelum disampaikan ke DPR, RUU Sisdiknas itu telah beredar di masyarakat. Ternyata, banyak muatan dalam RUU Sisdiknas yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hilangnya frasa "madrasah" dalam RUU Sisdiknas. Walaupun Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sudah mengklarifikasi bahwa madrasah tidak hilang dalam RUU Sisdiknas, tak urung kehadiran RUU Sisdiknas tetap menjadi sorotan.*

*Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., juga memberi perhatian pada RUU Sisdiknas ini. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, berikut perbincangan Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem yang juga anggota Komisi X DPR ini seputar RUU Sisdiknas. Petikannya.*

**UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sidiknas) sudah berusia 19 tahun sejak disahkan tahun 2003. Kini UU Sisdiknas atau UU No. 20 Tahun 2003 ini hendak direvisi. Pemerintah telah menyusun RUU Sisdiknas. Sebelum disampaikan ke DPR, RUU Sisdiknas itu telah beredar di masyarakat. Bagaimana tanggapan Ibu dengan rencana revisi UU Sisdiknas melalui penyusunan RUU Sisdiknas? Apakah memang sudah saatnya UU Sisdiknas yang sudah berusia 19 tahun itu disesuaikan dengan keadaan masa kini?**

Begini, revisi dan perbaikan UU bukan hal yang tabu. Menurut saya, dengan berkembangnya bukan hanya berjalannya waktu tapi pola pendidikan 19 tahun yang lalu dengan saat era sekarang sudah sangat berubah. Misalnya, pola ajar dan pola asuh sudah sangat berubah, medianya juga berubah total, kebutuhannya berubah total. Bukan hanya sekedar *link and match*, mediumnya juga berubah. Seperti metode belajar mengajar dengan sistem tatap muka. Mungkin, 19 tahun yang lalu hal ini tidak begitu

dikenal dan popular.

Pandemi Covid-19 kemudian datang. Pandemi mengubah semua tatanan kehidupan kita di seluruh dunia dan melahirkan norma-norma baru yang menjadi kenormalan baru. Mau tidak mau kita harus melihat apakah UU Sistem Pendidikan Nasional yang kita miliki dan sudah berjalan selama 19 tahun lalu sudah memenuhi kebutuhan saat ini.

Jadi saya rasa inilah saat yang tepat untuk dilakukan penelaahan kembali. Tapi, bagi saya yang paling penting adalah ketika kita melakukan perubahan, penyesuaian atau apapun itu namanya harus dilakukan kajian secara mendalam dan mendengarkan masukan dari semua pihak. Selain itu, memberikan ruang yang cukup luas untuk keterlibatan semua elemen masyarakat.

Para *stakeholder* harus terlibat sehingga hasilnya nanti kalaupun tidak sempurna, paling tidak sudah melengkapi dan bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Hal ini penting agar regulasi terkait sistem pendidikan nasional ini nantinya bisa berfungsi dengan baik dan berkesinambungan.

**RUU Sisdiknas sudah beredar di masyarakat dan mendapat tanggapan dari berbagai kelompok dan kalangan. Salah satu keberatan yang disampaikan beberapa kelompok dan organisasi masyarakat adalah hilangnya kata "madrasah" dalam RUU Sisdiknas. Apa tanggapan ibu terhadap polemik ini?**

Maka dari itu, seperti saya bilang tadi, bahwa revisi UU Sisdiknas ini harus berorientasi kepada kemajuan pendidikan nasional kita saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk itulah, sebelum melakukan revisi harus melakukan kajian dengan melibatkan semua pihak yang peduli kemajuan pendidikan nasional Indonesia, sehingga ketika revisi itu terjadi, hasilnya tidak akan menimbulkan polemik baru

**Kemendikbudristek dan Kementerian Agama telah mengklarifikasi bahwa kata "madrasah" tidak ada di dalam batang tubuh UU (pasal UU), melainkan ada dalam bagian penjelasan. Alasannya, agar lebih fleksibel. Bagaimana menurut Ibu, apakah sebaiknya "madrasah" tetap dimasukkan dalam batang tubuh UU, atau tetap di bagian penjelasan?**

Untuk itulah kajian secara mendalam harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan kajian mendalam ini kita bisa mendeteksi hal-hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Dalam kajian, hal-hal yang muncul dalam penyusunan RUU Sisdiknas bisa didiskusikan dengan baik. Dengan demikian, bisa keluar kesimpulan dan kebijakan yang membuat nyaman semua elemen masyarakat.

**Banyak pengamat dan kalangan menyebutkan penyusunan RUU Sisdiknas tidak melibatkan masyarakat atau komunitas pendidikan (seperti PGRI, dan lainnya). Apa tanggapan Ibu?**

Revisi UU Sisdiknas menurut saya memang sangat diperlukan agar sistem pendidikan nasional mampu menjawab tantangan di sektor pendidikan di masa kini dan mendatang. Semangat untuk menyegerakan penyusunan revisi UU Sisdiknas juga harus dibarengi dengan kecermatan dalam penyusunan revisi tersebut. Salah satu bentuk kecermatan dalam penyusunan RUU Sisdiknas adalah dengan melakukan pendalaman dan melibatkan masyarakat dan komunitas pendidikan. Saya rasa pelibatan stakeholder pendidikan itu harus dilakukan dalam penyusunan RUU Sisdiknas.

**Menurut Ibu, bagaimana sistem pendidikan nasional (apa yang harus menjadi titik berat atau penekanan) dalam UU Sisdiknas? Misalnya, link and match, antara dunia pendidikan dan dunia kerja?**

*Link and match* sangat perlu, sebab pendidikan nasional harus sesuai atau menyesuaikan dengan kebutuhan kerja. Namun, penekanan sistem pendidikan nasional yang terpenting adalah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan era sekarang. Sistem pendidikan nasional harus bisa memenuhi kebutuhan era saat ini mulai dari sistem belajar mengajarnya, medianya. Lalu apakah UU Sistem Pendidikan Nasional yang lalu bisa menjawab itu semua. Maka dari itulah penelaahan soal revisi selalu saya bilang tidak tabu jika untuk tujuan peningkatan kuliatas pendidikan nasional

**Apakah revisi UU Sisdiknas ini bisa meningkatkan mutu pendidikan nasional?**

Sekali lagi saya tekankan, revisi UU Sisdiknas bukan hal yang tabu. Namun, sebelumnya harus dilakukan kajian secara mendalam dengan melinatkan semua pihak atau komunitas pendidikan. Pemerintah perlu mendengarkan masukan dan aspirasi mereka. Semua masukan dari *stakeholder* itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan revisi UU itu. Harapannya setelah dilakukan revisi atas UU Sisdiknas, maka UU tersebut akan beroperasi dan dapat diimplementasikan secara baik untuk meningkatkan pendidikan nasional Indonesia. ❑

Sidang Senat Terbuka UNM

# Mengukuhkan Syarief Hasan Sebagai Profesor

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengatakan, pengukuhan dirinya sebagai profesor dari UNM adalah sebuah amanah yang mesti disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya.**

WAKIL Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengatakan, pengukuhan dirinya sebagai profesor dari UNM adalah sebuah amanah yang mesti disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Gelar Profesor (Guru Besar Tetap) Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (31/3/2022), Wakil Ketua MPR RI Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., resmi dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM oleh Rektor UNM, Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU., ASEAN Eng.

Dalam acara yang digelar di Ballroom Theater Menara Phinisi UNM, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini diberi kesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Rektor, para Wakil Rektor. dan para Guru Besar.

Tanpa teks, Syarief Hasan langsung membawakan orasi ilmiahnya dengan judul: 'Ekonomi Pancasila dan Implementasi Manajemen Administrasi Bisnis, Strategi Koperasi dan UMKM'.

Di awal paparan, Syarief Hasan mengutarakan bahwa perkembangan perekonomian global saat ini dikuasai dua pemahaman ekonomi yang berbeda, yakni: *Pertama*, Ekonomi Liberal. Paham ini banyak dipengaruhi pasar bebas dan kapitalis yang berorientasi serta hanya fokus kepada keuntungan yang setinggi-tingginya. Paham ini juga menolak segala unsur intervensi dan proteksi negara dalam ekonomi.

Ekonomi liberal ini tidak mampu menjadikan manusia untuk memiliki kepekaan kepada orang lain yang secara ekonomi kurang beruntung. Padahal, mereka yang berada dalam kemiskinan mesti diperhatikan dan diperlakukan dengan layak. Paradigma ekonomi liberal memang memandang manusia sebagai homo economicus atau manusia ekonomi. Artinya, manusia hanya berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan.

*Kedua*, Ekonomi Sosialialis. Paham ini menekankan bahwa semua sarana produksi harus dimiliki bersama oleh masyarakat. Mengutip dari Karl Marx bahwa masyarakat harus hidup dalam suasana sama rata dan menguasai ekonomi. Dalam paradigma ekonomi sosialis, pemerintah mengontrol penuh dan langsung supplay and demand ekonomi secara mandiri dalam bentuk intervensi negara.

"Pertanyaan besarnya adalah posisi Indonesia di mana? Indonesia menganut ekonomi seperti apa? Banyak pandangan dari para pakar dan ahli soal ini dan semua mengerucut kepada ekonomi kerakyatan. Menurut saya itu semua bisa diterima," kata Syarief Hasan.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II di era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, memiliki pendapat sendiri soal paham ekonomi Indonesia yang menurutnya cocok untuk diterapkan di tanah air. Yakni, 'Ekonomi Pancasila'.

"Saya menyebutkan Ekonomi Pancasila, karena sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)," ungkapnya.

Syarief Hasan menjelaskan, Ekonomi Pancasila adalah sistem

perekonomian yang harus dijalankan dengan asas kekeluargaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan. Adapun peran Pemerintah dalam implementasi Ekonomi Pancasila ini adalah, berjalan sebagai regulator dan pengambil kebijakan untuk menstimulasi dan menstabilkan ekonomi. Tapi, dengan tetap melakukan intervensi pasar bila diperlukan demi kepentingan rakyat.

Intinya, Ekonomi Pancasila memiliki tujuan mulia untuk membangun perekonomian Indonesia yang rasional, adil, dan merata. Untuk itu, semua kebijakan penguasa diperlukan keberpihakan agar pelaku ekonomi rakyat yang kebanyakan UMKM, lebih produktif secara maksimal.

Tampak hadir dalam acara itu beberapa pimpinan lembaga dan pejabat sebagai tamu kehormatan, diantaranya para Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Jazilul Fawaid dan Ahmad Muzani, Komandan Lantamal VI Makassar Laksma TNI Benny Sukandari, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang, Bupati Gowa, Walikota dan Wakil Walikota Palopo, serta keluarga besar, teman, sahabat Syarief Hasan.

Kepada awak media massa usai acara, Syarief Hasan mengatakan bahwa pengukuhan dirinya sebagai Profesor dari UNM adalah sebuah amanah yang mesti disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya. “Ini suatu kebanggaan besar buat saya dan keluarga besar saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi saya untuk berbuat lebih baik dan maksimal lagi untuk masyarakat. Dan, saya harap menjadi motivasi juga buat adik-adik mahasiswa agar tak kenal lelah untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya,” ujarnya.

Rektor UNM Prof. Dr. Ir. Husain Syam mengucapkan selamat kepada Syarief Hasan sekaligus mengungkapkan kekagumannya pada orasi ilmiah yang disampaikan pada saat acara pengukuhan.

“Luar biasa ya, saya tidak perlu menyimpulkan isi orasi Pak Profesor Syarief, tanpa teks menggebu-gebu, pemaparannya jelas dan menambah wawasan kita semua. Ini yang kita harapkan dari seorang Profesor, saling berbagi ilmu. Kita harapkan, setelah menjadi Guru Besar UNM, Profesor Syarief Hasan bisa sering menyampaikan ilmu-ilmunya di UNM ini. Dan, semoga kiprah beliau untuk berbakti kepada masyarakat lebih luas lagi,” tandasnya. ❑

**DER**

## Mengantisipasi Dampak Krisis Global

# Perkuat Ketahahan Pangan Nasional

Krisis global menuntut kita mempersiapkan langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri.

MASALAH pangan yang kita hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia. Karena itu kita memerlukan langkah-langkah antisipasi agar kita memiliki ketahanan pangan yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mengantisipasi Ancaman Krisis Pangan Dampak Perang Ukraina-Rusia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/4).

Diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA., (Direktur Sparklabs Universitas Pelita Harapan) itu menghadirkan Dr. Bayu Krisnamurti (Wakil Menteri Pertanian 2009- 2011 dan Wakil Menteri Perdagangan 2011 – 2014), Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB), Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung), dan MG Westri Kekalih Susilowati, S.E., M.E.,(Dosen Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang) sebagai narasumber.

Hadir pula Martin Manurung, S.E., M.A., (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) dan Drs. Luthfi A. Mutty, M.Si., (Pelaku Usaha Tani / Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) sebagai penanggap..

Menurut Lestari, para pemangku kepentingan harus belajar dari berbagai konflik global saat ini dengan terus berupaya memperkuat sumber daya yang kita miliki agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan, setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi.

Ketahanan pangan, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat.

Pada tahun 2020, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah badan dunia menganalisa secara komprehensif tentang ancaman serta indikasi kerawanan pangan dan malnutrisi secara global berdasarkan refleksi mendalam atas situasi pandemi yang menggerogoti setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan catatan Badan Pangan Dunia (FAO), ujarnya, kondisi itu diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan kenaikan 17,1% harga komoditas biji-bijian dunia, termasuk barley, gandum, dan jagung.

Karena, tambah Rerie, krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.

Kondisi itu, tambahnya, harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.

Wakil Menteri Pertanian 2009- 2011, Bayu Krisnamurti mengungkapkan, inflasi Indonesia Januari 2022 hingga Maret 2022 sudah tercatat 2,4%. Angka tersebut, menurut Bayu, sudah melampaui angka inflasi Indonesia pada 2019 pra pandemi yang tercatat 2,27%.

Bayu menyarankan agar kita harus bersiap menghadapi inflasi Indonesia melebihi angka perkiraan pemerintah yang sebesar 3 +/-1% atau berkisar 4%.

Harga-harga komoditas dunia, seperti gandum, sapi bakalan, gula, kedelai, dan CPO, jelas Bayu, naik tajam. Hal itu, disebabkan pasokan komoditas merespon lambat terhadap pemulihan dari pandemi di beberapa negara.

Jadi, menurut Bayu, kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja dan berdampak global, termasuk Indonesia.

Senada dengan Bayu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan, dampak harga komoditas dunia sangat mempengaruhi kondisi pasokan pangan Indonesia.

Kondisi saat ini, ujar Dwi, FAO food price indeks dunia sudah mencapai 152 atau lebih tinggi daripada food price indeks saat terjadi perang Arab-Israel pada 1973-1975 yang sebesar 137.

Dwi memperkirakan tahun ini akan terjadi krisis pangan dunia dan kemungkinan akan panjang. Menghadapi kondisi itu, ujar Dwi,

Indonesia akan kesulitan menghadapinya, karena angka ketahanan pangan Indonesia terus memburuk pada tiga tahun terakhir.

Dwi berharap, berbagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat harus terus dilakukan, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sejumlah terobosan anak bangsa, ujar Dwi, dalam menghasilkan bibit unggul tanaman pangan, produksi pupuk dan sejumlah inovasi lainnya harus mendapatkan dukungan yang memadai demi kemandirian pasokan pangan nasional.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengungkapkan, kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini dipengaruhi faktor geopolitik, perubahan iklim dan pandemi.

Menurut Bustanul, kondisi yang menyebabkan gejolak harga pangan itu harus diantisipasi secara menyeluruh.

Untuk jangka pendek, ujarnya, pemberian bantuan langsung tunai dan sejenisnya harus dilakukan secara efektif, jangan sampai terjadi kebocoran.

Selain itu, tambah Bustanul, upaya dalam jangka menengah bisa dilakukan lewat pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai pasokan yang mampu meningkatkan nilai pangan dan untuk jangka panjang dengan memperkenalkan teknologi pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Dosen Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang, MG Westri Kekalih Susilowati, berpendapat, permasalahan pangan itu mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat.

Karena masalah pangan, jelas Westri, sangat dipengaruhi alih fungsi lahan dan degradasi lahan di sisi produksi, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya status ekonomi yang memengaruhi pola konsumsi dan pada akhirnya berpengaruh pada ketersediaan pangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung berpendapat, setiap komoditas memiliki kerakteristik yang khas, sehingga perlakuan terhadap setiap komoditas harus berbeda untuk upaya perbaikan.

Martin juga mendesak pemerintah harus secara ketat mengawal harga-harga komoditas di tengah harga komoditas global yang bergejolak.

Menurut dia, upaya pengawalan harga komoditas pernah dilakukan pemerintah dan berhasil mengendalikan harga beberapa tahun lalu. “Saya kira pemerintah bisa menerapkan strategi yang sama untuk mengendalikan harga komoditas kali ini,” ujar Martin.

Kolaborasi antara instansi dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah, tegas Martin, harus diperbaiki sehingga upaya untuk mengatasi gejolak harga komoditas di tanah air bisa berjalan dengan baik.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Luthfi A. Mutty, berpendapat, masalah pangan yang kita hadapi saat ini adalah dampak dari masalah global.

Meski begitu, menurut Luthfi, kondisi itu harus dihadapi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Karena, tambahnya, kelembagaan petani di tanah air saat ini terbilang lemah. Kelompok tani tidak lagi jadi tujuan untuk dibina. Banyak penyuluh pertanian, jelas Luthfi, beralih dari tenaga fungsional menjadi tenaga struktutal.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang begitu besar di sektor keter-sediaan pangan yang harus segera diselesaikan.

Cadangan beras dalam negeri yang hanya tersedia untuk 1-2 bulan misalnya, ujar Saur, harus bisa ditingkatkan. Demikian pula produksi pangan nasional yang tidak mampu mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

Pemberdayaan petani dari sisi kemampuan dan kreativitas juga harus menjadi kepedulian bersama agar mampu mendorong produktivitas pangan nasional. ❑

Terima Pengurus KNPI dan MBM

# KNPI dan MBM Harus Jadi Lokomotif Memajukan Pemuda ASEAN

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dorong peningkatan hubungan kepemudaan Indonesia (KNPI) dan Mejelis Belia Malaysia (MBM).

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong agar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Haris Pertama bersama Majlis Belia Malaysia (MBM) di bawah kepemimpinan Presiden Mohd Izzat Afifi senantiasa meningkatkan hubungan kepemudaan antara Malaysia dengan Indonesia (Malindo) dalam bentuk dialog maupun berbagai kemitraan lainnya.

Menurut Bamsoet upaya itu perlu dilakukan mengingat kedua negara memiliki populasi pemuda yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Dari sekitar 213 juta jumlah pemuda di kawasan ASEAN, Indonesia dan Malaysia menjadi penyumbang terbesarnya. Indonesia dengan sekitar 145 juta pemuda, Malaysia dengan sekitar 24 juta pemuda.

"Selain bertetangga karena jaraknya yang berdekatan, hubungan Indonesia dan Malaysia juga dikuatkan sebagai negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan, baik dari latar belakang budaya maupun penggunaan bahasa sehari-hari," ungkap Bamsoet usai menerima pengurus KNPI dan pengurus MBM, di Jakarta, Selasa (12/4/22).

Lebih lanjut Bamsoet menyatakan, peningkatan hubungan people to people contact melalui para pemuda sangat penting, agar kedua negara bisa senantiasa menjaga kedamaian dan bisa menghadapi bersama berbagai gangguan yang datang.

Pengurus MBM yang hadir, antara lain Presiden Mohd Izzat Afifi dan Setia Usaha Agung (Sekretaris Jenderal) Hasnul Hanif. Sementara pengurus KNPI yang hadir, antara lain Ketua Umum Haris Pertama, Sekretaris Jenderal Gandung Rafiul Nurul Huda, Ketua BP KNPI Malaysia Tengku Adnan, dan Ketua DPD KNPI Kepulauan Riau Dewi Socowati.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, sebagai organisasi kepemudaan di masing-masing negara, KNPI dan MBM harus bisa menjadi lokomotif memajukan pemuda Asia Tenggara agar senantiasa menjadi Macan Asia.

Sebagai kawasan yang paling stabil di dunia, tanpa pernah ada intervensi militer maupun gonjang-ganjing lainnya yang mengganggu kondusifitas kawasan, masa depan ASEAN yang dmai bukanlah semata terletak pada kekuatan ekonomi, sosial, budaya, maupun militernya. Melainkan terleta pada para pemudanya.

"Karenanya, diperlukan kesamaan visi antarpemuda ASEAN agar senantiasa bisa berkolaborasi untuk berkontribusi menjaga ASEAN yang damai, maju, modern, dan berdaya saing tinggi. Penguatan kepemudaan juga menjadi modal utama bagi ASEAN agar bisa berperan aktif di kawasan Indo-Pasifik. Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi ke depannya akan sangat besar. Seperti klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan hingga dampak ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, khusus terkait sektor ekonomi, ASEAN tercatat memiliki pertumbuhan yang tinggi dalam investasi perusahaan teknologi berbasis digital atau start up. Pada 2015, pendanaan teknologi berbasis digital atau start up tercatat hanya sekitar US $ 7,86 miliar. Pada triwulan II/2021, jumlahnya meningkat pesat menjadi US$ 124,8 miliar.

"Memiliki jumlah penduduk mencapai 655,298 juta jiwa, ASEAN telah menjadi pasar potensial bagi perusahaan teknologi dari berbagai negara dunia. Karenanya agar tidak hanya menjadi pasar, para pemuda ASEAN harus bisa meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi antarsesama," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Pengurus Pusat Pengembang Indonesia

# Bamsoet Dorong Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Harga Terjangkau

**Pada tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan membangun 11 juta rumah layak huni. "Untuk menyukseskannya butuh kerja keras semua pihak, " ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.**

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung program kerja nasional Pengembang Indonesia dalam membangun perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau melalui tagline, 'Satu Hektar Satu Kecamatan'. Sebagai dukungan terhadap peningkatan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015. Sekaligus sebagai wujud konkret membantu pemerintah menjalankan amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengembang Indonesia juga memiliki Program Kawasan 'Kota Mandiri Skala Kecil', dengan mewujudkan Hunian Berimbang. Sebagai wujud implementasi dukungan terhadap Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpera 10/2012, yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang, dengan komposisi pembangunan perumahan 1-2-3. Satu Rumah Mewah, Dua Rumah Menengah, dan Tiga Rumah Sederhana.

"Kementerian PUPR melaporkan, Program Sejuta Rumah memang sudah terealisasi pada akhir tahun 2021 dengan hasil mencapai 1.105.707 unit (100,06% dari target). Namun bukan berarti kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau sudah terpenuhi sepenuhnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan peningkatan rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70%. Sehingga pada tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan terbangunnya 11 juta rumah layak huni. Menyukseskannya butuh kerja keras semua pihak, termasuk dari para pengembang perumahan yang tergabung dalam Pengembang Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat Pengembang Indonesia di Jakarta, Selasa (12/4/22).

Pengurus Pusat Pengembang Indonesia

yang hadir, antara lain Ketua Umum Barkah Hidayat, Sekretaris Jenderal Muhammad Hidayat, Bendahara Umum Robie Hidayat, Wakil Ketua Bidang Perumahan dan Permukiman Budi Setiawan, serta Wakil Ketua Bidang Humas dan Media Jimmy Montolalu. Hadir pula Ketua Pengembang Indonesia Jawa Barat Rayhan Nuradithia, Ketua Pengembang Indonesia DKI Jakarta Jefri G. Rantung, dan Ketua Pengembang Indonesia Kalimantan Selatan M. Noor Suryadi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Pengembang Indonesia dan juga asosiasi sejenis lainnya bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah untuk membangun perumahan layak huni. Di tahun 2022, Kementerian PUPR telah mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp 28 triliun yang akan disalurkan melalui berbagai program subsidi.

"Antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200.000 unit yang disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 24.426 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum KADIN Indonesia ini menerangkan, Pengurus Pusat Pengembang Indonesia juga menyampaikan aspirasi, untuk menyukseskan berbagai program tersebut, mereka masih menghadapi berbagai kendala. Khususnya terkait sinkronisasi Online Single Submission (OSS Risk Based Approach) di Kementerian Investasi dengan pengalihan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) di Kementerian ATR-BPN, yang masih belum terintegrasi hingga ke berbagai pemerintah kota/kabupaten.

"Hal tersebut, menurut Pengurus Pusat Pengembang Indonesia, telah mengakibatkan stagnasi yang menghambat proses akad kredit lebih dari 50 ribu unit bangunan rumah yang telah siap akad pada tahun 2021. Karenanya, sambil mempercepat proses sinkronisasi data, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Kementerian ATR-BPN perlu mempertimbangkan membuat peraturan relaksasi bagi para pengembang agar jangan sampai ada lagi proses akad kredit yang terhambat," pungkas Bamsoet. ❑

## Terima Dubes Iwan Bogananta

# Bamsoet Dukung 'Rendang Goes To Europe'

**Perjanjian FIR yang ditandatangani Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022), menimbulkan kontroversi. Kenapa?**

RENDANG lebih dari sekadar masakan, di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang sangat kental," ungkap Ketua MPR RI Bamsoet usai menerima Dubes Indonesia untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta, di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung langkah Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta, untuk menduniakan rendang. Menyukseskan program kerja Presiden Joko Widodo, 'Indonesia Spice Up The World', sebagai salah satu upaya perluasan pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia. Sekaligus menguatkan industri kuliner Indonesia dengan pengembangan restoran Indonesia di luar negeri, serta sebagai bagian dari gastrodiplomasi memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional.

"Mengusung semangat Rendang Goes To Europe, Dubes Iwan Bogananta menggandeng Bela Ltd., sebuah perusahaan terkemuka di Bulgaria, untuk mempromosikan dan mendistribusikan rendang ke kawasan lain di Eropa, khususnya ke negara-negara Balkan. Nilai investasinya mencapai US$ 3 juta. Penandatanganan kerja sama bisnis sudah dilakukan pada 28 November 2021. KBRI bahkan secara khusus mendatangkan pakar kuliner nusantara, William Wongso, untuk mempopulerkan kuliner nusantara dengan melakukan demo memasak rendang," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Iwan Bogananta bersama Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono, di Jakarta, Rabu (13/4/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nilai ekspor bumbu/rempah olahan dan komoditas/rempah segar Indonesia terus mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,95% selama lima tahun terakhir. Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar US$ 1,02 miliar. Target dari 'Indonesia Spice Up The World' hingga 2024 mendatang adalah peningkatan nilai ekspor bumbu dan rempah menjadi US$ 2 miliar. Selain juga menghadirkan 4.000 restoran Indonesia di luar negeri.

"Potensi pemasaran rendang di pasar internasional sangat besar. CNN Internasional pada tahun 2011 telah menobatkan rendang sebagai hidangan terlezat dalam daftar 50 hidangan di dunia. Rendang juga menempati posisi ke-11 sebagai makanan terenak di dunia pada 2021 versi CNN Travel. Bahkan, Cheff Internasional Gordon Ramsay dalam program acaranya 'Uncharted' bekerjasama dengan National Geographic secara khusus

datang ke Tanah Minangkabau pada tahun 2020, untuk belajar memasak rendang. Menunjukkan bahwa rendang sudah populer di dunia internasional," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya menduniakan rendang, pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan sedang mengupayakan agar rendang bisa dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO. Sebagaimana Keris dan juga Batik.

"Rendang lebih dari sekadar masakan. Di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang sangat kental. Misalnya, menghadirkan rendang pada acara adat perhelatan di Tanah Minang, merupakan bentuk penghormatan terhadap penghulu, niniak mamak, bahkan tamu yang datang ke rumah. Komposisi makanannya yang terdiri dari empat bahan pokok, seperti daging, kelapa, cabai, dan bumbu, melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Dalam memasaknya pun tidak sekadar membutuhkan keahlian, melainkan juga membutuhkan ketekunan, keuletan, dan juga kesabaran," pungkas Bamsoet. ❏

## UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

# Akhirnya Lahir Setelah Melalui Perjalanan Panjang

**Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengharapkan, kehadiran UU TPKS bisa efektif mencegahkan menuntaskan kasus kekerasan seksual di tanah air.**

Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diikuti pemahaman yang menyeluruh oleh aparatur penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya, agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di tanah air.

"Perjalanan panjang itu akhirnya berujung, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini (12 April 2022) menyetujui RUU TPKS untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, ke depan, efektivitas beleid yang diharapkan mampu melindungi setiap warga negara dari tindak kekerasan seksual sangat bergantung pada pemahaman para penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).

Gagasan pertama kali untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait tindak kekerasan seksual disuarakan oleh Komnas Perempuan. Mereka mengklaim, usulan itu ada pertama kali pada 2012. Namun, empat tahun kemudian, tepatnya pada Mei 2016, gagasan Komnas Perempuan itu baru dapat dibahas di DPR. Salah satu RUU yang diusulkan Partai NasDem itu akhirnya disepakati DPR RI untuk disahkan sebagai undang-undang pada 12/4/2022.

Menurut Lestari, tugas terpenting setelah UU TPKS disahkan adalah memberi pemahaman yang utuh kepada para penegak hukum dan masyarakat terkait pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Karena itu, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menyosialisasikan UU TPKS harus segera dilakukan agar efektivitas pencegahan dan perlindungan diharapkan bisa segera dirasakan secara luas.

Menurut Rerie, setelah disahkan menjadi undang-undang para pemangku kepentingan harus segera memanfaatkan UU TPKS dalam proses penegakan hukum hingga menciptakan efek jera bagi pelakunya.

Penuntasan kasus kekerasan seksual dengan efek jera bagi pelakunya, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, diharapkan mampu segera menekan potensi meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat.

Apalagi, tegas Rerie, selama ini tindak kekerasan seksual mayoritas menyasar perempuan dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang kita harapkan mereka dapat memikul tanggung jawab di masa depan.

Bila angka kasus kekerasan seksual terus turun, ujar Rerie, kita sebagai bangsa bisa berharap masa depan generasi penerus kita akan lebih baik dari hari ini. ❏

## Diskusi UU TPKS di Gorontalo

# Fadel Muhammad Minta Mahasiswa Kawal UU TPKS

Peran agama sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. "Jika iman seseorang kuat dan menjalankan agama dengan baik, maka dia tidak akan sampai melakukan kekerasan seksual," kata Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad dalam diskusi di IAIN Sultan Amai Gorontalo, baru-baru ini.

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyebutkan, mahasiswa perlu mengawal pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Para mahasiswa bisa mengawasi agar dalam implementasinya, UU TPKS benar-benar memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

"Para mahasiswa juga mempunyai concern terhadap UU TPKS. UU ini sudah disahkan sehingga implementasi UU ini perlu dikawal, sampai terbentuknya kelembagaan khusus untuk mengawal UU ini," kata Fadel Muhammad ketika berdiskusi dan dengar pendapat dengan para mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, di Gorontalo, Rabu petang (20/4/2022).

Diskusi yang membahas UU TPKS ini dihadiri Wakil Rektor III IAIN Sultan Amai Gorontalo Dr. H. Lukman Arsyad, M.Pd., dan Dekan Fakultas Ushuludin Dr. Andries Kango, M.Ag., serta Hana Hasanah Shahab, dan Hasan Shahab.

Fadel Muhammad mengungkapkan, kasus-kasus kekerasan seksual banyak terjadi pada wanita dan menunjukkan tren yang meningkat. Bahkan, banyak kasus kekerasan seksual yang terekspose di media sosial kemudian menjadi viral. "Kita ingin melihat bagaimana perspektif mahasiswa melihat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Fadel Muhammad mendapat pertanyaan mengenai perubahan nama UU yang sebelumnya RUU PKS (Pencegahan Kekerasan Seksual) menjadi RUU TPKS, dan bagaimana dinamika dalam pembahasan RUU itu, serta mengapa pengesahan RUU itu cukup lama setelah bertahun-tahun dibahas di DPR.

Menjawab pertanyaan mahasiswa, Fadel Muhammad menjelaskan, RUU tersebut memang cukup lama dibahas di DPR. Sebenarnya RUU ini sudah siap, namun terkendala adanya pergantian anggota dewan. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok yang ingin pikiran-pikiran tentang LGBT masuk dalam RUU ini. Organisasi masyarakat dan ulama juga ikut bersuara. RUU ini sempat ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas). "Perdebatan ini membuat pembahasan RUU menjadi berlarut-larut," ujarnya.

RUU ini kembali dibahas, lanjut Fadel, setelah berganti nama dari RUU PKS menjadi RUU TPKS. Beberapa pasal dalam RUU TPKS yang menjadi perdebatan diperbaiki. Materi yang selalu menjadi perdebatan adalah definisi dan kriteria kekerasan seksual. "Terakhir, perdebatan dan perbedaan pandangan dalam RUU ini bisa diatasi sehingga RUU ini kemudian disahkan menjadi UU TPKS," papar senator dari Gorontalo ini.

Fadel menambahkan, intinya UU TPKS adalah untuk memberi perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual juga mendapatkan pemenuhan tuntutan material akibat kekerasan seksual yang terjadi. "Jadi supaya ada perlindungan pada korban kekerasan, dan korban kekerasan mendapatkan pemenuhan material," tuturnya.

Fadel menyebutkan, korban kekerasan seksual juga mendapatkan pendampingan. Karena itu perlu dibentuk lembaga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.

Di luar itu, menurut Fadel Muhammad, peran agama sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. "Keimanan menjadi sangat penting. Jika iman seseorang kuat dan menjalankan agama dengan baik, maka dia tidak akan sampai melakukan kekerasan seksual. Dalam hal ini perguruan tinggi Islam seperti IAIN sangat berperan penting untuk ikut mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan seksual," pungkasnya. ❑

Temu Masyarakat Kota Bogor

# Bulan Suci Ramadan Momen Tingkatkan Introspeksi Diri

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, menyatakan, dalam konteks kenegaraan, bulan suci sangat tepat digunakan untuk pererat kesatuan bangsa.

RUMAH kediaman Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA di wilayah Bukit Sentul, Babakan Madang, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore (16/4/2022) itu terlihat ramai oleh para kader Partai Demokrat dan masyarakat sekitar.

Hari itu, di sana, memang diselenggarakan acata Temu Masyarakat Kota Bogor yang dirangkai dengan pemberian bingkisan Ramadan kepada warga dan buka puasa bersama. Walaupun sempat terjadi hujan yang merata di Bogor tak menyurutkan langkah warga untuk datang ke lokasi acara.

Hadir dalam acara itu anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat, Anita Primasari Mongan, dan Haji Mulyadi, serta para kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa Bulan Suci Ramadan adalah kesempatan terbaik bagi seluruh umat Islam dan warga negara Indonesia lainnya, untuk saling mengingatkan dan introspeksi diri apa yang sudah dilakukan satu tahun lalu.

"Jika yang kita lakukan kebaikan-kebaikan maka lepas Ramadan tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Namun, jika banyak kejelekan yang kita lakukan maka mohonlah ampunan Allah SWT dan lakukan perbaikan diri," katanya.

Selain itu, lanjut Syarief Hasan, Ramadan juga momen yang sangat tepat untuk meningkatkan silaturahim. "Seperti yang sedang kita lakukan ini menyambung dan mempererat tali silaturahim. Ini penting, sebab akan terbangun kebersamaan yang semakin kuat dan itu modal kita untuk sama-sama melangkah ke depan," tambahnya.

Di lingkup luas atau negara, munculnya kebersamaan yang kuat karena terjaganya silaturahim akan meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat. Efeknya sangat luar biasa, pembangunan nasional akan menjadi sangat mudah yang pada ujungnya seluruh rakyat Indonesia menikmati kesejahteraan bersama.

Hal tersebut sangat ditekankan Syarief Hasan, mengingat di bulan suci ini terjadi peristiwa besar, yakni aksi demonstrasi mahasiswa, tepatnya pada tanggal 11 April 2022. Banyak masyarakat khawatir aksi di bulan suci itu menganggu kedamaian dan kekhusyukan ibadah.

"Bulan suci ini harus dihormati, namun aksi demo adalah implementasi kebebasan bersuara dan berpendapat yang merupakan hak rakyat dan dilindungi konstitusi. Saya rasa harus ada jalan tengah agar aksi yang dilakukan tidak mencederai nuansa bulan suci dengan tidak melakukan kekerasan. Sebaliknya, kalau aspirasi yang disampaikan mahasiswa itu bagus untuk kepentingan bangsa, pemerintah harus meresponnya," ucap Syarief Hasan.

Dalam kesempatan tersebut, Syarief Hasan juga melakukan doa bersama untuk keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesehatan rakyat Indonesia.

Di sesi akhir, secara simbolik Syarief Hasan menyerahkan bingkisan Ramadan kepada masyarakat sekitar yang dikoordinir oleh kader Partai Demokrat Kota Bogor. ❑

**DER**

Moratorium Perizinan PAUDQU dan TTQ

# HNW: Kebijakan yang Tidak Tepat, Diberlakukan di Saat Ramadan

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, lembaga swadaya seperti PAUDQU dan RTQ banyak berkontribusi membuat anak-anak mempunyai alternatif kegiatan yang positif bersama Alquran. Tapi kenapa harus ada moratorium perizinannya?

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., memberi saran kepada Kementerian Agama untuk mengoreksi kebijakan memberhentikan sementara pengajuan izin baru Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQU) dan Rumah Tahfidz Alquran (RTQ). Apalagi moratorium itu diberlakukan saat Ramadan, bulan Alquran, di mana kegiatan terkait dengan Alquran meningkat. Termasuk di kalangan anak-anak dengan PAUDQU (Pendidikan Anak Usia Dini al-Quran) maupun RTQ (Rumah Tahfidz al-Qur'an).

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, juga menyayangkan kebijakan moratorium itu justru diberlakukan saat Covid-19 makin landai. Pemerintah telah membuka masjid, mengizinkan salat Jumat dan salat Tarawih, setelah 2 tahun kegiatan dibatasi, termasuk untuk anak-anak. Wajarnya, dalam kondisi seperti itu, Kemenag seharusnya mendukung PAUDQU dan RTQ yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan tidak dibiayai oleh negara. Tapi malah sudah membantu negara melaksanakan kewajibannya mencerdaskan rakyat Indonesia.

"Di bulan Ramadan, bulannya Alqur'an, saat ini covid melandai. Umat Islam, termasuk anak-anak, mulai aktif lagi memakmurkan masjid. Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan kado indah, baik berupa dukungan perlindungan berupa kebijakan politik, hibah, maupun bentuk dukungan lainnya bagi kegiatan terkait Alquran dan anak-anak sebagaimana dilakukan oleh PAUDQU serta RTQ dan para pengelolanya," ungkap HNW.

Apalagi, lanjut HNW, selama ini mereka (PAUDQU dan RTQ) beraktivitas dan berjuang secara swadaya, tidak membebani APBN, dan tidak menghadirkan masalah apa pun bagi bangsa dan Negara. Tapi, mengapa justru kegiatan mereka dibatasi, apalagi

dengan menghentikan proses perizinan mereka, sekalipun untuk sementara.

"Kemenag hendaknya transparan dan jujur mengenai alasan sebenarnya mengapa moratorium diberlakukan, dan apa konsekuensi yang dihadirkan oleh Kemenag sesudah moratorium dicabut bagi PAUDQU serta RTQ, mengingat yang mendaftar dan sudah lulus seleksi/pendaftaran," ujar HNW usai memberi sambutan pada acara Semarak Ramadan yang diselenggarakan KOMPAQS (Komunitas Pengajar alQuran) di Masjid alBarokah, Jakarta Selatan, Sabtu(16/4/2022).

Dalam kesempatan itu, HNW menilai bahwa pernyataan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag (14/4/2022) yang menyebutkan, kebijakan moratorium dilakukan setelah review terhadap regulasi dengan Bagian Organisasi dan Hukum. "Kebijakan itu diberlakukan dalam timing yang tidak tepat dan minim sosialisasi," tandas HNW.

Dia menghawatirkan, kebijakan itu akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi, kebijakan itu berupa pengetatan aturan yang membatasi kegiatan sukarela dan swadaya masyarakat untuk menghadirkan PAUDQU maupun RTQ. "Padahal mereka memberikan kontribusi berupa alternatif kegiatan yang positif, sarana belajar dan komunitas belajar yang kondusif bagi anak-anak," ujar HNW.

Selain itu, menurut HNW, rencana Kemenag membuat regulasi yang lebih komprehensif akan berpotensi menambah panjang alur proses perizinan. Hal itu tidak sesuai dengan semangat Presiden Jokowi yang ingin memangkas berbagai perizinan dan hambatan hukum lainnya dalam hal kegiatan bernegara, apalagi yang swasta.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menegaskan, sejatinya perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap para pembelajar dan penghafal Alquran sudah semakin meningkat. Misalnya, dengan semakin populernya beasiswa bagi para penghafal Alquran. Juga diterimanya mereka melanjutkan kuliah di berbagai jurusan di PTN.

Karena itu, semestinya untuk PAUDQU dan RTQ makin dibantu dan dipermudah, karena mereka bisa berperan besar menghadirkan pondasi dalam membangun kecintaan dan pembiasaan anak-anak terhadap nilai-nilai kebaikan, kehidupan yang berkualitas, sehat, moderat, inklusif, dan berkah yang semuanya diajarkan dalam Alquran. Dan, dalam waktu bersamaan secara konstitusional justru menjalankan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yakni pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia.

Menurut HNW, lembaga swadaya seperti PAUDQU dan RTQ ini banyak berkontribusi membuat anak-anak mempunyai alternatif kegiatan yang positif bersama Alquran. Dan, secara nyata menjalankan amanat konstitusi, bahkan hasil didikannya yakni para penghafal Alquran juga semakin banyak berprestasi dan diapresiasi. Maka, sewajarnya mereka tidak dipersulit dengan dalih moratorium perizinan. ❑

Perang Rusia dan Ukraina

# Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Atasi Ancaman 'Krisis di Atas Krisis'

Selain memanfaatkan momentum presidensi G-20, dalam menghadapi berbagai dampak 'Krisis di Atas Krisis,' pemerintah juga harus menggalang soliditas dari berbagai elemen, khususnya para elit politik, harus bahu membahu membangun solidaritas untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, International Monetary Fund (IMF) pada 16 April 2022 telah mengeluarkan peringatan serius tentang dampak lanjutan pandemi Covid-19, ditambah dampak perang Rusia-Ukraina. IMF menyebutnya, 'Krisis di Atas Krisis'. Karenanya, dalam menjalankan Presidensi G-20 serta menyambut rangkaian KTT G-20 yang puncaknya akan diselenggarakan di Bali pada akhir 2022 ini, pemerintah Indonesia harus bisa menyampaikan proposal yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kerusakan yang terjadi akibat 'Krisis di Atas Krisis' tersebut.

"Perang Rusia dan Ukraina telah berimplikasi pada harga komoditas, perdagangan, dan pasar finansial global. Berbagai harga komoditi terkait konsumsi rumah tangga dan energi yang semakin tidak terkendali, menyebabkan inflasi semakin menggila. Bahkan, setelah lebih dari 40 tahun, Amerika Serikat pada Maret 2022 lalu turut merasakan inflasi tertinggi sejak 1982. Terlihat dari Data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang melaporkan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) naik 7,9% secara year-on-year (yoy). Hal ini bisa saja mempengaruhi mitra bisnis Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, seperti Cina, Uni Eropa, Kanada, Jepang, hingga Korea. Apabila sampai terjadi supply-demand yang tidak normal maka dunia bisa jadi akan menuju kelesuan ekonomi," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (18/4/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain memanfaatkan momentum presidensi G-20, dalam menghadapi berbagai dampak 'Krisis di Atas Krisis' tersebut, pemerintah Indonesia juga harus menggalang soliditas dari berbagai elemen di dalam negeri. Khususnya dari para elit politik, harus bahu membahu membangun solidaritas untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Berbagai kegaduhan bangsa yang tidak produktif, terlebih cenderung memecah belah, harus segera dihentikan. Seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi, baik menghadapi pandemi Covid-19 yang belum berakhir maupun menghadapi dampak perang Rusia - Ukraina yang belum terlihat kapan akan berakhirnya.

"Sebagai early warning, Bank Dunia (World Bank) pada 5 April 2022 telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Rata-rata terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai tekanan, salah satunya dari dampak perang Rusia - Ukraina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya, diperkirakan sebesar 5,1% pada tahun 2022, lebih rendah 0,1 poin dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2021. Bahkan pada skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 bisa turun menjadi 4,6%," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam menghadapi 'Krisis di Atas Krisis'. Termasuk untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Sehingga inflasi bisa terkendali, stabilitas moneter dan sistem keuangan tetap terjaga, serta kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan, bisa tetap meningkat. Lebih penting lagi juga mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital, diantaranya melalui BWM Digital, P2P Lending dan Securities Crowdfunding," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara

# Bamsoet Dorong OJK Menjadi Lembaga yang Kuat, Berwibawa dan Fleksibel

Dewan Komisioner OJK harus mampu mengoptimalkan resources OJK untuk memperluas dan memperdalam literasi ke berbagai lapisan masyarakat.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih periode 2022-2027 yang juga Ketua Komite Etik merangkap anggota, Mirza Adityaswara, menjadikan OJK sebagai lembaga yang kuat, berwibawa dan fleksibel. Selain, OJK harus mampu merangkul dan membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholders, seperti MPR, DPR, DPD, BPK, aparatur penegak hukum, asosiasi sektor keuangan, hingga masyarakat luas pada umumnya.

"Pengambilan keputusan juga harus dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga setiap anggota Dewan Komisioner OJK memiliki semangat team work dan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK yang mengamanatkan Dewan Komisioner harus terlibat dalam pembuatan kebijakan operasional pengawasan, yang pengawasannya dilakukan oleh kepala eksekutif," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua OJK terpilih periode 2022-2027 yang juga Ketua Komite Etik merangkap anggota, Mirza Adityaswara, baru-baru ini di Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, maraknya berbagai kasus pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga karut marut permasalahan di sektor asuransi, perdagangan saham gorengan, dan tekfin illegal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh OJK periode 2022-2027. Masyarakat membutuhkan OJK yang kuat dan berwibawa, yang bisa menjaga ekosistem industri keuangan Indonesia tetap sehat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

"Dewan Komisioner OJK harus mampu mengoptimalkan resources OJK untuk memperluas dan memperdalam literasi ke berbagai lapisan masyarakat. Sebagai Wakil ketua OJK, Mirza Adityaswara, perlu memaksimalkan peranan IKD (Inovasi Keuangan Digital) untuk menumbuh-kembangkan ekosistim berbagai industri digital di sektor perekonomian, keuangan dan perdagangan. Teristimewa memanfaatkan kekuatan aset Perbankan lebih kurang Rp 10.2000 triliun, kapitalisasi pasar saham lebih kurang Rp 8.000 triliun, dan aset IKNB 2.890 triliun per akhir tahun 2021 untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan perbaikan kehidupan masyarakat", kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain dalam sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, usaha pembiayaan hingga pinjaman online, OJK juga harus mulai membuat kajian tentang keberadaan kripto yang perkembangan transaksinya semakin pesat. Tidak menutup kemungkinan, ke depannya pengawasan dan pengaturan kripto bisa menjadi tanggung jawab OJK. Sehingga perkembangan kripto bisa turut dibahas dan dipantau dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan.

"Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) dalam rangkaian Presidensi G-20 Indonesia pada 17-18 Februari 202 lalu di Jakarta, negara G-20 bersepakat untuk mengatur dan mengawasi bersama-sama perkembangan aset kripto guna memperkuat pengelolaan risiko atas kejahatan teknologi dan digitalisasi. Pada Juli 2022 nanti, melalui Financial Stability Board (FSB), negara-negara anggota G-20 akan kembali membahas teknis bagaimana pengaturan dan pengawasan kripto yang bisa dilakukan oleh otoritas negara," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Pengurus IPNU dan IPPNU

# Bamsoet Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

Sangat penting bagi NU untuk segera masuk ke dunia digital, antara lain dengan memiliki marketplace dan platform edutech sendiri.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mendukung rencana penyelenggaraan Nusantara Millenial Summit 3.0 yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Kongres XIX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pada 23-26 Juni 2022 di Ponpes Qamarul Huda, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mengusung tema 'Akselerasi Pelajar untuk Indonesia Maju,' penyelenggaraannya kongres dan Nusantara Millenial Summit 3.0 juga bertujuan menyukseskan kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G-20.

"Sebagai organisasi massa keagamaan yang memiliki jumlah anggota sangat besar, diperkirakan mencapai 108 juta jiwa, Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi kekuatan sosial, ekonomi, dan juga kedaulatan bagi Indonesia. Karenanya sangat penting bagi NU untuk segera masuk ke dunia digital, antara lain dengan memiliki marketplace dan platform edutech sendiri. Mewujudkannya, perlu kerja keras dan kontribusi dari para pelajar, santri, dan mahasiswa NU yang tergabung dalam IPNU dan IPPNU," ujar Bamsoet usai menerima pengurus IPNU dan IPPNU, di Jakarta, Senin (11/4/22).

Pengurus IPNU yang hadir, antara lain Ketua Umum Aswandi Jailani, Sekretaris Umum Mufarrihul Hazin, dan Wakil Sekjen Ahmad Syamwil. Turut hadir pengurus IPPNU, antara lain Ketua Umum Nurul Hidayatul Ummah, Sekretaris Umum Nafisatul Husniah, dan Bendahara Umum Whasfi Velasufah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, riset Goldman Sach memprediksi, Indonesia akan berada dalam sepuluh besar negara dengan ekonomi termaju di tahun 2050 bersama Cina, India, dan masih di atas Jepang ataupun Korea Selatan. Sementara McKinsey Global Institute pada 2012 memprediksi tahun 2030 Indonesia akan menempati urutan ekonomi ketujuh terbesar di dunia.

"Google, Temasek, dan Bain & Company memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan tembus US$ 146 miliar pada tahun 2025. Jangan sampai prediksi tersebut hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus benar-benar terwujud," pinta Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, IPNU dan IPPNU juga harus bisa berkontribusi memajukan ekonomi syariah Indonesia, yang potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2020/21 mencapai Rp 2.937 triliun.

"Besarnya potensi ekonomi syariah tidak lepas dari jumlah pemeluk Islam di Indonesia yang mencapai 87,2% dari populasi. Terlebih Indonesia juga telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia untuk pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset US$ 99 miliar," pungkas Bamsoet. ❑

## Ahmad Basarah:

# Ideologi Kekerasan Atas Nama Agama Sudah Masuk Indonesia

Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS), Ade Armando, dikeroyok usai terlibat adu mulut dengan beberapa orang di tengah aksi demo, Senin (11/4/2022). Akibat insiden itu, Ade Armando terluka di bagian kepala sehingga harus dirawat di rumah sakit.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku prihatin ideologi kekerasan atas nama agama ternyata sudah menyusup di Indonesia. Itu terlihat dari sejumlah massa yang mengeroyok Ade Armando, yang meneriakkan kalimat tauhid 'laa ilaaha illallah' dan Allahu Akbar saat mengeroyok dosen Universitas Indonesia itu.

''Jika dibiarkan, ideologi ini sangat berbahaya. Penganut ideologi ini selalu menjadikan sentimen agama sebagai tameng perjuangan politik mereka. Mereka membangun narasi perlawanan terhadap lawan-lawan politik dengan mengeksploitasi kalimat tauhid atau teriakan Allahu Akbar untuk membangkitkan solidaritas perkawanan dan perlawanan mereka,'' jelas Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa (12/3/22).

Berita Ade Armando babak belur dihajar sekelompok orang di depan Gedung DPR RI marak di media sosial sejak Senin (11/4/22) sore hingga menjelang tengah malam. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) itu dikeroyok usai terlibat adu mulut dengan beberapa orang di sana, usai korban tengah melakukan syuting. Akibat insiden itu, Ade Armando terluka di bagian kepala sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Menurut Ahmad Basarah, semua elemen masyarakat dan lembaga negara yang menghendaki tereleminasinya ideologi kekerasan dan radikalisme di Indonesia tidak boleh tinggal diam menghadapi kenyataan ini. Tindakan cepat harus dilakukan sebab bukan hanya Ade Armando, siapa saja yang dianggap berlawanan dengan pikiran, misi, dan tujuan mereka bisa jadi korban vandalisme mereka.

''Untuk itu polisi harus tegas dan cermat dalam mengusut kasus ini. Siapa dalang di balik kasus yang mencemarkan demokrasi ini harus segera terbongkar. Dari situ, aparatur dapat bekerja lebih mudah mencari akar masalah,'' jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Dosen Universitas Islam Malang ini, ada kelompok tertentu dalam sejarah Islam yang kerap menggunakan ideologi kekerasan atas nama agama. Biasanya mereka cenderung menganggap semua lawan politik bersalah dan harus dibunuh atas nama Allah. Untuk itu, kalimat suci 'laa ilaaha illallaah' dan 'Allahu Akbar' bisa dengan mudah mereka selewengkan demi mencapai kepentingan sesaat mereka.

''Jika mau jujur, mereka yang terlibat adu argumentasi dengan Ade Armando adalah tipe kelompok Islam berpikiran pendek. Mereka tak mau diajak berdiskusi ilmiah dan cenderung ingin menang sendiri. Diajak diskusi baik-baik mereka malah meneriakkan kata munafik dan pengkhianat, lalu menyerang fisik,'' jelas Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama menghadapi predator demokrasi yang membawa ideologi kekerasan atas nama agama itu. Atas nama agama, mereka bisa menyerang siapa saja dengan satu keyakinan bahwa mereka bakal masuk surga yang mereka yakini sebagai ganjarannya.

''Saya tidak yakin kasus Ade Armando ini terjadi secara kebetulan. Para pelakunya sangat ideologis, kompak menyerang saat di lapangan. Jika benar kasus ini bukan kebetulan, polisi harus mengungkap jaringan kekerasan yang menjadi musuh demokrasi ini, sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu,'' tegas Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Ahmad Basarah menambahkan, masyarakat beradab termasuk para mahasiswa yang berdemonstrasi seharusnya mengecam tindakan barbar yang hampir membunuh Ade Armando itu. Para mahasiswa mestinya menunjukkan sikap solidaritas kemanusiaannya kepada Ade Armando, sebab tujuan mulia mereka melakukan demonstrasi telah diselewengkan dan dirusak oleh kelompok anti demokrasi.

''Citra mahasiswa jadi rusak. Saya tidak yakin ada mahasiswa yang mau mengeroyok dosen mereka sendiri di tengah jalan. Kalau mereka yakin ini bukan tindakan mahasiswa, seharusnya para mahasiwa juga protes dan menuntut agar kasus ini diusut tuntas agar jelas apakah demonstrasi mereka ditunggangi pihak tertentu atau tidak,'' jelas Ahmad Basarah. ❑

Serangan Polisi Israel ke Masjid Al-Aqsha

# Ahmad Basarah Dorong Indonesia Pimpin Pembentukan 'Justice Forum for Palestine'

Indonesia bersama parlemen negara-negara Muslim dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel, karena Indonesia memiliki landasan filosofis-konstitusional yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengecam keras kekerasan polisi Palestina atas jamaah salat Subuh di Masjid Al-Aqsha dan mendorong Indonesia pimpin Parlemen Dunia membentuk 'Justice Forum for Palestine' pasca serangan membabi-buta polisi Israel itu. Dia berpendapat politik bebas aktif Indonesia seharusnya mendorong negara ini mengambil inisiatif dalam pembentukan forum itu di kancah internasional.

''Kita rasanya sudah bosan meminta Israel menghentikan kekerasan yang sering mereka lakukan di bulan Ramadan dan PBB tidak pernah mengambil tindakan berarti apapun. Mereka sadar PBB akan melempem, seperti macan ompong. Karena itu, langkah konkret harus segera diambil. Parlemen Dunia bisa membuat keputusan politik tingkat dunia dan Indonesia menjadi pemrakarsanya,'' tegas Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (18/4/2022).

Dalam dua hari terakhir media internasional ramai memberitakan polisi Israel kembali menebar teror dengan mengusir dan memukuli warga Palestina yang hendak melaksanakan salat Subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsha, Jumat (15/4/22). Sekitar 158 warga Palestina luka-luka serius akibat dipukuli dan dikeroyok polisi Israel. Kegaduhan muncul antara lain akibat provokasi iklan online yang menyerukan kelompok ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa selama liburan Paskah dan mengorbankan hewan di halaman masjid. Provokasi ini membuat umat Kristen dan Muslim Palestina bersatu dan bertekad siap mati membela Masjid Al-Aqsa.

Menurut Ahmad Basarah, melawan keganasan dan kejahatan kemanusiaan yang bertubi-tubi dilakukan Israel tidak lagi cukup dengan imbauan di media cetak atau media sosial. Masyarakat dunia belum lagi lupa dengan tragedi hampir setahun lalu, ketika di pertengahan Mei 2021 Israel menewaskan 83 warga sipil Palestina, termasuk 17 anak-anak, dalam ketegangan kedua bangsa, kini mereka berulah lagi menumpahkan darah di masjid suci Al-Aqsha.

''Saat itu kita masih ingat, biarpun sudah ada 83 orang tewas, AS sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB tetap memblokir rapat darurat DK PBB yang punya agenda tunggal membahas perseteruan Israel-Palestina. Kejadian serupa akan terulang setiap Israel melakukan kejahatan kemanusiaan, PBB akan melempem dan tokoh-tokoh dunia hanya bisa mengecam lewat media sosial,'' tandas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, sebagai manifestasi Dasa Sila Bandung, Indonesia tak pernah berhenti mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Ini adalah amanat Proklamator Republik Indonesia Bung Karno yang sejak Konferensi Asia Afrika digelar sudah bertekad hendak memperjuangkan negara-negara yang belum merdeka, termasuk Palestina, serta menolak Israel ikut dilibatkan dalam persiapan konferensi tersebut.

"Spirit anti penjajahan Bung Karno ini tidak boleh padam di setiap dada kita. Indonesia dulu pernah menolak kehadiran Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta sebagai bentuk solidaritas kita pada Palestina. Untuk melanjutkan spirit itu, rasanya tidak berlebihan jika Indonesia sekarang memprakarsai pembentukan forum dunia untuk keadilan bagi Palestina,'' tandas Ahmad Basarah.

Menurut Dosen Universitas Islam Malang ini, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) punya potensi besar untuk memperjuangan keadilan buat Palestina. Apalagi jika OKI menggandeng himpunan parlemen-parlemen negara anggota OKI yang bernaung di bawah organisasi Parliamentary Union of the OIC Member States atau PUIC di negara masing-masing, ditambah aliansi organisasi non-pemerintahan bernama Liga Muslim Dunia.

''Setahu saya, PUIC ini organisasi internasional yang cukup lama berdiri, sejak 1999. Anggotanya 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan

internasional. Kalau potensi ini dimaksimalkan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mau berinisiatif menggalang kekuatan politik ini, saya yakin martabat Indonesia semakin tinggi. Apalagi kita sekarang sedang memimpin G-20,'' tandas Ahmad Basarah.

Sebagai langkah awal, Ahmad Basarah mengusulkan agar pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI segera melakukan ''syura'' dengan mengumpulkan seluruh pimpinan parlemen dunia, khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, di Jakarta. Mereka diminta duduk bersama membahas semua persoalan Palestina-Israel lalu membuat keputusan politik tingkat tinggi yang akan dibawa ke forum PBB.

''Harus ada yang memulai. Jika tidak, kemerdekaan Palestina selamanya akan jadi wacana saja. Saya optimistis parlemen Indonesia bersama parlemen negara-negara Muslim lainnya dapat menjadi lokomotif perdamaian Palestina-Israel karena Indonesia memiliki landasan filosofis-konstitusional sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menginginkan semua penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan,'' tegas Ahmad Basarah. ❑

## Ngobrol Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

# Bamsoet Ajak Bangkitkan Sektor Pariwisata Indonesia

Menyongsong hadirnya status endemi, banyak wisatawan ingin mencari sarana hiburan, setelah dua tahun lebih aktivitas sosialnya terganggu oleh pandemi. "Momentum ini harus dapat dioptimalkan oleh industri pariwisata," kata Wakil Ketua MPR Bambang Soesatyo.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo optimistis, Indonesia mampu bergerak dari pandemi Covid-19 ke endemi Covid-19. Mengingat angka positivity rate nasional terus menunjukkan tren penurunan. Hingga 24 April lalu, berada pada kisaran 0,6%. Rasio angka kesembuhan pasien Covid-19 juga mencapai lebih dari 97%. Tercatat hingga 20 April, tingkat keterisian tempat perawatan di rumah sakit dan tempat tidur isolasi, juga mengalami penurunan hingga 3,12%.

Kerja keras dan gotong royong masih diperlukan, karena kewenangan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), dengan merujuk setidaknya pada lima indikator. Antara lain, angka laju penularan kurang dari 1%, positivity rate kurang dari 5%, tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5%, rasio angka kematian kurang dari 3%, dan PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Kelima indikator tersebut juga harus terjadi dalam rentang waktu enam bulan.

"Momentum perubahan status dari pandemi menjadi endemi, nantinya harus dapat dioptimalkan untuk menghidupkan dan merekonstruksi kembali aktivitas sosial masyarakat, serta menjadi stimulan membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk pada sektor pariwisata. Terlebih Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah peringatan World Tourism Day 2022, yang akan diselenggarakan di Bali pada 27 September mendatang," ungkap Bamsoet saat memberikan Keynote Speech dalam acara Buka Puasa Bersama dan Pra-Inagurasi "NGOPEK KUY" (Ngobrol Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yuk), secara virtual di Jakarta, Senin (25/4/22).

Terpilihnya Indonesia dalam forum Sidang Majelis Umum Organisasi Pariwisata Dunia PBB (United Nations World Tourism Organization/UNWTO), lanjut Bamsoet, mengisyaratkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia dalam industri pariwisata global.

Turut hadir, antara lain: Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Indonesia

Tourism Watch (DEN ITW) Ichwan Abdillah, Sekjen DEN ITW Adyta Raja Sibarani, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, dan Fungsionaris KADIN Indonesia Bidang Tenaga Kerja Nofel Saleh Hilabi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pariwisata adalah salah satu sektor perekonomian terbesar di dunia. Tak hanya melibatkan peredaran uang yang sangat besar, melainkan juga banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya. Tercatat pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, jumlah wisatawan internasional mencapai 1,5 miliar orang. Sebanyak 364 juta atau sekitar 25% di antaranya berkunjung ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Selanjutnya, Bamsoet menjelaskan, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 mencapai 4,75. Merosot menjadi 4,05% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan sedikit meningkat kembali menjadi 4,2% pada tahun 2021.

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata tahun 2021 hanya mencapai US$ 0,36 miliar. Jauh lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai US$ 3,3 miliar. Di tingkat global, UNWTO mencatat bahwa kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian dunia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai US$ 1,9 triliun. Jauh lebih rendah dibandingkan pada masa sebelum pandemi, yang mencapai US$ 3,5 triliun," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini berharap, kehadiran Indonesia Tourism Watch (ITW) harus dapat menjadi bagian dari solusi membangkitkan kembali pariwisata Indonesia. Untuk itu, perlu menjadi kesadaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan bahwa faktor kesehatan masyarakat adalah kunci penting, sebagai daya dorong pemulihan sektor lainnya, termasuk sektor perekonomian.

"Potensi dan kontribusi wisatawan domestik juga harus dioptimalkan. Disadari atau tidak, selama ini potensi wisatawan domestik masih terkesan dipandang sebelah mata, dan belum digarap dengan serius dan maksimal. Padahal dengan jumlah penduduk 273 juta jiwa, wisatawan domestik adalah potensi pasar yang sangat besar. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana kedatangan wisatawan mancanegara belum sepenuhnya pulih, seperti sebelum masa pandemi," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pandemi juga mengajarkan pentingnya melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi digital, serta melakukan berbagai langkah inovasi. Mengingat masih banyak destinasi wisata yang belum dikelola secara optimal.

Menyongsong hadirnya status endemi, banyak wisatawan yang ingin berwisata sebagai sarana hiburan, setelah dua tahun lebih aktivitas sosialnya terganggu oleh pandemi. "Momentum ini harus dapat dioptimalkan oleh industri pariwisata dengan menyediakan sebanyak mungkin alternatif destinasi wisata, termasuk penyediaan paket wisata terintegrasi yang melibatkan lebih banyak sektor, dan tentunya dapat menarik lebih banyak wisatawan," pungkas Bamsoet. ❑

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**
Ketua MPR RI

## *Pertahanan Siber dan Mitigasi*
# *Risiko Sebagai Konsekuensi Logis Digitalisasi*

KOMITMEN dan kesungguhan pemerintah mewujudkan pertahanan siber yang tangguh dan efektif akan dipahami sebagai kehendak serta kesiapan negara-bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman terkini yang ditandai dengan digitalisasi.

Era digitalisasi pada semua aspek kehidupan nyata juga telah menghadirkan beragam ancaman, sehingga kesadaran untuk selalu memprioritaskan keamanan (security awereness) dan mitigasi risiko nyaris akan menjadi kerja tak berkesudahan, seturut perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu, pertahanan serta keamanan siber yang tangguh pun akan mencerminkan kredibilitas negara-bangsa pada aspek tata kelola yang relevan untuk melindungi kepentingan nasional di berbagai sektor, maupun kepentingan setiap individu warga negara. Berangkat dari pemahaman itu, pemerintah didorong untuk memberi perhatian lebih dan bersungguh-sungguh pada aspek pertahanan siber.

Sebagai bagian dari ketahanan nasional, pertahanan siber pada era terkini dan di masa depan harus disikapi dengan sangat serius. Pengalaman buruk terdahulu dan beberapa kasus atau persoalan terbaru patut dijadikan pembelajaran, serta mendorong semua pemangku kepentingan untuk mau memahami ancaman atau risiko serangan siber di sepanjang era digitalisasi.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021, ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber (cyber attack) di berbagai wilayah Indonesia. Dan, dari jumlah serangan itu, tercatat ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo. Tak hanya serangan siber melalui malware, BSSN juga mendeteksi anomali sinyal elektromagnetik yang berasal dari sekitar lokasi Istana Negara.

Belum lama ini, Kementerian Dalam Negeri mengakui bahwa hampir 200 juta data kependudukan terancam hilang. Potensi hilangnya ratusan juta data kependudukan itu disebabkan perangkat keras (hardwarw) milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sudah usang, karena masa pakainya rata-rata lebih dari 10 tahun.

Masa garansi perangkat keras itu telah habis, dan suku cadangnya bahkan tidak diproduksi lagi. Ditjen Dukcapil belum bisa melakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Kasus seperti ini mestinya tidak dibiarkan terjadi, karena dapat mengganggu kepentingan nasional.

Pada Desember 2021, publik dikejutkan oleh informasi tentang peretasan data Bank Indonesia cabang Bengkulu. Bersyukur bahwa data yang diretas oleh kelompok Ransomware Conti itu tidak menyangkut data kritikal. Namun, publik mencatat bahwa kasus peretasan data Bank Indonesia oleh hacker menambah panjang daftar pembobolan data pada institusi negara.

Beberapa contoh kasus ini layak dikedepankan untuk memberi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan pada aspek pertahanan siber nasional, sekaligus menjadi peringatan bagi semua pemangku kepentingan akan urgensi keamanan siber. Walau pun ekses dari perangkat keras yang usang, serangan hingga rangkaian peretasan itu belum signifikan, persoalan ancaman yang berkelanjutan ini hendaknya tidak disederhanakan.

Data tentang kontinuitas serangan siber dua tahun terakhir patut digarisbawahi. Tahun 2020, terjadi 495 juta serangan siber. Pada 2021, sebagaimana data yang diungkap BSSN, terjadi lonjakan karena ada 1,6 miliar serangan siber ke dalam negeri. Global Risk Report 2021 versi Word Economic Forum juga mengingatkan bahwa faktor serangan siber masih menjadi risiko tertinggi.

Maka, peduli akan pertahanan dan keamanan siber yang tangguh harus terus dibangun karena serangan siber biasanya juga membidik institusi besar dan sangat strategis, seperti Istana Negara, Presiden serta bank sentral. Para ahli pun sudah mengingatkan bahwa serangan siber yang sulit dibendung akan terus menciptakan ancaman, karena pelaku serangan pun semakin inovatif. Karenanya, pertahanan dan keamanan siber yang efektif menjadi kebutuhan mutlak guna melindungi negara dan rakyat.

Jika dihadapkan pada potensi ancamannya, porsi kepedulian pemerintah pada aspek pertahanan siber nasional dewasa ini memang perlu ditingkatkan. Security awereness pada semua kementerian dan lembaga, serta semua pemerintah daerah harus ditingkatkan. Bahkan BSSN pun harus terus diperkuat dari waktu ke waktu.

Tidak kalah pentingnya adalah segera memenuhi kebutuhan akan Undang-Undang (UU) Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional. Selama ini, payung hukum BSSN hanya UU No. 1/2008 tentang ITE yang telah diubah dengan UU No.19/2016. UU ini kemudian diperkuat dengan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Perpres 28/2021 tentang BSSN.

Kebutuhan akan UU Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2019. Saat itu, presiden menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan data.

Aspek lain yang tidak kalah strategisnya adalah menjaga konsistensi kegiatan mitigasi risiko atau ancaman serangan siber. Mitigasi ancaman siber hendaknya diprioritaskan, guna memperkecil peluang serangan siber terhadap semua institusi negara maupun daerah. BSSN tentu paling tahu profil ancaman. Maka, dari BSSN diharapkan muncul program mitigasi untuk memperkecil risiko serangan siber.

Dalam konteks memelihara keamanan dan pertahanan siber, diperlukan penguatan pondasi setidaknya pada empat aspek. Pertama, semua kerentanan yang dapat meningkatkan ancaman atau bahaya di bidang siber harus dapat dideteksi dan diidentifikasi. Kedua, semua aset penting yang berkait dengan kepentingan masyarakat harus dapat dilindungi atau dibentengi dari kemungkinan sabotase, serangan, atau upaya lain untuk menghancurkan atau merusak.

Ketiga, peretasan, serangan, atau upaya lain yang sedang berlangsung harus dapat ditanggulangi secepatnya. Kerusakan, kehilangan atau kehancuran yang telah terjadi harus dapat dipulihkan secepatnya.

Keempat, semua komponen dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber yang meliputi sumber daya manusia, perangkat teknis, dan perangkat non teknis, harus dapat dipantau dan dikendalikan agar tidak menambah besar kerentanan. ❑

# Apa Penyebab Harga Kebutuhan Pokok Naik

Kenaikan harga kebutuhan pokok, sembako, merupakan hal yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, apalagi rakyat kecil. Dengan pendapatan yang kecil tentu pengeluaran akan semakin meningkat bila harga sembako naik. Kenaikan harga, menurut wakil rakyat, suatu hal yang wajar sebab permintaan yang tinggi, namun stok terbatas. Lalu apa solusi yang perlu dilakukan agar keadaan tetap wajar dan cepat tertangani? Berikut pendapat wakil rakyat yang membidangi masalah itu yang dihimpun dari berbagai sumber.

**Intan Fauzi,** Anggota MPR Fraksi PAN

## Perlu Adanya Kemandirian Pangan

PADA awal Ramadan harga sembako (beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, serta garam) mengalami kenaikan. Kenaikan harga pangan ini merupakan masalah klasik di mana setiap tahun terjadi. Kenaikan harga sembilan bahan pokok itu sudah menjadi tren, apalagi di saat Ramadan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut terjadi sebab meningkatnya pembelian. Meningkat sekitar 10% hingga 15% meski di masa pandemi di mana pendapatan masyarakat turun dan bahkan yang tidak memiliki pekerjaan. Kenaikan harga-harga tadi juga dipengaruhi adanya komoditas impor atau dari negara luar. Misalnya, bangsa ini tergantung pada daging sapi dari Australia. Untuk minyak goreng, CPO yang ada mengikuti acuan harga dunia.

Untuk mengatasi kenaikan harga sembako yang terjadi setiap tahun, terutama di saat Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan membangun kemandirian pangan. Kita harus yakin dan optimistis kemandiran pangan bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat, sebab ini masalah selalu berulang setiap tahun. Jadi ini merupakan masalah klasik.

Komisi terkait di DPR, Komisi VI, telah mengadakan rapat dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk membahas masalah kenaikan harga ini. Dari rapat yang ada berharap agar kenaikan harga-harga kebutuhan pokok diselesaikan secara terintegrasi dan tuntas. Pastinya, kita berharap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak membebani atau memberatkan rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, sembako, harus tercipta kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini mulai dari petani, distribusi sampai dengan ritel tingkat akhir itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk tidak membebani rakyat dari harga produksi sampai dengan harga jual di ritel akhir. ❑

**AWG**

**Siti Mukaromah,** **Anggota MPR Fraksi PKB**

# Harga Perlu Dikawal Agar Tidak Seenaknya Naik

SETELAH melakukan kunjungan dan berkeliling ke Pasar Tradisional Tohaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk melihat stok bahan pokok dan harga pasar, serta berbincang dengan beberapa pedagang, menurut saya wajar bila ada kenaikan harga. Kenaikan harga terjadi sebab saat permintaan naik, stok barang di pasar terbatas sehingga hal inilah yang membuat komoditas harga akan naik. Saya melihat hal demikian wajar, sebab ketika melihat situasi dan antusias masyarakaat saat itu.

Saya menilai kenaikan harga sembako atau komoditas bahan pokok dan pangan seperti halnya daging, ayam, bahan baku tahu-tempe (kedelai) dan minyak goreng merupakan suatu kewajaran. Hal demikian terjadi sebab antusias masyarakat untuk berbelanja pada bulan Ramadan meningkat sangat besar, namun stok barang terbatas sehingga pasti harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan.

Menjelang Lebaran, harga-harga itu akan semakin naik. Faktor lain yang berasal dari impor, seperti kedelai bahan baku tempe dan tahu juga terbilang masih mahal karena berasal dari impor.

"Bila melihat apa yang terjadi di pasar di mana harga saat ini dengan antusias masyarakat berbelanja, harga bahan pokok ke depannya akan naik. Sekarang tinggal bagaimana DPR dan pemerintah hadir untuk mengawal kenaikan harga agar tidak seenaknya, namun dalam batas wajar. Di sini perlu adanya regulasi, aturan, serta pantauan agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang justru merugikan pedagang dan juga masyarakat," ujar Siti dalam rilis yang beredar di media online, dpr.go.id.

Kita berharap agar DPR bisa mengawal masalah ini. Saat ada perubahan kenaikan harga pun adalah kenaikan yang masih bisa dimengerti dan terjangkau untuk masyarakat dan tentu masih memberikan nilai keuntungan bagi para pedagang. Jadi, kita akan pantau semaksimal mungkin, tentunya Komisi VI akan mengawal ketersediaan barang bahan pokok harus ada di pasaran. Kemudian harga-harga tetap dalam jangkauan dan juga tetap memberikan nilai profit kepada pedagang. Tidak kalah pentingnya jangan sampai terjadi adanya pembiaran terhadap oknum-oknum penimbunan atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok usaha mereka. ❑

**AWG**

Semarak Ramadan

# HNW Bagikan Ribuan Takjil dan 660 Bingkisan Lebaran

Dengan berpuasa di bulan Ramadan, umat Islam tidak hanya menghadirkan kesalehan individual, tapi juga kesalehan sosial berskala global, berupa saling berbagi, saling membantu, dan saling menghargai sesama. Lingkupnya tidak hanya skala lokal, tapi juga dalam skala global.

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, pada puasa Ramadan lalu menyalurkan 20.000 paket berbuka puasa bagi masyarakat di Jakarta Pusat, Selatan, serta Malaysia dan Taiwan. Paket berbuka puasa, itu disalurkan Hidayat sejak awal hingga akhir Ramadan 1443 H. HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, juga membagikan 660 bingkisan lebaran berisi sembako dan THR bagi para yatim, dhuafa, pengurus Masjid, kyai, ustadz dan ustadzah serta dai di Jakarta.

"Alhamdulillah, ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk menyemarakkan Ramadan dan turut menyukseskan program Partai Keadilan Sejahtera membagikan 2 juta takjil serta ifthar selama Ramadan. Sekaligus mengapresiasi para Merbot Masjid, Kyai dan Ustadz & Ustadzah yang telah melayani dan memberikan bimbingan langsung kepada masyarakat. Semoga menguatkan kohesi sosial, ukhuwwah Islamiyah dan menjadi ibadah yang berkahnya meluber untuk kebaikan umat dan bangsa," begitu keteraangan HNW yang disampaikan di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini berpesan, agar bulan Ramadan dan ibadah puasa dapat meningkatkan motivasi untuk terus-menerus berkreasi dan berprestasi dengan berbagi dan melayani masyarakat. Baik pada tingkat nasional maupun internasional, sebagai perwujudan taqwa dan bukti bahwa Islam memang agama yang rahmatan lil 'alamin. Pesan itu disampaikan HNW secara daring dalam kegiatan berbagi ifthar dan takjil bersama kaum muslimin Taiwan. Acara tersebut turut diikuti oleh Diaspora Muslim Indonesia dari Jepang, UK, Qatar, Swiss, dan Brunei pada Ahad (24/4/2022),

Ketika menjelaskan ayat Alqur'an tentang kewajiban puasa, HNW memaparkan bahwa puasa merupakan bentuk tautan sejarah antara umat Islam hari ini dengan umat-umat terdahulu. Ramadan juga menyatukan umat Islam bersama umat manusia lainnya dengan taqwa. Yaitu, perilaku kebaikan dan berkeunggulan.

"Artinya, umat Islam sejatinya jangan memosisikan diri sebagai umat yang terpisah dan sendirian sehingga bisa terus dipojokkan atau bahkan diasingkan. Tetapi, umat Islam merupakan bagian dari kebaikan global yang dalam sejarahnya terus berkontribusi positif pada peradaban dunia. Dan, itu semuanya merupakan ajaran dan inspirasi Ramadan," ujarnya.

Apalagi tren yang meningkat belakangan ini, yakni banyaknya apresiasi bagi umat Islam yang sedang berpuasa dari banyak negara di dunia, seperti di Amerika Serikat, Rusia, serta Inggris. Itu menandakan di tengah banyaknya masalah global, Islam dan umat Islam melalui ibadah puasa di bulan Ramadan justru bisa menghadirkan harmoni dan dihormati oleh sesama umat manusia.

"Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, umat Islam tidak hanya menghadirkan kesalehan individual, tapi juga kesalehan sosial berskala global, berupa saling berbagi, saling membantu, saling menghargai sesama, yang lingkupnya tidak hanya dalam skala lokal, tapi bahkan terjadi secara masif dalam skala global," sambungnya.

"Dan, ini merupakan pembuktian Islam yang Rahmatan Lil'alamin, bahwa kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulullah dengan tetap menghadirkan penguatan dalam sisi kemanusiaan bagi seluruh manusia di dunia. Suatu hal yang makin diperlukan di tengah memanasnya situasi akibat kejahatan Israel, ketidakadilan dan kemiskinan," ujar HNW.

"Puasa Ramadan hadirkan kembali spirit berbagi dan melayani baik dalam bentuk takjil, 'ifthar, zakat, bingkisan untuk para dhuafa, yatim, merbot, pengurus masjid, guru ngaji dll," pungkasnya. ❑

# Meninggalkan Eksklusivitas Menuju Inklusivitas

Gerakan negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia terbilang gagal. Hal demikian bisa terjadi karena G-7 eksklusif. Hanya mereka dan negara pilihan yang bisa mengikuti pertemuan. Sadar hal demikian mereka membentuk block ekonomi baru yang dinamakan G-20. Komunitas ekonomi di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya itu membuka diri bagi negara non anggota, lembaga keuangan, serta komunitas ekonomi lainnya untuk turut serta membangun ekonomi dunia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PERMASALAHAN ekonomi suatu negara atau pada suatu kawasan bahkan dunia, rupanya tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Harus ada kerja sama beberapa negara agar permasalahan tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan pertahanan bisa diselesaikan. Hal demikian yang menjadi pokok pikiran dari Presiden Perancis dan Kasenlir Jerman, Valéry Giscard d'Estaing dan Helmut Schmidt, untuk mengadakah pertemuan pada tahun 1975. Pada masa itu, era tahun 1970-an, dunia terimbas krisis minyak sehingga dampak yang ditimbulkan mendera berbagai sendi kehidupan manusia.

Agar solusi yang dihasilkan bisa menyeluruh maka D'Estaing dan Schmidt juga meminta pendapat dan masukan kepada para pemimpin Italia, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat. Pembahasan yang dilakukan tidak akan tuntas bila dilakukan lewat telepon. Untuk itu, pada November 1975, para pemimpin pemerintahan dari Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika sepakat mengadakan pertemuan di Rambouillet, Prancis, November 1975.

Meski mereka sudah bertemu namun belum ada label pada komunitas itu. Setelah pertemuan selanjutnya pada tahun 1976 di San Juan, Puerto Rico, komunitas itu menamakan diri dengan G-7 (*Group of Seven*). Negara ketujuh sebagai pelengkap komunitas itu adalah Kanada sehingga anggota dari G-7 adalah Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada.

Hadirnya G-7 diharapkan oleh mereka bisa menjadi pemecah bagi permasalah dunia, namun hadirnya komunitas negara-negara maju itu, baik secara ekonomi, politik, dan pertahanan, hanya membawa eksklusivitas dan elitisme. Negara-negara di luar G-7 pada masa itu seolah-olah hanya menjadi penonton dari pertemuan negara-negara maju.

Sikap eksklusivitas, elitis, dan tertutup, hanya mau menerima Uni Eropa dan Rusia, sebagai tamu dalam setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) membuktikan G-7 sebagai kelompok elit negara-negara maju. Di luar mereka dianggap tidak penting sehingga tidak perlu dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada tahun 1993, Presiden Soeharto, yang saat itu Ketua Gerakan Non-Blok (GNB), ingin menyuarakan kepentingan blok itu kepada G-7 saat mereka mengadakan KTT di Tokyo, Jepang. Lobi-lobi pun dilakukan oleh Indonesia sebagai Ketua GNB agar bisa hadir sebagai tamu dalam KTT. Kepada mereka ditegaskan bahwa Soeharto hadir bukan atas nama Indonesia, namun membawa mandat 110 negara anggota GNB.

Kerja keras dan lobi-lobi yang telah dilakukan rupanya tidak membuahkan hasil. Para pemimpin G-7 tak berkenan Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB ikut dalam pertemuan itu. Tamu yang diperkenankan dapat ikut di KTT itu selain Uni Eropa adalah Presiden Rusia Boris Yeltsin saja.

Meski G-7 rutin mengadakan KTT namun banyak pihak menyebut hasil yang disepakati tidak menyelesaikan masalah. Keputusan yang diambil mengawang-awang tidak memberikan solusi global, sebab tidak melibatkan negara dan komunitas yang lain.

Ketidakefektifan G-7 disadari oleh mereka sendiri sehingga para menteri keuangan dari kelompok itu berpikir dan sepakat untuk meluaskan anggota dan melibatkan banyak pihak. Dengan alasan krisis ekonomi tahun

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

1998, Menteri Keuangan Jerman dan Kanada mengundang para menteri keuangan atau gubernur bank sentral dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa, untuk hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di Berlin, 15-16 Desember 1999. Dari sinilah akhirnya terbentuk G-20 (*Group of Twenty*).

Dalam *Wikipedia* disebut G-20 adalah kelompok negara yang menghimpun hampir 90% produk nasional bruto (PNB, GNP) dunia, 80% total perdagangan dunia, dan dua per tiga penduduk dunia. Sumber lain menyebut, kelompok ini mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.

Selang waktu antara tahun 1999 hingga 2007, pertemuan yang digelar oleh G-20 sebatas pada tingkat menteri, namun dirasa kelompok ini terbilang efektif dan mempunyai dampak serta terasa tidak elitis maka pada 2008 digelarkan KTT G-20. KTT merupakan pertemuan tertinggi dari G-20 yang melibatkan para pemimpin pemerintahan.

Dalam *sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20,* diungkapkan pada 14 - 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G-20 dalam KTT I G-20. KTT ini digelar untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G-20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Pada 1 – 2 April 2009, London menjadi tuan rumah (Presidensi) KTT II G-20 di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.

Selanjutnya, KTT III G-20 dilaksanakan di Pittsburg pada 24 – 25 September 2009, di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. KTT IV G-20 diadakan di Toronto pada 26 – 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-Bak memimpin KTT Seoul pada 11 – 12 November 2010. Selanjutnya berturut-turut KTT diadakan di Cannes,

Prancis (2011); Los Cabos, Mexico (2012); St. Petersburg, Rusia (2013); Brisbane, Australia (2014); Antalya, Turki (2015); Hangzhou, RRT (2016); Hamburg, Jerman (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); Osaka, Japan (2019).

Kepemimpinan G-20 tidak tetap, digilir atau dirotasi berdasarkan kesepakatan pertemuan yang digelar sebelumnya. Indonesia pun akhirnya mendapat giliran sebagai Presidensi G-20. Presidensi ini dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Sebagai presidensi maka Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT G-20. KTT XVII rencananya akan digelar pada 15-16 November 2022, di Nusa Dua, Bali.

Dalam *kemlu.go.id*, diberitakan sebagai Presidensi G-20, Indonesia mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*. Tema ini diangkat untuk menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi Covid-19 sehingga memerlukan upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.

Dijelaskan dalam *web* itu, untuk mencapai target, Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu: *Pertama*, penguatan arsitektur kesehatan global. Berkaca dari pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat. Tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya.

*Kedua*, transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi, dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital (*digital skills*) dan literasi digital (*digital literacy*) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara.

*Ketiga*, transisi energi. Guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau dan menangani perubahan iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.

Meski memiliki 20 anggota resmi, namun dalam setiap KTT, presidensi yang ada selalu mengundang negara, lembaga keuangan, atau komunitas ekonomi lainnya sebagai tamu. Kehadiran mereka diperlukan untuk memperkaya pendapat dan masukan kepada anggota. Saat Indonesia menjadi presidensi, negara ini mengundang banyak pihak untuk ikut berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di dunia.

Mereka yang diundang itu, seperti yang tertuang dalam *kemlu.go.id*, adalah Ketua Uni Afrika, Ketua *The African Union Development Agency-NEPAD* (AU-NEPAD), Ketua *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua *The Caribbean Community* (CARICOM), dan Ketua *Pacific Island Forum* (PIF).

Juga diundang 10 organisasi internasional, yaitu: *Asian Development Bank* (ADB), *Financial Stability Board* (FSB), *International Labour Organization* (ILO), *International Monetary Fund* (IMF), *Islamic Development Bank* (IsDB), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *World Bank, World Health Organization* (WHO), *World Trade Organization* (WTO), dan *United Nations* (UN).

Melibatkan banyak pihak dalam G-20 saat Presidensi Indonesia sebab dilandasi prinsip inklusivitas. Dalam web di atas dikatakan, Presidensi Indonesia turut mengundang negara-negara tamu dan organisasi internasional (*invitees*) untuk turut berpartisipasi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa inklusivitas ini adalah prioritas kepemimpinan Indonesia di G-20, untuk mewujudkan *leave no one behind*.

Visinya adalah Presidensi G-20 yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, serta kelompok rentan, dan tidak hanya demi kepentingan anggota G-20 itu sendiri.

Untuk itu, Indonesia pun memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Selain refleksi *spirit of inclusiveness*, hal ini juga memberikan representasi yang lebih luas kepada G20. ❑

**AWG**

# Di Bawah Bayang-Bayang Boikot Amerika dan Sekutunya

Dampak Perang Rusia-Ukraina merembes ke berbagai pertemuan G-20. Amerika Serikat dan sekutunya memboikot bila Rusia hadir dalam pertemuan yang diadakan di Bali itu. KTT G-20 terancam tanpa kehadiran Biden atau Putin.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

NOVEMBER 2022, Ngurah Rai International Airport, Jalan Tol Bali Mandara, kawasan Nusa Dua, dan beberapa titik di sekitarnya dijaga ketat oleh berbagai aparatur gabungan, bahkan pengamanan tradisional yang ada di sana ikut berpartisipasi dalam pengamanan itu. Pengamanan ketat dilakukan sebab para pemimpin negara anggota G-20, seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Boris Johson, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Recep Erdogan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri India Narendra Modi, serta pemimpin pemerintahan lainnya seperti dari Jerman, Brasil, Arab Saudi, Korea, Afrika Selatan, Argentina, Australia, Meksiko, China, dan Uni Eropa, satu persatu tiba di Bali, Indonesia.

Mereka berduyun-duyun datang ke pulau dewata untuk mengikuti KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G-20 yang rencananya digelar pada 15 hingga 16 November 2022. Kedatangan para pemimpin dunia tersebut tentu perlu pengamanan dan services yang ketat. Di tangan merekalah perekonomian dunia digulirkan. Sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo tentu senang bila semua pemimpin dunia hadir, terutama Joe Bidan dan Vladimir Putin.

Bayangan di atas, kehadiran semua pemimpin dunia itu tentu harapan semua, namun harapan itu entah terwujud atau tidak. Invasi Rusia ke Ukraina rupanya merembes ke pertemuan-pertemuan G-20. Sebelum KTT digelar di Bali, suasana itu sudah memanas. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina membuat negara-negara Barat tidak hanya mengisolasi dan memberi sanksi kepada Rusia, namun juga hendak memboikot atau tidak datang ke Bali bila Rusia tetap diundang dalam KTT XVII itu.

Dalam berita yang tersebar di berbagai online, pemerintah Amerika lewat Menteri Keuangan Janet Yellen mempertanyakan masa depan G-20. Dengan menyebut nama Biden, Yellen mengatakan agar Rusia dikeluarkan dari G-20. Ditegaskan, Amerika tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan bila ada Rusia. Yellen sendiri setuju dengan langkah Biden. Dia tidak ingin Rusia merasakan hasil kerja sama dengan berbagai macam lembaga keuangan.

Senada dengan Biden dan Yellen, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, juga tak ingin Rusia menikmati G-20. Dikatakan oleh Trudeau, Rusia tak bisa menjadi mitra yang konstruktif dalam pertemuan G-20. Dalam berita yang disiarkan oleh beragam media, dia menegaskan tidak bisa melakukan bisnis

seperti biasa saat Putin duduk (dalam pertemuan) sembari berpura-pura bahwa keadaan baik-baik saja.

Sekutu terdekat Inggris dan Amerika, Australia, juga demikian. Sama seperti yang dikatakan Trudeau, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, merasa tak nyaman bila ia harus duduk bersama dengan Putin dalam pertemuan G-20. Morrison dengan mencatut nama Amerika bahwa duduk bersama dengan Putin dalam pertemuan merupakan suatu kejahatan perang.

Ancaman negara-negara Barat dan sekutunya bukan main-main, buktinya saat pertemuan pejabat tinggi keuangan anggota G-20 yang digelar di Washington, Amerika, 20 April 2022, delegasi dari Amerika, Inggris, Kanada, Ukraina, dan beberapa negara Eropa lainnya *walkout*. Mereka melakukan langkah itu sebagai bentuk protes atas invasi Rusia ke Ukraina.

Mereka yang *walkout* adalah Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen, Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland, Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni, dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag.

**Anton Siluanov**

Mereka berbondong-bondong angkat kaki saat Wakil Menteri Keuangan Rusia Timur Maksimov memberikan pemaparan dalam pertemuan itu. Beberapa negara Eropa lainnya tetap berada di forum, namun disebut di antara mereka ada yang mematikan kamera saat Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dan Gubernur Bank Sentral Rusia memberikan pemaparan secara virtual langsung dari Moscow.

Rishi Sunak, Menteri Keuangan Inggris, mengatakan langkah mereka dikatakan sebagai bentuk kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina. Mereka akan terus mendorong koordinasi internasional yang lebih kuat untuk menghukum Rusia. Sementara itu Freeland menuturkan dirinya *walkout* untuk memprotes kehadiran Rusia. Pertemuan di Washington disebut tetap mendukung ekonomi dunia, namun invasi Rusia ke Ukraina adalah ancaman besar bagi ekonomi global.

Ancaman boikot KTT G-20 dan ancaman itu sudah terbukti, membuat pemerintah Rusia menanggapi hal yang demikian. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menegaskan, Putin akan datang ke KTT G-20. KTT yang digelar menurutnya bukan untuk membahas Rusia-Ukraina melainkan masalah ekonomi global.

Indonesia sebagai tuan rumah KTT G-20 menengahi permasalah yang ada. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, undangan KTT sudah dibagi kepada para anggota pada Februari 2022. Jadi, sebelum pecah perang Rusia – Ukraina, undangan sudah tersebar. Tak hanya itu alasannya, sebagai Presidensi G-20, Indonesia wajib mengundang seluruh anggota. Sembari menunggu perkembangan, Indonesia akan terus mempersiapkan penyelenggaraan KTT G-20.

Langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia disebut tepat oleh pakar hukum hubungan internasional, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, Indonesia sudah benar mengirim undangan ke semua anggota G-20. Mengundang semua anggota adalah langkah yang sesuai prosedur. Bila misalnya Rusia tidak datang, menurut pria yang saat ini menjadi Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu bukan karena Indonesia tidak mengundang.

Dalam KTT, dikatakan Indonesia tidak bisa memaksa seluruh negara hadir. Dia mencontohkan saat Italia menjadi Presidensi G-20 tahun 2021. Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak hadir. Paling penting menurutnya adalah Indonesia tetap terus mempersiapkan Presidensi G-20 sesuai prosedur. Ditegaskan jangan sampai konflik antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, serta sekutunya dibawa ke Indonesia. ❑

**AWG***/dari berbagai sumber*

# Promosi Wisata di Tengah KTT

**Presidensi G-20 juga digunakan oleh tuan rumah untuk mempromosikan potensi wisata dan budaya. Tak heran bila penyelenggaraan KTT G-20 kerap berada di tempat plesiran. Promosi di sela-sela kesibukan pertemuan para delegasi membuat popularitas tempat wisata semakin kesohor.**

SEBAGAI tuan rumah, biasanya penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), apapun komunitas ekonominya, akan melayani para tamunya dengan baik, ramah, dan memuaskan. Ini dilakukan agar sebutan sukses menjadi predikat dalam pertemuan itu. Tuan rumah dalam menyelenggarakan pertemuan tidak hanya bersikap baik dan ramah, namun bagaimana tempat pertemuan yang ada bisa memberi kesan yang mendalam sehingga kelak mereka akan kembali lagi ke kota atau pulau tempat penyelenggaraan atau pertemuan itu.

Dari sinilah biasanya tuan rumah menggelar pertemuan di tempat-tempat wisata yang popular atau hendak dipopularkan, dipromosikan. Dalam pertemuan-pertemuan besar biasanya pihak tuan rumah sekaligus mempromosikan negaranya untuk kepentingan pariwisata atau bisnis.

Saat KTT X G-20 di Turki pada tahun 2015, Presiden Recep Tayyip Erdogan memilih lokasi pertemuan bukan di Ankara atau Istanbul, dua kota besar dan popular di sana, namun di Antalya. Disebut dalam *Wikipedia*, Antalya merupakan ibu kota Provinsi Antalya yang terletak di sebelah barat Turki. Pada tahun 2004 jumlah penduduknya berjumlah 758.000 jiwa. Kota ini terletak di tebing yang curam dan dikelilingi oleh pegunungan, hutan, dan Laut Tengah. Memiliki pemandangan yang indah. Pembangunan pada tahun 1970-an dalam bidang pariwisata telah mengubah kota ini menjadi pusat peristirahatan internasional.

Seperti diceritakan di atas, sebagai pusat plesir, banyak tempat wisata yang menawan. Tempat-tempat wisata itu seperti Alanya, Belek, Side, Kemer, Kas, dan Kalkan. Alanya sendiri adalah kota yang berada di pesisir dan disebut paling indah. Keindahan

**Recep Tayyip Erdogan** FOTO-FOTO: ISTIMEWA

inilah yang membuat Alaya selalu dibanjiri wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dikelilingi pegunungan Taurus dan Laut Mediterania membuat kota disebut *Güneşin Gülümsediği Yer (*Tempat Matahari Tersenyum). Di Alanya, matahari bersinar sepanjang tahun seperti di daerah tropis.

Bila Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, awalnya adalah kampung nelayan yang diubah menjadi tempat wisata maka Kas juga demikian. Kas dulunya adalah perkampungan nelayan yang oleh pemerintah Turki dijadikan tempat wisata yang indah. Di Kas, masih ada rumah-rumah yang bergaya Ottoman. Hal inilah yang mempercantik kota itu. Daerah ini juga berada di pesisir dengan laut yang biru ditambah dengan bukit batu.

Saat Perancis sebagai Presidensi G-20, pemerintah di sana memilih Kota Cannes sebagai kota penyelenggara KTT. Paris tidak dijadikan sebagai tempat pertemuan G-20 sebab kota ini sudah terkenal, jadi tidak perlu dipromosikan lagi. Dalam *Wikipedia* disebutkan, Cannes adalah suatu kota bagian selatan yang terletak di Riviera, département Alpes-Maritimes. Secara geografi berada di Pantai Azur dekat Pegunungan Alpen.

Dari sejarahnya, awalnya Cannes merupakan desa kecil bagi para petani dan nelayan. Selanjutnya tahun 1830-an, para bangsawan Perancis dan kaum Baron Eropa membangun rumah di sana. Mereka membangun hunian untuk berlibur, karena keindahan Cannes. Hal inilah yang membuat kota itu perlahan-lahan menjadikan kota peristirahatan.

Selain pantai, wisatawan saat di Cannes juga bisa mengunjungi *Museum La Malmaison*, Kapel Bellini 1894, *Musée de la Castre*, dan *Le Suquet*, kota tua dekat Cannes. Keindahan Cannes inilah yang membuat Rowan Atkinson membuat film dengan judul *Mr. Bean's Holiday*.

Tak hanya wisata bahari yang membuat kota itu menjadi sasaran wisatawan dari berbagai dunia. Festival Film Cannes juga merupakan magnet bagi orang untuk datang ke sana. Di festival inilah berbagai film dari

**Vladimir Putin**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berbagai belahan dunia dilombakan.

Pun demikian saat Rusia sebagai Presidensi G20, Presiden Vladimir Putin memilih Saint Petersburg sebagai kota tempat penyelenggaraan KTT 2013. Disebut dalam *Wikipedia*, Saint Petersburg dikenal sebagai Ibu Kota Budaya Rusia. Kota ini disebut sebagai pusat ekonomi, ilmiah, budaya, dan pariwisata baik di Rusia maupun Eropa. Tercatat pada tahun 2018 ada 15 juta wisatawan mengunjungi Saint Petersburg.

Disebut sebagai kota budaya sebab di sini ada *The Historic Center of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments*, merupakan situs warisan dunia UNESCO. Tak hanya ada pusat sejarah, di Saint Petersburg juga terdapat rumah bagi Hermitage, salah satu museum seni terbesar di dunia, *Lakhta Center*, gedung pencakar langit tertinggi di Eropa, dan salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2018.

Lebih jelas dalam *Wikipedia* disebutkan di UNESCO ada daftar warisan dunia sebagai daerah dengan 36 kompleks arsitektur bersejarah dan sekitar 4000 monumen individu yang luar biasa dari arsitektur, sejarah dan budaya.

Kota ini memiliki 221 museum, 2000 perpustakaan, lebih dari 80 teater, 100 organisasi konser, 45 galeri dan ruang pameran, 62 bioskop, dan sekitar 80 bangunan budaya lainnya. Setiap tahun kota ini menyelenggarakan sekitar 100 festival dan berbagai kompetisi seni dan budaya, termasuk lebih dari 50 festival internasional.

Saat Meksiko sebagai Presidensi G-20, negara di Amerika Latin itu memilih Los Cabos sebagai tempat penyelenggaraan KTT VII Tahun 2012, bukan di Mexico City. Dari catatan yang ada, Kota Los Cabos berada di ujung Baja California. Masuk kota ini adalah kota-kota Cabo San Lucas, San José del Cabo, serta Resort Corridor. Perekonomian di kota ini digerakkan dari tempat wisata yang ada, seperti El Arco De Cabo San Lucas, Taman Nasional Cabo Pulmo, Playa del Amor, Todos Santos, Playa Santa María, Playa el Chileno, Mission San José del Cabo Church, San José del Cabo Art Walk, Gunung Solmar, dan Kebun Botani Kaktus Wirikuta.

Nah, dari paparan di atas mengapa KTT G-20 tahun 2022 digelar di Bali? Sebagai tuan rumah, Indonesia tidak hanya ingin pertemuan itu berjalan sukses namun bagaimana pariwisata yang ada juga terpromosikan ke berbagai belahan dunia. Hadirnya para pemimpin dunia tentu akan diliput oleh media massa. Hal demikian pasti akan mengungkit Bali, Indonesia. Dengan ungkitan tersebut pulau yang indah dengan berbagai pantai dan wisata budaya ini akan lebih kesohor. Pemberitaan media asing akan semakin banyak orang ingin mengetahui Bali dan kelak akan berkunjung ke sana.

Sama dengan kota-kota di atas, di Bali juga ada banyak tempat wisata, selain pantai juga ada gunung, cagar budaya, budaya, dan kuliner. ❑

**AWG***/dari berbagai sumber*

**Prof. Dr. Husain Syam**
Rektor UNM

## Pendidikan Nasional Perlu Keberpihakan Negara

SETIAP negara pasti menginginkan sumber daya manusianya berkualitas sehingga pembangunan akan menjadi lebih mudah dan tercapai hasil maksimal. Salah satu upaya untuk memuculkan sumber daya manusia yang baik dan bermutu adalah melalui pendidikan yang juga baik dan bernutu.

Untuk itu pendidikan nasional harus lebih digalakkan lagi dari sisi sistem dan kurikulum pembelajaran. Selain itu, negara harus memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap bidang pendidikan ini, bisa dengan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan juga terakomodirnya seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau.

Saat ini sudah banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi, seperti profesor. Di UNM sendiri sudah banyak melantik guru-guru besar, dan ini baik agar mereka para guru besar itu memberikan pengetahuan dan wawasannya kepada mahasiswa.

Saya juga berharap para guru besar untuk sering-sering datang ke kampus untuk menurunkan ilmu mereka kepada anak didik, sehingga anak didik dengan intensnya bertemu dan menggali ilmu dari para guru-guru besar. Dengan demikian, para anak didik diharapkan mampu menyerap ilmu dengan lebih baik. ❑

**DER**

---

**Lukman Said**
Ketua Umum Adkasi

## Suarakan Kepentingan Daerah ke Pusat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBAGAI Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi) masa bakti 2022 – 2026 yang terpilih, kami akan menyuarakan tentang kepentingan daerah yang menjadi masalah pembangunan daerah ke pusat.

Kami melihat saat ini pembangunan Indonesia secara keseluruhan telah berjalan baik, tapi memang ada beberapa daerah, terutama di pelosok-pelosok, yang mungkin belum terkena pembangunan dikarenakan posisi geografis yang sulit terjangkau, seperti daerah-daerah di Papua.

Kami berharap, dengan adanya Adkasi ini menjadi satu suara untuk menyuarakan kepentingan daerah, termasuk beberapa kebijakan berbentuk UU seputar daerah. Kami berharap, pemerintah pusat bersinergi dengan kami untuk bersama-sama lebih memerhatikan pembangunan di daerah.

Kami juga berharap kepada pemerintah dan DPR, aspirasi kami tentang kepentingan daerah dapat dikawal masuk menjadi RUU dan jika dirasa baik menjadi UU. ❑

**DER**

Rahma Dania

# Pejuang Persalinan di Daerah Terpencil

TOLONG menolong dan bergotong-royong meringankan beban orang lain, mungkin semakin sulit ditemukan. Tetapi, itu bukan berarti orang-orang yang berjiwa penolong, itu sudah tidak ada lagi. Masih banyak orang yang mau mengorbankan kepentingan dirinya untuk membantu sesamanya, tanpa pamrih maupun paksaan.

Mereka ini tidak bisa membiarkan orang lain kesusahan. Dalam hatinya selalu ada rasa iba jika menemukan orang dalam kesulitan, kemudian mengulurkan tangan untuk membantu. Hebatnya, keinginan meringankan beban orang lain itu malah menyandu. Sehingga dia ingin mengulang dan mengulangnya lagi. Meskipun, untuk melakukannya harus berjuang keras disertai pengorbanan yang tidak ringan. Termasuk meninggalkan keluarga dan sanak saudara.

Keinginan untuk terus memberi pertolongan kepada orang lain itu salah satunya dirasakan oleh Rahma Dania (26). Salah satu bidan peserta program Nusantara Sehat (NS). Rahma Dania pertama kali ikut program NS pada 2019-2021. Pada awal 2022 Ia memperpanjang kontraknya untuk terus ikut serta dalam program kementerian kesehatan itu.

Pada keikutsertaannya yang pertama, atau tahun 2019-2021, Rahma ditugaskan menjadi bidan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Puskesmas Mok, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Dan, sejak awal Maret 2022, dara kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 8 Februari 1996, ini telah resmi berpindah ke provinsi Maluku. Yaitu di Puskesmas Longgar Apara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Di dua tempat yang berbeda itu Rahma menemukan tantangan yang berbeda pula. “Di tempat yang sekarang ini, signal HP sangat sulit. Kadang pesan chat dikirim tapi kapan terimanya tidak ada kepastian. Sedang untuk menelepon kita harus pergi ke tempat yang signalnya bagus. Jadi, meski pegang HP, tapi tidak menjamin bisa berkomunikasi dengan lancar,” kata Rahma kepada Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Selain masalah signal, di tempatnya saat ini, sarana dan prasarana kesehatan masih menjadi kendala. Semua motor dinas rusak, sehingga mobilitas tenaga kesehatan terganggu. Sedangkan ketiadaan ambulaan darat membuat pekerjaan merujuk pasien ke rumah sakit menjadi semakin sulit.

Bahkan, kehidupan Rahma di Maluku juga tergantung dengan kondisi laut. Jika air laut bergejolak, berarti aktivitasnya akan terhambat. Demikian juga kegiatan merujuk pasien yang harus dilakukan dengan jalur

laut, baru bisa dilakukan setelah air laut kembali tenang, dan kehidupan pun normal seperti sediakala.

"Di sini, Puskesmasnya butuh perhatian lebih dari pemerintah, sama seperti puskesmas lain di daerah terpencil. Ini penting agar pelayanan terhadap masyarakat bisa sebaik mungkin, seperti puskesmas-puskesmas di kota besar," ujar Rahma.

## Minoritas

Berbeda dengan pengalamannya di Maluku yang baru seumur jagung, tugas dan tantangan yang dijumpai Rahma selama di NTT jauh lebih berliku. Namun, itu tidak membuatnya berkecil hati. Masyarakat dan rekan sejawatnya di Puskesmas selalu mensuport tugas dan perjuangan Rahma. Mereka juga senantiasa menjaganya dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.

"Waktu itu, saya adalah satu-satunya muslimah di sana. Tapi mereka sangat baik, menghargai dan menghormati saya. Mereka tahu saya muslimah, karena itu mereka berusaha menghindarkan saya dari makanan yang diharamkan agama saya," kata Rahma lagi.

Tantangan terbesar dalam usahanya membantu persalinan ibu hamil, kata Rahma, adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting kesehatan. Sehingga sangat jarang ada perempuan hamil yang mau memeriksakan kandungannya. Umumnya, mereka datang ke puskesmas karena ada persoalan, dan itu sudah dalam situasi yang darurat.

"Jadi saat tiba di Puskesmas kondisinya sudah kurang baik, kerap kali harus dirujuk ke rumah sakit, yang jaraknya sangat jauh," kata Alumni Poltekkes Semarang, Jawa Tengah, itu menambahkan.

Karena itu, Rahma banyak menemukan kasus persalinan bermasalah dan butuh penanganan yang ekstra di rumah sakit. Tidak sedikit ibu hamil yang dibantunya terpaksa melakukan persalinan di atas ambulan, karena jarak dari puskesmas ke rumah sakit terlampau jauh. Padahal kondisi cuaca saat itu hujan dengan petir menyambar, serta angin ribut.

Meski begitu, Rahma tidak pernah berkecil hati. Ia tetap bersemangat, bukan hanya menunggu pasien datang ke Puskesmas. Tapi juga menjemput bola, memeriksa ibu hamil dan menyusul ke rumah masing-masing. Padahal jarak satu rumah dengan rumah lainnya, atau rumah dengan Puskesmas cukup jauh. Dan, itu dilakukan dengan berjalan kaki.

"Saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya meyakini, kebangaan profesi bukan dinilai dari materi melainkan seberapa banyak kita bisa mengabdi," kata Rahma lagi.

Menjadi bidan di daerah terpencil, menurut Rahma, membuat dirinya semakin banyak bersyukur. Karena dengan menjadi bidan di daerah terpencil, ia bisa melihat bahwa di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung dirinya, tinggal diperkotaan dan semua serba ada. Bahkan, akses kemana-mana juga mudah. Karena itu, selama program NS ada dan saya masih dibutuhkan, Rahma akan terus mendarmabaktikan hidupnya untuk menolong sesama. ❑

**MBO**

Terima Wakil Ketua LPSK

# Jadikan Rumah Aspirasi Sebagai Pusat Pengaduan Korban Kekerasan Seksual

Bamsoet menyatakan, LPSK Siap Kerjasama Jadikan Rumah Aspirasi Anggota MPR Menjadi Pusat Pengaduan dan Penanggulangan Korban Kekerasan Seksual di Daerah.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan bekerjasama menjadikan Rumah Aspirasi para anggota MPR RI yang berasal dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI di masing-masing daerah pemilihannya, untuk dimanfaatkan menjadi Pusat Pengaduan dan Penanggulangan Korban Kekerasan Seksual, khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Ini sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022.

"Sepanjang tahun 2021, LPSK mencatat ada 3.027 pengaduan terdiri dari permohonan dan konsultasi, tertinggi sepanjang 13 tahun kehadiran LPSK. Peningkatan kasus terjadi pada kekerasan seksual terhadap anak yang mencapai 426 aduan, melonjak 91% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 223 laporan. Data lain dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan, sepanjang tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sudah mencapai 2.363 kasus," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, di Jakarta, Selasa (26/4/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, UU TPKS sudah sangat progresif berpihak kepada korban. Antara lain, adanya ketentuan terkait restitusi yang mengedepankan tanggungjawab pelaku, mulai dari menuntut pembayaran oleh pelaku, pembebanan pihak ketiga, sita harta kekayaan pelaku, hingga hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tidak adanya pihak ketiga.

"Ada juga pengaturan tentang dana bantuan korban (victim trust fund), yakni jika harta kekayaan pidana yang disita dari pelaku tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan. Serta ada juga mekanisme perlindungan korban yang dilakukan dengan berbagai tahapan, perlindungan sementara oleh kepolisian atau dapat langsung mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK paling lambat 1x24 jam, dan perlindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 14 hari," jelas Bamsoet.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain membahas kerjasama penanganan TPKS, dia juga mengapresiasi terpilihnya Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution sebagai Ketua Umum

Ikatan Alumni (ILUNI) UIN Imam Bonjol, Padang. Dengan kepemimpinannya, diharapkan bisa membawa keluarga besar ILUNI UIN Imam Bonjol, Padang, sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi korban TPKS. Sekaligus menjadikan ILUNI UIN Imam Bonjol sebagai kekuatan sosial dalam merawat kebhinekaan bangsa.

"Rencananya saya akan mengukuhkan kepengurusan PP ILUNI UIN Imam Bonjol, Padang, pada 21 Mei 2022. Bersama Maneger Nasution selaku Ketua Umum PP ILUNI UIN Imam Bonjol, kita juga akan menandatangani Nota Kesepahaman antara MPR RI dengan PP ILUNI UIN Imam Bonjol untuk meningkatkan kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai lapisan masyarakat, memanfaatkan kekuatan sosial yang dimiliki para anggota ILUNI UIN Imam Bonjol, Padang," pungkas Bamsoet. ❑

## APBN dan Mekanisme Utang Luar Negri

# APBN Harus Difokuskan Pemulihan Ekonomi Nasional

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah merugikan Negara, jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN atau mekanisme utang luar negeri.

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN maupun mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat. Pasalnya, pembangunan kereta cepat telah memakan biaya besar dan membengkak hingga US$ 8,1 Milyar.

Syarief Hasan menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta- Bandung telah merugikan negara. "Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri," ungkapnya di Jakarta akhir April lalu.

Memang, pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan Cina itu kini mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi US$ 8,1 Milyar atau jauh lebih besar dari tawaran Jepang sekitar US$ 6 miliar.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyebutkan, biaya yang membengkak jauh lebih besar dari tawaran Jepang. "Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini," ungkap Syarief Hasan.

Ia pun menilai, keuangan negara akan semakin sulit jika dibebankan kepada APBN. "Kita saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional, sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak ," tegas Syarief Hasan.

Terlebih, menurut Syarief Hasan, APBN kita juga diberatkan dengan pembangunan IKN. "IKN juga menyedot APBN cukup besar sehingga tidak seharusnya digunakan untuk menutupi biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat," ungkap Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah lebih fokus pada penumbuhan ekonomi. "Seharusnya pemerintah lebih fokus menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, ketimbang membuat proyek yang hanya memberatkan keuangan Negara," tutup Guru Besar Stategis UMKM ini. ❑

## HNW Kritisi Sekjen Mahkamah Konstitusi

# Menerima Peserta Sayembara Pembuatan Gedung MK di IKN.

Sekjen MK menerima peserta sayembara pembuatan gedung MK di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, sikap Sekjen MK ini mengganggu imparsialitas MK dalam memutus uji materi UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA., mengkritisi sikap Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima peserta sayembara pembuatan Gedung MK di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayat, langkah Sekjen MK itu dapat memunculkan ketidakpercayaan atas kredibilitas MK. Dan, mengganggu imparsialitas MK dalam memutus uji materi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang masih berjalan dan diajukan banyak pihak. Seperti dari individu rakyat, warga asli setempat, keluarga Kerajaan Kutai Kertanegara, Mahasiswa, Aktivis LSM, hingga para Pakar dan Guru Besar.

Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, menegaskan, tindakan Sekjen MK tersebut disesalkan dan sangat tidak etis. Karena perkara pengujian UU IKN dari banyak pihak sedang diadili dan akan diputus oleh para hakim konstitusi. “Oleh karena itu, sangat wajar apabila banyak pihak menyoroti dan mempertanyakan keadilan, obyektivitas dan imparsialitas MK dalam memutus perkara judicial review itu nantinya,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (28/4/2022).

Lebih lanjut HNW mengatakan, sikap imparsial (tidak memihak) sangat perlu di kedepankan sebagai prinsip umum kode etik dan pedoman perilaku para hakim konstitusi yang oleh UU MK dipersyaratkan mempunyai jiwa Kenegarawanan. “Walau yang menerima peserta itu adalah Sekjen MK, itu akan menjadi beban bagi para hakim konstitusi yang mengadili perkara judicial review tersebut nantinya, karena belum apa-apa, sudah diberitakan bahwa MK menerima mereka,” tukasnya.

Langkah Sekjen MK itu bisa menimbulkan kesan bahwa sekalipun judicial review belum diputuskan, tapi MK akan menolak judicial review yang sedang diajukan tersebut. Buktinya, MK sudah merestui rencana gedung baru MK di IKN, yang bisa diartikan bahwa sejak awal MK sudah tidak netral. MK diam-diam sudah membenarkan UU IKN, sekalipun proses judicial review yang diajukan banyak pihak itu masih berjalan, bahkan belum ada putusan apapun dari para Hakim MK.

MPR selaku Lembaga Negara yang membentuk MK, kata HNW, perlu mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar membuktikan selalu hadirnya sikap kenegarawanan sehingga bisa bersikap adil, netral, dan imparsial dalam menangani perkara apapun. Terlebih menyangkut masa depan berbangsa dan bernegara, seperti soal IKN ini. Apalagi MK sebelumnya pernah memutuskan pembuatan UU Cipta Kerja yang divonis sebagai Inkonstitusional bersarat, sementara UU IKN pun mempunyai potensi bermasalah sejenis. Belum lagi kekacauan terkait dengan investor yang akan membangun IKN serta ketidakjujuran Pemerintah soal anggaran yang akhirnya malah membebani APBN, tidak sebagaimana janji semula.

“Ketika amandemen UUD yang menghadirkan MK, MPR juga mempunyai TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, termasuk etika dalam penegakan hukum yang masih berlaku. Dan, karenanya harus menjadi pegangan bagi semua pejabat negara, apalagi MK adalah satu-satunya lembaga negara yang oleh UU dipersyaratkan kenegarawanan untuk para Hakimnya,” tukasnya.0

Salah satu upaya untuk menjaga etika bagi pejabat negara, kata HNW, adalah dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan kecurigaan memihak salah satu pihak atau memiliki konflik kepentingan. “Ini yang harus dijaga oleh setiap pejabat Negara, termasuk Hakim MK. Jangan sampai publik memiliki kecurigaan seperti itu, dan ketidakpercayaan terhadap keputusan yang akan diputuskan oleh Hakim MK,” ujarnya lagi.

HNW sadar, dalam perkara pengujian UU dikenal adanya prinsip ‘presumption of constitutionality’. Yakni suatu UU yang sedang

diuji di MK dianggap konstitusional sampai MK memutuskan sebaliknya. "Memang dikenal prinsip semacam ini. Namun, ini berlaku untuk pihak lain. Sedangkan, bagi MK selaku lembaga hukum tertinggi yang menguji dan memutus harus berhati-hati bertindak terhadap UU yang sedang diuji untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dan imparsialitasnya," tambahnya.

Meski begitu, HNW yakin, para hakim MK dapat memutus pengujian UU IKN ini secara objektif dan adil, dengan melihat prosedur maupun substansi yang bermasalah dari UU IKN maupun yang terkait dengan IKN. "Karenanya, tindakan sembrono dari Sekjen MK itu patut dikoreksi, termasuk oleh Pimpinan MK sendiri. Agar para hakim konstitusi yang negarawan itu tetap bisa dipercaya oleh Rakyat, karena tidak terpengaruh oleh tindakan Sekjen-nya sendiri, sehingga benar-benar dapat berlaku adil dan objektif memutus perkara UU IKN yang dipersoalkan oleh banyak pihak tersebut," pungkasnya. ❑

# Soal Isu Perusahaan Sawit Sponsori Usulan Penundaan Pemilu

**Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan, perlu mewaspadai dan menolak masuknya kepentingan oligarki dengan melanggengkan kepentingan mereka dengan penundaan Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden.**

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menyatakan, MPR tak pernah luput dari tugasnya mengawal Konstitusi. Juga mewaspadai dan menolak masuknya kepentingan oligarki dengan berbagai daya dan upaya untuk melanggengkan kepentingan oligarkhis mereka dengan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Apalagi dengan menunggangi isu amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Pernyataan ini disampaikan HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, mengomentari pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Sebelumnya, salah seorang politisi PDI Perjuangan mengaku memperoleh informasi dugaan korupsi terkait minyak goreng yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar merupakan bentuk sponsorsip untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024. Sekaligus memperpajangan masa jabatan, bahkan konon juga untuk membayari MPR.

"Informasi yang disampaikan saudara Masinton tersebut memang perlu diverifikasi kebenarannya. Bahkan, bagus sekali bila beliau buka-bukaan soal informasi yang menghebohkan ini. Siapa saja pihak perusaahan kelapa sawit yang sudah merugikan bangsa dan negara akibat migor (minyak goring) langka dan mahal, dan malah terlibat dalam persekongkolan jahat itu. Kejagung hendaknya segera menindaklanjutinya dengan mengusut tuntas dan nantinya memberikan sanksi hukum yang keras bila informasi itu terbukti benar adanya," ujarnya di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Bila informasi itu benar, kata HNW, maka tindakan tersebut merupakan jenis kejahatan hukum dan pelecehan terhadap konstitusi secara serius. Karena, telah menyeret MPR ke dalam fitnah yang mencoreng nama dan marwah MPR. Padahal, MPR sebagai benteng penjaga, pembuat, dan penyosialisasi Konstitusi, sejak tahun lalu sudah menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

"Badan Pengkajian MPR beserta seluruh Fraksi dan kelompok DPD di MPR sudah sepakat tidak mengamandemen UUD terkait PPHN untuk menutup pintu yang ada agar tidak ditunggangi oleh agenda selundupan amandemen guna memperpanjang masa jabatan Presiden," ujarnya.

Wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden, menurut HNW, hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 via MPR. Oleh karenanya, ia mengatakan selaku pimpinan MPR akan terus komitmen tegak lurus menaati Konstitusi, yang sudah jelas mengatur masa jabatan Presiden maksimal dua periode, dan Pemilu setiap lima tahun.

Juga menguatkan komitmen Pimpinan MPR serta kesepakatan bulat di BP MPR bahwa tidak ada amandemen UUD terkait perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Apalagi sikap Pemerintah. yakni dari Presiden Jokowi, Menkopolhukam dan Mendagri semakin jelas, dengan dilantiknya KPU dan Bawaslu berarti tidak ada perubahan terhadap agenda Pemilu serentak pada 14/2/2024," ujarnya.

Juga, seluruh lembaga survei, kata HNW, sejak Januari hingga April menyebutkan hasil yang sama bahwa mayoritas responden, termasuk yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, tidak setuju penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Bahkan, Presiden Jokowi akhirnya menegaskan bahwa beliau tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden, dan mengingatkan menterinya berhenti mewacanakan penundaan atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Presiden juga meminta para menteri fokus bersama KPU mempersiapkan tahapan menuju pelaksanaan Pemilu serentak pada 2024. Tetapi, di tengah peta sosial dan politik, yang sangat jelas, sangat disayangkan, ada saja oligarkhi dan pengekornya yang menjual isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Bahkan, kabarnya untuk itu akan membayari MPR.

"Ini adalah jenis kejahatan serius yang akan merusak demokrasi dan kepercayaan terhadap Konstitusi serta Lembaga-Lembaga Negara. Itu sangat membahayakan masa depan demokrasi dan NKRI. Karenanya, Kejagung perlu segera mengusut tuntas dan menghukum keras mereka yang melanggar hukum dan berbuat jahat terhadap Konstitusi. Mereka juga menyebar niat dan aksi kotor akan membayari MPR, suatu hal yang pasti akan ditolak oleh MPR," pungkasnya. ❑

**Bertemu CEO Daewoo**

# Bamsoet Dorong Investor Korsel Tingkatkan Investasi di Indonesia

"Korsel bisa tetap menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Baik dalam hal peningkatan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hingga pertahanan dan keamanan negara," ujar Bamsoet.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, bertemu dengan para pengusaha nasional Korea Selatan (Korsel), antara lain CEO Pax Global Group Michael Souceo, CEO Daewoo Oil and Gas Daegon Kim, dan Ketua Daewoo Global Management Institute Byung-Ju Chang. Makan malam dilakukan Sabtu (7/5/22) di Samcheonggak, rumah makan tradisional terkenal di Seongbuk-dong, Seoul, Korsel.

Meski kedatangan Bamsoet di negeri Gingseng bukan kunjungan resmi, namun langkah ini merupakan bagian dari diplomasi kuliner, menghormati sajian khas tradisional negara yang dikunjungi. Sambil membicarakan berbagai prospek hubungan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya yang bisa dibangun oleh Indonesia dan Korsel.

"Ada beberapa hal yang kita bahas. Antara lain, investasi di pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, eksplorasi minyak dan gas di berbagai wilayah Indonesia, hingga kerjasama biomedis yang kini sedang menjadi tren investasi menjanjikan dunia," ujar Bamsoet usai makan malam didampingi Wakil Duta Besar RI untuk Korsel, Zelda Wulan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain meningkatkan investasi, berbagai pertemuan dengan tokoh ekonomi Korsel juga bagian dari upaya memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan Korsel agar tidak terus menerus mengalami defisit. Pada tahun 2021, misalnya, total nilai perdagangan Indonesia dengan Korsel tercatat sebesar US$ 18,47 miliar, ekspor Indonesia ke Korsel sebesar US$ 8,98 miliar. Sementara nilai impor Indonesia dari Korsel US$ 9,42 miliar, sehingga defisit pada Indonesia mencapai US$ 446,7 juta.

"Sedangkan pada tahun 2020, neraca

perdagangan Indonesia - Korsel defisit sebesar US$ 341,8 juta, serta tahun 2019 defisit mencapai US$ 1,18 miliar," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebelumnya pada Jumat (6/5/22), dia juga bertemu pimpinan (Administrator) National Agency for Administrative City Construction (NAACC)/Kepala Otorita Nasional Pembangunan Kota Sejong Mr Park Mooik untuk meninjau perkembangan pembangunan Kota Sejong, Ibu Kota Administratif Korsel, yang dibangun untuk menggantikan Kota Seoul. Serta bertemu dua anggota parlemen Korea Mr Hong Seongguk dan dan Mr Kang Joon-hyun, untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Presiden Korsel yang baru, Mr. Yoon Suk-yeol, yang dilantik pada 10 Mei 2022.

"Kita harapkan di bawah kepemimpinan presiden yang baru dan dengan dukungan parlemen, Korsel bisa tetap menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Baik dalam hal peningkatan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hingga pertahanan dan keamanan negara," ujar Bamsoet.

Dalam kunjungan tidak resmi tersebut, Bamsoet juga diagendakan mengunjungi Hyundai Motor Company untuk melihat langsung mobil listrik Hyundai Genesis G80 Electrified special edition yang akan digunakan untuk para kepala negara G20 selama acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Denpasar Bali pada Oktober 2022 mendatang, dan akan mengunjungi terowongan penetrasi atau perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara sebelum kembali ke Jakarta. ❑

Terima Danjen Kopassus

# Perlu Pendekatan Tegas dan Humanis Selesaikan Konflik di Papua

MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI, termasuk di dalamnya Kopassus, dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan sepakat untuk mengedepankan pendekatan tegas dan humanis dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua. Sebagaimana juga sudah disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa usai bertemu Bamsoet pada November 2021 lalu. Sehingga pendekatan teknis yang digunakan lebih kepada operasi teritorial, bukan operasi tempur. Namun, jika diperlukan Kopassus siap lakukan operasi tempur guna menumpas sparatis yang mengganggu keamanan dan berupaya memisahkan diri dari NKRI.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Melalui forum MPR RI FOR Papua yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI, termasuk di dalamnya bagi Kopassus, dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua," ujar Bamsoet usai menerima kunjungan silahturahim Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan, di Jakarta, Selasa (26/4/22).

Turut hadir antara lain, Asintel Kopassus Letkol Inf Wing Sandya Udayanto, Aster Kopassus Kolonel Inf Edwin Apria Candra, Dansat inteltek Pusintelad Letkol czi Asep Sugiharto, dan Kasi Intel Grup 3 Kopassus Kapten Inf M.Rusdyanto Hadawang.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dibutuhkan keseragaman dan kesamaan pandangan semua stakeholder pemerintah untuk satu langkah menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan, bukan semata pendekatan operasi militer. Khususnya terhadap beberapa wilayah yang sering terjadi kontak tembak, antara lain di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak; Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga; Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga; Distrik Gome, Kabupaten Puncak; Distrik Mamberamo, Kabupaten Mamberamo Raya; dan Distrik Omukia, Kabupaten Puncak

"Pendekatan kesejahteraan tersebut antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Karena sumber konflik adalah akibat adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Untuk itu, dana Otsus harus benar-benar dikawal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, berbagai perangkat hukum memajukan Papua sudah tersedia. Antara lain melalui UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; serta Keputusan Presiden (Keppres) No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Tinggal pelaksanaannya yang harus dijalankan secara tepat dan cepat. Bercermin dari implementasi UU Otsus Papua, dari periode 2002 hingga 2021, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 138,65 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada kurun waktu 2005 sampai 2021, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp 702,3 triliun. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas dan output. Sehingga bisa memberikan kejelasan sejauh mana anggaran yang besar tersebut memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat," pungkas Bamsoet. ❑

## Kunjungi Dewa Rai Yasa Putra Sedana

# Bamsoet Ajak Lestarikan Seni Budaya Bali

**Hingga Maret 2022, jumlah turis asing yang datang ke Bali sudah mencapai 2 ribu orang. "Kita harap ke depannya akan terus meningkat," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.**

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Yayasan Yasa Putra Sedana di bawah kepemimpinan Ketua Dewa Rai Budiasa yang telah memberikan banyak kontribusi dalam memajukan dan menjaga seni budaya Bali. Salah satunya dengan mengadakan pagelaran Balinese Show melalui paket wisata Barong dan Legong yang hadir sejak tahun 1995. Dipentaskan di Jro Pengaji Yasa Putra Sedana, Kabupaten Gianyar, Bali.

"Bahkan pada saat puncak peringatan HUT Gianyar ke-251, di Alun-alun Gianyar, Selasa (19/4/22), paket wisata Barong dan Legong yang diinisiasi Yayasan Yasa Putra Sedana tersebut telah mendapatkan sertifikat Citra Raksata dari pemerintah Gianyar. Sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual masyarakat Gianyar," ujar Bamsoet usai menyaksikan Balinese Show, di Yasa Putra Sedana, Bali, Sabtu (30/4/22).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, paket Barong dan Legong diawali penampilan tari Pelegongan pilihan. Antara lain Legong Keraton, Kebyar Trompong, Oleg Tamulilingan, Cendrawasih, dan diakhiri dengan Barong Ngunying. Berbeda dengan penampilan di tempat lain, Yayasan Yasa Putra Sedana memberikan ciri khas berupa tempat pementasan yang terbuka. Sehingga antara penari, penabuh dan penonton, saling menyatu. Penonton secara khusus juga dapat memerhatikan komposisi gerak tari yang senada dengan tabuh pengiringnya.

"Setelah menyaksikan pementasan, wisatawan juga dapat menikmati makan malam di Natar atau halaman tengah Jro Pengaji. Diawali dengan pengenalan keluarga besar dan pengenalan rumah adat Bali yang sesuai dengan Asta Kusala Kusali," jelas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui paket wisata Barong dan Legong tersebut, Yayasan Yasa Putra Sedana setiap tahunnya mampu mendatangkan sekitar 2 ribu turis internasional ke Bali. Berkat keberhasilannya membina kesenian, Yayasan Yasa Putra Sedana juga pernah diundang mengikuti International Folklore Festival di Perancis pada tahun 2011 lalu.

"Kini seiring mulai meredanya pandemi Covid-19 di berbagai negara dunia, diharapkan bisa membangkitkan kembali geliat wisata di Bali. Terlebih turis internasional kini sudah diberikan banyak kemudahan masuk ke Bali, tentu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Hingga Maret 2022 lalu, jumlah turis asing yang datang ke Bali sudah mencapai 2 ribu orang. Kita harap kedepannya akan terus meningkat," pungkas Bamsoet. ❑

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**
Ketua MPR RI

# Idul Fitri
# Puncak Ibadah yang Menyatukan dan Menguatkan

BERSAMA komunitas muslim di seluruh dunia, umat Islam Indonesia pada 2 Mei 2022 merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Sebagai keutamaan yang mempersatukan, Idul Fitri menjadi puncak ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dihayati sebagai Hari Kemenangan, Idul Fitri pun menghadirkan kebahagiaan karena menjadi momen berkumpul dengan keluarga dan kerabat.

Rangkaian kegiatan menuju perayaan Idul Fitri hingga tradisi mudik adalah puncak kebersamaan yang mempersatukan. Kebersamaan dan persatuan itu sudah terwujud sejak umat bersama-sama mengawali puasa Ramadan. Umat melaksanakan salat tarawih bersama, tadarus bersama, dan melaksanakan kegiatan ibadah lainnya pun bersama-sama.

Menguatnya kebersamaan dan persatuan itu terus berproses saat masyarakat melakukan kegiatan amal, dan juga saat perjalanan mudik menuju kampung halaman untuk bertemu sanak saudara. Semuanya terukir indah karena umat fokus menyongsong Hari Kemenangan.

Semua kegiatan amal yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri selalu bersifat kolektif. Dari kegiatan amal itu, tercermin sifat gotong royong umat. Bulan suci Ramadan selalu memunculkan semangat dan keinginan untuk saling membantu guna mewujudkan semua amaliyah. Mereka yang berlebih membantu yang miskin, yang berpunya membantu yang fakir.

Ada amal jariah, sedekah dan zakat yang semuanya menunjukkan semangat kepedulian dan membantu sesama yang membutuhkan. Praktik kegiatan amal ini juga dibungkus dengan kearifan lokal. Tujuan utamanya adalah semua orang bisa merayakan Idul Fitri dengan gembira, sukacita, dan terbebas dari urusan-urusan yang memberatkan.

Itu sebabnya, bulan suci Ramadan dipahami dan dimaknai sebagai bulan penuh berkah. Sebab, pada momentum itulah terwujud kesatuan dan persatuan untuk membantu mereka yang lemah. Terlebih, kepedulian terhadap sesama diwujudkan dengan ketulusan bergotong royong sebagai roh pelaksanaan puasa Ramadan menuju hari yang fitri. Sesama umat Islam sesungguhnya bersaudara dalam iman, dan bersaudara dalam kemanusiaan dengan umat non muslim.

Umat paham bahwa esensi lain dari Idul Fitri adalah kemauan untuk peduli. Karakter peduli, yang sejatinya sudah menjadi karakter bangsa, hendaknya kembali digelorakan pada saat datangnya Idul Fitri. Mereka

yang berlebih berbagi melalui infak, sedekah, dan zakat.

Siapa pun didorong untuk menjadi pribadi yang tulus dalam berbagi. Tak harus banyak, karena nilai bukan yang utama melainkan ketulusan. Berbagi dan memberi kepada sesama yang lemah adalah wujud ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Sepanjang dua pekan menjelang Idul Fitri, puluhan juta masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman. Pemerintah pun telah berupaya memfasilitasi agar mudik tahun ini berjalan lancar, aman, dan membahagiakan.

Sebagai rutinitas tahunan di penghujung puasa Ramadan, pemerintah tentu memiliki banyak pengalaman. Dari pengalaman itu, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mudik Lebaran semakin membaik. Baik dari sisi infrastruktur jalan, regulasi, maupun pelayanan petugas di lapangan yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan mudik Lebaran.

Setelah dua tahun tak mengizinkan mudik Lebaran karena faktor pandemi Covid-19, tahun ini pemerintah membolehkan masyarakat mudik dengan berbagai persyaratan karena masih adanya ancaman dari pandemi Covid-19. Pemerintah pun telah menetapkan Hari Libur Nasional Idul Fitri pada 2-3 Mei 2022, sedangkan cuti bersama Lebaran 2022 berlangsung selama empat hari, 29 April dan 4-6 Mei 2022.

Dengan kebijakan membolehkan mudik, pemerintah berkewajiban mengawal para pemudik agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Presiden Joko Widodo bahkan sudah mengingatkan semua jajaran pemerintah agar mengelola pelaksanaan mudik 2022 dengan tepat dan ketat, untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan jajaran Kabinetnya untuk memerhatikan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang mudik lebaran dan Idul Fitri tahun ini.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H,
Mohon Maaf Lahir Bathin.

Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944

# Membangun Kerukunan Umat Beragama

## Harus Menjadi Upaya Berkesinambungan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menghadiri Dharmasanti Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944, sekaligus Sosialisasi Empat PIlar MPR RI. Dalam kesempatan itu, Bamsoet menekankan bahwa moderasi beragama telah menjadi isu global, sebagai jawaban atas maraknya intoleransi yang menyebabkan kebebasan beragama di seluruh dunia mengalami tekanan.

Hari Toleransi Internasional setiap tanggal 16 November yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berangkat dari kenyataan bahwa sikap intoleransi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama, merupakan ancaman yang harus disikapi bersama oleh komunitas global. Sejarah mencatat, banyak Negara, termasuk negara-negara maju di Eropa, pernah mengalami masa kelam akibat terjadinya kekerasan atas nama agama.

Moderasi beragama bukanlah mengabaikan ajaran nilai agama, karena sesungguhnya nilai agama akan selalu melekat dan mewarnai kehidupan keseharian dan kebangsaan. Mengajarkan untuk menjaga hubungan silaturahim yang harmonis dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Pada dasarnya, agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan tercela, karenanya jangan sampai karena mengatasnamakan agama, justru membuat banyak dosa dan perbuatan tercela.

"Di Indonesia, relasi antara agama dan negara telah diatur sedemikian khas. Indonesia bukan negara agama yang berdasar pada satu agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai sila pertama Pancasila," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersamaan dengan Dharmasanti Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Ahad (10/4/22).

Turut hadir secara virtual Presiden Joko Widodo, Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Hadir secara langsung, antara lain Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Anggota MPR/DPR RI I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, serta Ketua Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru

Saka 1944 Brigjen TNI Putra Widiastawa. Hadir pula musisi Dewa Budjana dan Tri Utami.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersamaan dengan Dharmasanti Nasional semakin melengkapi rangkaian Perayaan Hari Suci Nyepi. Dharmasanti adalah acara simakrama atau silaturahim yang bertujuan membangun kerukunan, kedamaian, dan harmoni antarumat dengan dilandasi sikap moderasi dalam beragama, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.

"Martabat kemanusiaan seseorang tercermin dari caranya menghormati orang lain, dan seberapa kuat komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai nilai persahabatan dan persaudaraan antarsesama manusia. Dalam konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai filosofis dari ajaran Tat Twam Asi yang merupakan ajaran moral yang bernafaskan agama Hindu, selaras dengan rumusan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, membangun moderasi beragama merupakan sebuah keniscayaan 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, bagi Indonesia, membangun moderasi beragama sangat penting. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk sejak kelahirannya. Di sini hidup 273 juta penduduk yang menganut 6 agama berbeda yang diakui oleh negara, serta puluhan aliran kepercayaan. Dengan kemajemukan tersebut, moderasi beragama akan menjadi faktor kunci terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama.

"Kerukunan umat beragama yang menjadi landasan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi berkembang dinamis. Sebagaimana terlihat dari indeks kerukunan umat beragama di Indonesia yang mengalami pasang dan surut. Misalnya di tahun 2017 dengan capaian indeks 72,27, tahun 2018 turun menjadi 70,9, tahun 2019 kembali naik menjadi 73,8, tahun 2020 turun menjadi 67,46, dan tahun 2021 naik kembali menjadi 72,39. Dinamika ini mengisyaratkan pesan penting, bahwa membangun kerukunan umat beragama harus menjadi upaya berkesinambungan," pungkas Bamsoet. ❑

# Seruan Menaati Konstitusi dari Wakil Ketua MPR

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengingatkan, setelah amandemen, pasal-pasal dalam UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan. Seperti masalah kedaulatan. Sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan tidak lagi berada di MPR atau pejabat eksekutif, melainkan di tangan rakyat. Pasal tersebut berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

"Yang memilih Presiden adalah rakyat, bukan MPR. Demikian juga Gubernur, Bupati, Walikota, dan berbagai pejabat publik lainnya. Sehingga kebijakan yang diambil eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah, tidak boleh menabrak ketentuan konstitusi. Selalu mempertimbangkan aspirasi dan maslahat rakyat. Sehingga para pimpinan bangsa harus memahami aturan-aturan dalam konstitusi untuk dijalankan," kata Hidayat Nur Wahid pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan MPR bekerja sama dengan Forum Birokrat Masyarakat (FBM) yang melibatkan banyak RT & RW di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2022).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum FBM Ahmad Sahal, Anggota Dewan Kota Jakarta Selatan Dr. Said Kutub, Ketua FBM Kota dan Kecamatan se-Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Perwakilan Lembaga Musyawarah Kelurahan, hingga ketua RW dan ketua RW se-Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Turut hadir pula struktur DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta hingga DPD se-Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Bila ada ajakan untuk melakukan uji melanggar konstitusi, menurut HNW — panggilan akrab Hidayat Nur Wahid — wajarnya ditolak. Karena pelanggaran ketentuan konstitusi, termasuk masalah perpanjangan masa jabatan Presiden, tidak membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, malah membahayakan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, yang berdampak negatif kepada harmoni yang kuatkan NKRI.

HNW menilai, kedaulatan rakyat belakangan ini banyak diabaikan atau dimanipulasi oleh segelintir pejabat. Misalnya, dalam isu Presiden 3 periode. "Ada yang mengklaim memiliki 110 juta (*big data*) pendukung tiga periode, ada yang memanipulasi dukungan ulama Banten, ada pula yang memanipulasi forum kepala desa (Apdesi) untuk mendukung agenda tersebut. Mereka mengira warga tidak paham konstitusi. Tapi, setelah dijelaskan muncullah bantahan oleh banyak pihak yang berkompeten, dan mementahkan manuver tak bertanggung jawab itu. Karena konstitusi dengan sangat jelas membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode, dan per 5 tahun di selenggarakan Pemilu. Ketentuan itu tertulis tegas dalam konstitusi," katanya.

HNW mengajak pimpinan dan tokoh masyarakat memahami konstitusi dengan baik dan benar, agar bisa menghadirkan harmoni bagi masyarakat. Dan, tidak mudah diadu domba oleh isu-isu inkonstitusional.

HNW juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dan aturan yang sudah disepakati harus ditaati bersama. Seperti soal masa jabatan Presiden maksimal 5 tahun . Juga keputusan KPU dengan DPR dan Pemerintah pada 24/1/2022 bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Jika konstitusi yang berlaku mudah dilanggar dan diubah-ubah untuk kepentingan kekuasaan dan oligarki, bisa berdampak pada munculnya friksi dan disharmoni di kalangan masyarakat akar rumput.

Maka, upaya-upaya melawan konstitusi itu penting dikoreksi dan dicegah, juga oleh pengurus RT, RW, Lurah, dan seluruh pemimpin masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Rakyat. "Semua upaya memanipulasi itu bukan lagi demokrasi, melainkan democrazy, yang membahayakan kesatuan warga dan masa depan NKRI," ujarnya.

"Demokrasi membuka ruang agar aturan yang ada ditaati, dan konstitusi dipedomani secara jujur dan konsisten. Serta suara rakyat benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu adalah suatu hal konstitusional ketika rakyat bersikap kritis dan menolak pihak-pihak yang hendak melanggar kesepakatan bersama yang sudah tertuang dalam konstitusi kita," lanjutnya.

Hadirnya koridor konstitusi, kata HNW, pada dasarnya adalah untuk merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka. Di antaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Termasuk untuk warga di tingkat desa/kampung dengan pimpinannya para Lurah,

RW dan RT.

Yang terjadi sekarang, alih-alih memakmurkan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah banyak tidak mendengarkan jerit kesusahan rakyat, dengan kenaikan harga-harga. Seperti harga minyak goreng, tahu tempe, BBM, hingga listrik. Ditambahi dengan manuver-manuver untuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Dalam kondisi demikian wajar bila rakyat mengkritisi dan mempertanyakan arah demokrasi Indonesia.

"Kedaulatan di tangan rakyat, dengan harapan kebijakan negara dapat membawa maslahat bagi rakyat, serta mengamalkan dasar negara Pancasila yang sila kelimanya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah makna demokrasi Indonesia yang tidak boleh ditabrak oleh siapa pun dengan dalih apapun, termasuk untuk perpanjangan masa jabatan Presiden.

Dalam kondisi sulit akibat Covid-19, mestinya semua pihak menjaga harmoni, menghindari friksi dan ketegangan sosial, akibat adanya upaya menentang Konstitusi. Semua ini akan bisa dihindari bila para pemimpin bangsa memahami dan melaksanakan Empat Pilar MPR-RI, termasuk dalam mengamalkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara baik, benar, dan konsisten," pungkasnya. ❑

**MBO**

# MPR RI bersama BPIP Akan Gelar Lomba Vokal dan Visualisasi Lagu 'Pancasila Edukasi'

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Andi Widjajanto dan Yayasan Generasi Lintas Budaya (GLB) pimpinan Raja Asdi dan Olivia Zalianty, akan memproduksi Hymne Pancasila 'Jiwaku adalah Pancasila' dan Lagu 'Pancasila Edukasi'. Sekaligus mengadakan lomba vokal dan visualisasi lagu 'Pancasila Edukasi' antardesa, dengan tajuk Membumikan Pancasila, Mengabadikan Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, di Indonesia terdapat 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jika seluruh desa bisa berpartisipasi, maka akan ada 83.381 tipe vokal dan visualisasi lagu 'Pancasila Edukasi' yang dibuat para milenial desa, dengan memanfaatkan kearifan lokal dan kekayaan seni budaya masing-masing desanya.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari cara kreatif MPR RI, BPIP, dan Yayasan Generasi Lintas Budaya dalam memasifkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bangsa. Lagu 'Pancasila Edukasi' berisi pesan kebangsaan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat," ujar Bamsoet usai menerima Kepala BPIP Yudian Wahyudi, di

Jakarta, Senin (25/4/22).

Rencananya, kata Bamsoet lebih lanjut, juga akan melibatkan anak-anak muda kreatif yang aktif di berbagai platform media sosial, seperti Atta Halilintar, Irfan Hakim, Raffi Ahmad, maupun berbagai influencer lainnya. "Pelibatan mereka sangat penting, karena dengan kekuatan digital yang masing-masing mereka miliki, para influencer tersebut bisa memberikan dampak signifikan kepada berbagai kalangan," katanya.

Turut hadir jajaran dari BPIP, antara lain Sekretaris Utama Karjono, serta Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Prakoso. Hadir pula dari Yayasan Generasi Lintas Budaya (GLB), antara lain Penanggung Jawab Raja Asdi dan Ketua Olivia Zalianty.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kick off informasi teknis lebih lanjut tentang Lomba Vokal dan Visualisasi lagu 'Pancasila Edukasi' rencananya dilakukan pada Juni 2022. Setelah itu, para peserta yang berminat mengikuti lomba bisa mengupload vokal dan visualisasi lagu 'Pancasila Edukasi' versi mereka ke *channel Youtube* mereka masing-masing. Limapuluh peserta terbaik akan dipilih dewan juri untuk kembali berkompetisi, hingga terpilih 10 besar yang akan masuk ke babak grand final.

"Para Dewan Juri direncanakan terdiri dari berbagai kalangan, antara lain: Slamet Rahardjo, Ndoro Kusumo, Marcella Zalianty, Reza Rahadian, Cinta Laura, Prilly Latuconsina, Shanna Shannon, dan Erwin Gutawa. Puncak acara pengumuman pemenang rencananya akan dilakukan pada 30 Desember 2022, sebagai bagian dari peringatan Hari Pluralisme. Sepanjang Juni hingga Desember 2022, di setiap bulannya kita akan buat live event menarik terkait lomba tersebut," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui lomba tersebut diharapkan dapat mendorong kreativitas generasi milenial dalam memahami falsafah dan nilai-nilai Pancasila, berlandaskan kearifan budaya lokal setempat. Sekaligus meningkatkan kepekaan serta kepedulian milenial di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang mempunyai karakter kuat, berjiwa Pancasila dan berhati Indonesia, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Mengingat saat ini bangsa Indonesia telah menginjakkan kaki pada periode Bonus Demografi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif yang didominasi kaum muda, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional," pungkas Bamsoet. ❑

**Seminar Politik**

# Bamsoet Resmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di Bali

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, meresmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di Taman Agung Proklamasi, Bali. Tidak sekadar dalam bentuk fisik, nilai penting kehadiran Monumen Empat Pilar MPR RI tersebut juga untuk menjadi penyemangat dan penanda bahwa vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR RI harus terus digencarkan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga bisa membangun imunitas jati diri dan karakter kebangsaan yang kuat dalam menangkal berbagai ancaman virus ideologi yang dapat memecah belah kemajemukan bangsa dan kedaulatan Indonesia.

"Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus bentuk kedaulatan Negara; dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa," ujar Bamsoet usai meresmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di

Bali, Jumat (29/4/22).

Turut hadir, antara lain Ketua Umum Yayasan Mahendradatta Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry, Rektor Universitas Mahendradatta Ni Ketut Wiratny, dan Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno Gus Marhaen.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi kiprah Yayasan Kepustakaan Bung Karno di bawah kepemimpinan Gus Marhaen yang mengelola Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila. Seluruhnya berlokasi di Bali. Kehadirannya

telah merawat barang-barang milik Bung Karno seperti koleksi buku, pidato, tulisan, sepeda, meja hingga ranjang tidur.

"Tidak hanya merawat benda fisik peninggalan Bung Karno, Yayasan Kepustakaan Bung Karno melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila, juga telah merawat semangat dan cita-cita Bung Karno dalam menjaga kemerdekaan Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila juga bisa menjadi pilihan destinasi wisata yang menarik bagi para turis. Khususnya bagi turis yang ingin mengenal lebih jauh sosok Bung Karno sebagai pendiri sekaligus proklamator Indonesia.

"Taman Agung Proklamasi, misalnya, di sini terdapat miniatur kediaman Bung Karno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, tempat bersejarah dibacakannya teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Di lokasi aslinya, kediaman Bung Karno sudah tidak ada lagi, karena sudah dibangun Tugu Proklamasi. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui seperti apa wujud kediaman Bung Karno tersebut, bisa datang ke Taman Agung Proklamasi, Bali," pungkas Bamsoet. ❑

**MPR**
**RUMAH KEBANGSAAN**
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**

MAJELIS
EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA
Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

# Siti Fauziah: PNS Harus Mampu Menjadi Perekat dan Pemersatu Bangsa

PLT. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., membuka secara resmi Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen MPR RI. Acara digelar di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Diikuti 29 orang CPNS yang telah lolos berbagai tahapan seleksi.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah yang akrab disapa Ibu Titi ini mengungkapkan beberapa hal penting yang harus dipahami oleh para CPNS tentang makna dan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertama, menjadi seorang PNS artinya menjadi aparatur pemerintah, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, PNS memiliki tugas memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Selain itu, lanjutnya, PNS dituntut mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan memersatukan masyarakat dalam wadah NKRI.

“Kenapa hal ini sangat ditekankan, sebab negara kita adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan semuanya harus tetap bersatu agar NKRI selalu tetap terjaga,” tegas Ibu Titi.

Ada satu momen yang unik dilakukan Ibu Titi di tengah-tengah sambutannya. Untuk mengendurkan suasana tegang yang dialami para peserta orientasi, ia membuka dialog interaktif dengan melemparkan pertanyaan kepada peserta tentang Empat Pilar MPR.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab secara tepat oleh salah seorang CPNS. “Seperti itulah aparatur pemerintah, berani dan menguasai semua hal tentang kebangsaan. Salah satunya Empat Pilar MPR ini,” puji Ibu Titi, dibarengi tepuk tangan riuh peserta lain.

Dalam kesempatan itu, Ibu Titi juga mengulas tentang pentingnya CPNS untuk mencintai, memahami, menguasai, dan mengimplementasikan budaya serta karakter bangsa Indonesia yang sangat dikenal dengan kesantunan, kedisplinan, dan keramahannya.

Di sini Ibu Titi kembali melemparkan pertanyaan dadakan untuk memancing semangat peserta. “Siapa di antara kalian yang menguasai budaya daerah, seperti tarian dan lagu daerah?” tanyanya. Ibu Titi langsung mengangkat dua jempol, ketika ada beberapa peserta mengangkat tangan.

“Ketika kaum milenials tidak lupa budaya dan jati dirinya di tengah gempuran budaya modern, seperti Kpop dan Barat, maka kita bisa berharap banyak Indonesia maju di masa depan,” tambahnya.

Di sesi akhir, mewakili Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR, Ibu Titi memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang lolos menjadi CPNS Setjen MPR RI. “Semoga kalian menjalaninya dengan baik. Lalu, ketika lolos dan ditetapkan menjadi PNS, kalian bisa menjaga serta menjalankan kepercayaan tugas dan jabatan yang akan kalian emban,” tandasnya. ❑

**DER**

**Lestari Moerdijat, SS, MM.** Wakil Ketua MPR

# Perempuan Indonesia Harus Berani Membawa Perubahan

HARI Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April menjadi tonggak perjuangan kaum perempuan dalam kesetaraan gender dan persamaan hak lainnya. Kini, perjuangan kaum perempuan itu membuahkan hasil. Indonesia pernah dipimpin seorang wanita, yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketua DPR saat ini (periode 2019 – 2024) juga seorang perempuan, yaitu Puan Maharani yang juga puteri dari Megawati Soekarnoputri. Beberapa menteri dalam kabinet diisi kaum perempuan. Dan, sekitar 20% keterwakilan perempuan di parlemen. Tidak terhitung perempuan yang duduk di posisi puncak di pemerintahan maupun swasta.

Berkaitan dengan posisi dan peran perempuan, *Majelis* mewawancarai Wakil Ketua MPR yang juga perempuan, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM. Berikut perbincangan dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem ini. Petikannya.

**Apa makna Hari Kartini buat Ibu?**

Makna Hari Kartini bagi saya adalah berjalan dan berubah sesuai perjalanan waktu dan usia. Di waktu kecil Hari Kartini itu adalah karnaval, sebuah seremoni rakyat yang menunjukkan betapa besar seorang Kartini bagi rakyat. Kita memakai baju adat daerah, budaya daerah dan lainnya, seusia SD seperti itu. Waktu SMP mulai ada dimensi yang berbeda dalam memaknai Hari Kartini, seperti mulai banyak membaca sejarah perjuangan Kartini.

Makin dewasa makin berkembang satu pemahaman tentang makna dari Hari Kartini. Saya melihat Kartini ini adalah sebuah simbol dari sebuah usaha bagaimana perempuan itu mampu membebaskan dirinya dari keterkungkungan budaya, mampu memberikan ruang kepada dirinya untuk mengoptimalkan kapasitasnya dan memanfaatkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini. Di situ saya memaknai Hari Kartini.

Beliau adalah pejuang perempuan yang luar biasa, yang sudah bekerja melampui zamannya pada saat itu dengan berbagai macam pemikirannya. Tapi yang mesti kita pegang teguh dan ingat bahwa Kartini adalah orang yang sudah membuka ruang kesetaraan gender yang sampai saat ini masih kita perjuangkan, yakni kebebasan perempuan untuk bersikap, berpendapat, menentukan arah kehidupan.

Dan, kita sebetulnya mendapat hadiah di Hari Kartini ini dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU. Kita menunggu Permennya. Tapi, intinya, Kartini memberikan contoh kepada kita semua untuk berani berbuat, berani melakukan tindakan-tindakan, termasuk melakukan pengorbanan yang luar biasa.

**Kalau dari sisi politik, bagaimana menurut Ibu, keterwakilan perempuan di parlemen? Apakah keterwakilan perempuan di parlemen sudah memadai?**

Kalau soal keterwakilan Kartini-Kartini di parlemen sekarang ini, alhamdulillah setiap

tahun bertambah. Saya lihat keterwakilan perempuan pada periode sekarang jauh lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Era reformasi telah memberi ruang baru untuk kaum perempuan agar bisa berpartisipasi dalam bidang politik.

Ada sejumlah undang-undang yang mengharuskan kehadiran dan ruang kaum perempuan untuk berkiprah dengan memberikan porsi 30% kepada perempuan, diantaranya, UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Juga pada UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 ayat (1) Huruf (d).

Kehadiran perempuan dalam semua diskursus tidak hanya dalam tataran kesetaraan, namun untuk memberi afirmasi agar hadir dalam semua bidang kehidupan. Peran perempuan dalam politik tidak perlu diragukan sebab banyak perempuan di Indonesia dari dulu hingga saat ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Kemampuan kaum perempuan yang bisa keluar dari berbagai tantangan inilah yang membuat mereka mampu sebagai kelompok pendobrak tembok penghalang. Saya mengajak seluruh perempuan Indonesia mengambil peran dan berani membawa perubahan.

Namun, harus diakui keterwakilan perempuan di parlemen memang belum tercapai atau belum memadai. Baru Fraksi Parati NasDem yang sudah 30% tercapai keterwakilan perempuan di parlemen. Mengapa keterwakilan perempuan 30% belum tercapai? Kami melihat, pertama mungkin karena keterwakilan perempuan dilihat semata-mata hanya memenuhi persyaratan administrasi saja.

Kedua, memang sulit sekali mencari perempuan yang mau berkprah di parlemen. Perempuan berkualitas banyak, namun apakah mereka siap untuk terjun ke partai politik dan kemudian berkiprah di parlemen. Kendalanya sangat kompleks, antara lain karena budaya, tradisi atau periizinan dari keluarga. Perempuan memiliki kapasitas politik mumpuni tapi belum memungkinkan bagi dirinya mengambil sebuah keputusan penting untuk terjun ke ranah politik.

Saya sendiri berbasis awal di profesional. Tapi, bersyukur keluarga saya dan keluarga besar saya sangat mendukung sehingga sampai saat ini saya bisa memaksimalkan kapasitas kemampuan saya untuk terjun ke politik menjadi kader parpol dan menjadi wakil rakyat.

**Dengan jumlah keterwakilan perempuan (perempuan parlemen/ politisi perempuan) saat ini di parlemen, bagaimana Ibu melihat peran wanita di parlemen?**

Peran wanita di parlemen sangat luar biasa. Kapasitas mereka memang tidak kalah sebab kebanyakan memiliki basis kegiatan yang sangat dekat dengan lingkungan dan masyarakat. Ketika mereka berkiprah di parlemen, mereka sudah terbiasa berjibaku untuk kepentingan rakyat. Ke depan keterwakilan perempuan ini harus lebih ditingkatkan. Bukan hanya dilihat semata-mata hanya memenuhi persyaratan administrasi saja, tapi harus melihat kapasitas dan kemampuan perempuan

**Apakah perempuan parlemen sudah memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen, misalnya melalui penyusunan undang-undang yang berpihak pada kaum perempuan?**

Perempuan di parlemen dari semua partai sangat berdedikasi tinggi dalam kiprahnya sebagai wakil rakyat. Bahkan para wakil rakyat perempuan di parlemen saling bersinergi lintas partai demi rakyat. Memang banyak sekali kendala dan halangan. Perempuan di parlemen seperti menghadapi tembok kaca yang tebal. Tapi kita harus mampu memecahkan kaca tersebut atau halangan dan kendala besar tersebut, walaupun tangan kita terkena serpihan kaca dan sedikit terluka. Semua itu harus dihadapi demi kepentingan rakyat. Seperti RUU TPKS. Kita berjuang agar menjadi UU untuk melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan.

**Apakah masih ada kendala yang dihadapi perempuan parlemen dalam menjalankan tugas-tugasnya?**

Kendala dalam menjalankan tugas-tugas tentu saja ada. Saya yakin kaum perempuan yang berkiprah di parlemen mampu kok melewati berbagai tantangan dan kendala tersebut.

**Apa yang masih harus diperbaiki untuk meningkatkan perwakilan dan peran perempuan di parlemen?**

Sekali lagi, peran perempuan dalam politik tidak perlu diragukan sebab banyak perempuan di Indonesia dari dulu hingga saat ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Mereka mampu sebagai kelompok pendobrak tembok penghalang. Saya mengajak seluruh perempuan Indonesia mengambil peran dan berani membawa perubahan.

Tekad untuk 2024, keterwakilan perempuan di parlemen harus terisi penuh. Ini bukan hanya sekadar syarat yang diberikan kepada partai politik dalam melakukan pencalonan tetapi betul-betul memberi tempat bagi perempuan untuk menjadi wakil rakyat di parlemen.

Dalam perjuangan kaum perempuan, memang masih ada selubung-selubung budaya, tradisi, bahkan dibalut dengan agama yang cenderung membatasi peran perempuan. Dulu ada persepsi bahwa kaum perempuan 'konco wingking' yang tugasnya hanya mengurus masalah rumah tangga atau domestik.

Ruang politik yang diberikan kepada kaum perempuan harus mampu memberikan dan menawarkan nilai, manfaat, dan hasil bagi kaum perempuan. Kita perempuan harus bisa menjelaskan manfaat bila kaum perempuan menapaki bidang politik.

**Apa yang menjadi harapan Ibu untuk kaum perempuan ke depan?**

Saya mengajak perempuan Indonesia untuk berani berkiprah dalam bidang apapun di negeri ini. Tentu kiprah yang baik dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Berikan pemahaman yang betul dan bisa dipahami bahwa kiprah kaum pertempuan tidak akan menyalahi berbagai batasan kodrat dirinya sebagai perempuan. Lalu untuk partai dibutuhkan komitmen partai untuk memberikan peluang kepada perempuan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan politik partai, tidak hanya sebatas pengisi kuota administrasi saja, tapi betul betul diberikan kepercayaan yang sama dengan laki-laki untuk menunjukan potensi dirinya. +

# Menjadi Jubir Presidensi G 20 *Adalah Kebanggaan*

*Maudy Ayunda*

ARTIS **Maudy Ayunda** termasuk sangat beruntung. Pemilik nama lengkap Ayunda Faza Naudya mendapat kepercayaan menjadi juru bicara pemerintah untuk Presidensi G-20 Indonesia. "Kepercayaan ini adalah kebanggaan yang harus saya syukuri dan jalankan dengan baik," kata Maudy Ayunda seperti dilansir kanal *YouTube* Sekretariat Presiden, Kamis (31/3/2022).

Maudy mengaku, tidak berpikir lama saat ditawari menjadi jubir pemerintah selama berlangsungnya Presidensi Indonesia di G-20. Begitu ditawari langsung setuju. "Ini tugas bersejarah harus disambut dengan suka cita dan optimisme," ujar artis yang memulai kariernya ketika bermain dalam film "Untuk Rena," produksi Miles Films pada tahun 2005.

Dalam siaran perdana sebagai Jubir Pemerintah untuk Presidensi G-20 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/4/2022), Maudy menjelaskan Presidensi G-20 Indonesia mengusung tema: "Recover Together, Recover Strong." Dan, keberhasilan Presidensi G-20 Indonesia, menurut Maudy, akan menjadi catatan sejarah yang membanggakan. ❑

**DER**

## Bantu Promosiin
# Pedagang Baju Muslim

DI BULAN Ramadan yang sangat suci bagi pemeluk agama Islam ini dimanfaatkan oleh artis **Celine Evangelista** untuk menunjukkan toleransi kepada saudara-saudaranya umat Islam. Caranya unik. Sebagai pemeluk Katolik, Celine ikut mempromosikan busana muslimah dengan cara mengenakan busana muslimah. Fotonya dipasang di kanal media social pribadinya.

Bagi artis yang bernama lengkap Princessa Celine Evangelista Monica Maureen Richelle Celine ini, perbedaan agama tidak menghalanginya untuk membantu melariskan dagangan para penjual busana muslimah. Dia mengaku, sama sekali tak memungut biaya endorse bagi pedangang baju muslimah. Semua ia lakukan secara cuma-cuma.

Menurut artis kelahiran Roma, Italia, ini banyak temannya tergiur dan ingin membeli busana muslimah yang dia promosikan itu. "Mereka lihat gue promoin hijab itu katanya 'itu hijab yang lo pakai adem deh, itu beli di mana sih. Jadi, gue bantuin promo," ungkapnya. ❑

**DER**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Celine Evangelista*

*Effendy Gazali*

# Jadikan Lomba
## Stand Up Comedy MPR Tradisi Positif

PAKAR Komunikasi Politik **Effendy Gazali** mengaku sangat mendukung kegiatan lomba Stand Up Com edy yang digelar MPR RI. "Saya berharap, gelaran lomba yang dilaksanakan MPR, seperti halnya pernah dilakukan DPR RI, juga akan menghasilkan komika yang bagus, *marketable* dan mampu berkibar secara nasional," ujar Effendi Gazali selaku Dewan Juri Babak Final Lomba Stand Up Comedy Rumah Kebangsaan MPR RI, Selasa (29/3/2022).

Dengan gaya bicara lugas, Effendy menyatakan, setuju ide Ketua MPR yang mengatakan, semua pejabat publik mestinya menggelar lomba kritik gaya stand up comedian ini. "Saya sangat setuju ide tersebut, jadi ada saluran rakyat untuk menyampaikan kritik tapi dengan bahasa dan gaya yang lucu," kata Effendi Gazali.

Menurut Effendi Gazali, kritik itu baik dan berdampak bagus buat pejabat publik yang dikritik, tapi tentu saja dengan metode penyampaian yang bijak dan beretika. ❑

**DER**

Pasar Ikan Balekembang Surakarta

# Destinasi Wisata Malam di Jantung Kota Solo

SAAT sore berganti malam, laktivitas olahraga yang umumnya mudah ditemukan di kawasan Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah, sudah tak terlihat lagi. Saat itu beberapa muda mudi tampak tengah beristirahat dengan tubuh penuh peluh. Mereka tengah melepas penat usai melakukan gerak badan. Beberapa di antara mereka sedang duduk sembari menikmati segarnya air mineral dalam kemasan.

Saat itu, suasana di kawasan Manahan pun terasa makin hening. Padahal Stadion Manahan menjadi salah satu kawasan yang nyaris tidak pernah terlelap. Tetapi, pada detik-detik pergantian siang dan malam, di wilayah tersebut tidak banyak aktivitas yang dilakukan.

Kedai makanan dan minuman yang berjejer di luar stadion pun terlihat masih lengang. Lampu-lampu di tempat itu tampak terang benderang. Para pemilik kedai tengah bersiap menyambut para pembeli yang segera akan berdatangan, tepat ketika senja benar-benar telah beranjak.

Di saat yang sama, beberapa jengkal dari lokasi Stadion Manahan, tepatnya di Jl. Balekambang para pedagang dari berbagai tempat pelelangan ikan mulai berdatangan. Ibarat kapal yang melempar jangkarnya, satu persatu mobil pengangkut ikan itu mengambil tempat parkir untuk menurunkan muatan. Hiruk pikuk dan teriakan para pedagang membuat suasana terasa lebih hidup dibanduing tempat lain.

Saat hembusan angin malam terasa semakin sejuk, tempat ini terasa semakin semarak. Bukan hanya pedagang yang sudah berkumpul, tetapi para pembeli juga sudah berdatangan. Uniknya, meski pembeli dan pedagang sudah bertemu, mereka tidak bisa langsung bertransaksi, sebelum kentongan tanda jual beli dibunyikan.

“Meski sudah tiba sejak sore tetapi pedagang dan pembeli tidak bisa langsung bertransaksi. Selama bulan Ramadan, proses jual beli dilakukan pukul 20.00 WIB, sementara hari biasa transaksi dilaksanakan pukul 19.00,” kata Ilyasa Mico Harwanto, Pengelola Balekambang Pasar Ikan dan Resto Solo kepada Majalah *Majelis* pada pekan pertama bulan Ramadan lalu.

Kesepakatan itu dipatuhi oleh seluruh pedagang ikan yang saat ini jumlahnya mencapai 25 orang. Mereka menjajakan berbagai jenis ikan, baik ikan laut maupun air tawar. Seperti patin, gurami, bandeng, tongkol, cumi, udang, kerang, kakap, kepiting hingga baby hiu. Berbagai jenis ikan laut didatangkan dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti dari Jepara, Rembang, Demak, Kendal, Gresik, Lamongan, Banyuwangi, Trenggalek, Pacitan, dan Cilacap. Sedangkan ikan air tawar didatangkan dari Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Waduk Kedung Ombo, kolam ikan di Klaten, Karanganyar dan Sukoharjo, serta sentra ikan air tawar di Blitar dan Tulungagung.

## Wisata Malam

Saat ini keberadaan Pasar Ikan Balekambang semakin populer di kalangan masyarakat Surakarta dan Solo Raya pada umumnya. Terbukti semakin banyak orang yang berkunjung ke pasar tersebut. Ada yang baru pertama datang, sekedar untuk melihat dan jalan-jalan. Ada yang berbelanja

untuk kepentingan rumah tangga. Dan, banyak lagi yang kulakan untuk bisnis, baik dalam bentuk ikan segar maupun usaha makanan hidangan berbahan ikan.

Di tempat ini, masyarakat yang berkunjung ke Pasar Ikan Balekambang tidak melulu hanya berbelanja ikan mentah. Pengunjung bisa juga menikmati aneka hidangan ikan di Balekambang Resto. Atau membeli ikan, kemudian dibersihkan dan langsung di masak di tempat yang menyediakan jasa membersihkan dan memasak ikan.

"Semakin malam aktivitas pasar semakin ramai. Karena para pedagang yang datang untuk kulakan memilih berbelanja pada malam hingga dini hari. Apalagi pada saat dinihari harga ikan cenderung lebih murah karena pembeliannya berbentuk grosiran," kata Ilyasa Mico.

Yang pasti, semua orang bisa mendatangi Pasar Ikan Balekambang tanpa membedakan kelompok umur maupun jenis kelamin. Pengunjung yang datang tidak harus melakukan transaksi. Mereka bisa sekedar jalan-jalan, ataupun untuk mengenalkan jenis-jenis ikan kepada anak-anaknya. Ini menarik, karena lokasi Surakarta jauh dari laut, sehingga bisa dimaklumi bila warga tidak familiar dengan berbagai jenis ikan laut.

Suasana malam di Pasar Ikan Balekambang yang terasa sejuk, juga mampu membuat setiap pengujung betah berlama-lama berada di sana. Situasi ini bisa dimungkinkan karena lokasi pasar tersebut berada tepat disebelah Taman Balekambang. Sehingga kesejukan dan ketenangan taman langsung berimbas ke pasar. Bukan itu saja, tempat parkir yang tersedia cukup luas, mampu menampung ratusan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor.

Ke depan Ilyasa Mico percaya pasar ikan yang dikelolanya akan semakin rame. Ia berharap, pedagang yang menjajakan barangnya di tempat tersebut juga akan terus bertambah. Demikian juga masyarakat yang berkunjung serta berbelanja ikan segar di tempat itu.

"Mudah-mudaah pada saatnya nanti, Pasar Ikan Balekambang ini benar-benar menjadi pusat transaksi ikan bagi masyarakat Solo Raya dan daerah-daerah disekitarnya. Semua bisa mendapatkan manfaat atas keberadaan pasar ini, baik secara ekonomi maupun pemenuhan gizi masyarakat," ujar Ilyasa Mico. ❑

**MBO**

## KH. Aus Hidayat Nur

# Sosok Nasionalis di Rumah Santri

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MUDIK saat perayaan Idul Fitri menjadi dambaan bagi semua umat Islam di perantauan. Demikian juga bagi anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( F PKS) MPR RI, KH. Aus Hidayat Nur. Hanya saja, sejak beberapa tahun terakhir, setelah orangtuanya meninggal, Aus tidak lagi mudik ke Garut sebagai tempat lahirnya. Bapak enam anak hasil pernikahannya dengan Hj. Susanti ini memilih pulang ke Kalimantan Timur, provinsi yang menjadi daerah pemilihannya.

Selama mudik yang berbarengan dengan masa reses anggota Legislatif, Aus Hidayat Nur mengisi kegiatannya dengan berbagai acara. Mulai dari berbuka dan salat tarawih bersama, silaturahim, menyampaikan ceramah dan kultum, hingga halal bi halal.

Di berbagai acara tersebut, Aus juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerap aspirasi warga. Bukan hanya warga yang menjadi kader dan konsituen. Tetapi juga masyarakat umum dan juga yang baru dikenal. Aus juga banyak mendatangi daerah-daerah yang belum dikenal sebelumnya. Dan, daerah-daerah yang belum pernah didatangi oleh anggota legislatif lainnya.

"Soal IKN, secara umum masyarakat Kaltim bisa menerima, dengan syarat berlangsung secara damai dan adil. Apalagi, Kaltim adalah provinsi yang majemuk dengan mayoritas warganya dari Pulau Jawa. Tetapi, rencana pemindahan IKN tidak membuat seluruh warga Kalimantan Timur bahagia. Ada yang risau dengan rencana kepindahan IKN. Di antaranya karena status kepemilikan tanah mereka jadi tidak jelas. Banyak warga transmigran yang belum mendapat sertifikat tanah padahal sudah lama menempati daerah di sana," kata Aus Hidayat Nur kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi seperti itu menimpa beberapa lembaga Pendidikan. Sejumlah pengurus pendidikan di Kaltim khawatir tanah yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar terancam berpindah tangan, menjadi kawasan perkebunan sawit atau ladang batubara milik para pengusaha. Sehingga munculnya rencana pemindahan ibukota malah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sebagian masyarakat, menurut Aus, merasa aneh dengan rencana kepindahan IKN. Bagi mereka proyek tersebut terkesan asing. Karena sejauh ini pemerintah daerah nyaris tidak dilibatkan. Seolah - olah rencana kepindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara itu jalan sendiri, tanpa mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah setempat.

"Pemindahan IKN menyisakan pekerjaan rumah yang sangat

besar. Antara lain persoalan sertifikat kepemilikan tanah serta tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah. Juga kesiapan infratruktur jalan yang masih jauh dari mencukupi. Kondisi jalan rusak berat. Sementara untuk membangun jalan di Kaltim butuh anggaran yang jauh lebih besar dibanding di pulau Jawa," kata Aus.

Meski paham terhadap risiko besar pemindahan IKN, Aus akan tunduk dan patuh terhadap putusan bersama, antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Baginya mengikuti hasil musyawarah mufakat jauh lebih baik daripada menentang arus besar pembangunan bangsa. Termasuk jika satu saat rencana pemindahan IKN ini tak jadi dilanjutkan.

Selain menampung aspirasi, pada reses yang berbarengan denggan perayaan Idul Fitri 1443 H, Aus juga mendapat banyak pertanyaan terkait fungsi, tugas, dan kewenangannya selaku anggota Komisi II DPR RI. Khususnya seputar kisruh perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita tidak perlu membuang waktu membahas perpanjangan jabatan Presiden. Itu tidak akan terjadi. Konstitusi kita tegas mengatur masa jabatan Presiden hanya dua periode," jelas Aus.

## Pemilu 14 Februari 2024

Yang penting, kata Ustad Aus, masyarakat harus tahu bahwa Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat, Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota juga bupati dan wakil bupati dilaksanakan pada 27 November 2024.

Menurut Aus, atmosfer dunia politik di tanah air akan berjalan stabil jika segalanya dijalankan sesuai dengan konstitusi dan aturan lain yang sah. Karena itu, pria kelahiran Garut, 20 Juli 1961, ini menganggap sengkarut masalah perpanjangan jabatan presiden sudah selesai. Semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan pemilu sudah harus membahas bagaimana pemilihan umum 14 Februari 2024 dilakukan dengan baik. Bahkan lebih baik dari pesta-pesta demokrasi sebelumnya.

"Kita harus komit terhadap konstitusi. Dan, jangan main-main dalam urusan politik, kasihan rakyat. Tugas presiden sangat banyak.

Seperti menurunkan harga minyak goreng dan BBM, juga bagaimana mengurangi impor agar ekonomi dalam negeri semakin bertumbuh," kata Aus lagi.

Sebagai politisi KH. Aus Hidayat Nur mensyukuri mandat dan dukungan masyarakat Kaltim yang menjadikannya sebagai anggota Lembaga Legislatif. Rasa syukur itu makin besar karena sadar bahwa sehari-hari ia lebih banyak hidup di Jakarta, jauh dari masyarakat yang memberi mandat. Namun dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi di tingkat pusat.

Terlepas dari penghargaan dan rasa terimakasihnya kepada warga Kaltim, Aus menilai ada baiknya juga Ia hidup jauh dari dapil. Dengan begitu Ia bisa membandingkan pembangunan di dapilnya dengan warga di tempat lain. Lalu memperjuangkan kesejahteraaan dan kesetaraan bagi masyarakat Kaltim agar tidak tertinggal dari daerah lain di Indonesia.

Aus Hidayat Nur sendiri dikenal sebagai anggota Legislatif yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Bukan hanya kepada kader dan simpatisannya, tetapi masyarakat umum yang belum mengenalnya pun senantiasa ia sapa dan dekati.

"Setiap minggu selama ada kesempatan saya selalu menyempatkan pulang ke dapil. Apalagi pada saat reses hampir bisa dipastikan saya selalu ada di daerah pemilihan," kata Ustad Aus lagi.

## Orangtua Biologios

Di kalangan Partai Keadilan Sejahtera, Aus bukanlah anak kemarin sore. Ia merupakan salah satu orangtua biologis dari partai yang sebelumnya bernama Partai Keadilan itu. Anak bungsu delapan bersaudara pasangan Oneng Sasmitha dan Yang Rakhail itu turut serta membidani lahirnya PK pada 1998. Kemudian, ia mendapat mandat untuk membangun dan mengembangkan Partai berlambang padi diapit dua bulan sabit dengan warna dominan oranye itu hingga di wilayah Indonesia Timur. Sampai akhirnya didaulat menjadi Ketua DPP PKS Wilda Banjabar dan Kalimantan (2002 – 2005)

Tugas serta kepercayaan berat yang diemban Aus dari PK dan PKS tak lepas dari kedekatannya dengan Ustad Hilmi Aminuddin, penggagas dan pendiri Partai Keadilan. Dari tangan Hilmi, Aus mendapat bimbingan untuk mengembangkan bakatnya di dunia politik. Bahkan, kedekatan keduanya sudah terjadi sebelum PK berdiri, tepatnya sejak Aus menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan aktif di masjid-masjid kampus.

Seolah mengetahui kemampuan Aus, Hilmy Aminuddin terus membimbing yuniornya itu. Kesungguhan Hilmi itu tak sia-sia karena di belakang hari Aus tumbuh sebagai sosok yang makin kuat. Ia berhasil menuntaskan setiap tugas yang diembankannya. Termasuk

ketika harus memabangun dan mengembangkan PKS di kawasan Indonesia Timur.

Kemampuan Aus menyelesaikan mandat yang diterima sesungguhnya tak hanya berkat polesan tangan dingin para seniornya. Karena di dalam tubuh ustad Aus sudah terlebih dahulu mengalir darah aktifis yang juga politisi yang disegani kawan dan lawannya. yaitu darah dari ayahnya, anggota Partai Nasionalis Indonesia yang juga tangan kanan Presiden Soekarno saat di tahan di Lapas Sukamiskin Bandung. Dia adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Oneng Sasmitha.

"Ayah adalah Kepala Pasukan Banteng di wilayah Priangan Timur, dari Garut sampai Bojong Lopang di wilayah Sukabumi di era Tentara Keamanan Rakyat. Beliau bertugas menjaga dan mengirim makanan bagi Bung Karno bersama Sanusi Harjadinata dan Supeni yang biasa disebut tiga serangkai, saat Bung Karno ditahan di Lapas Sukamiskin. Beliau pengagum Bung Karno dan menjadi pengikutnya di PNI," kata ustad Aus lagi.

## Biodata

### KH. Aus Hidayat Nur

Tempat Lahir / Tgl Lahir : Garut / 20 Juli 1961
Dapil : Kalimantan Timur

**Riwayat Pendidikan**
- SMAN 8 Jakarta, Tahun 1980
- D-3, LIPIA JAKARTA, Tahun 1983
- S1 Sastra Arab Universitas Indonesia

**Riwayat Pekerjaan**
Guru SMP Islam Bahagia, Jakarta, (1986 – 1990)
Guru SMA Islam At Taqwa, Jakarta, (1990 – 1992)
Dosen STAI Al Qudwah, Depok, (1995 – 2000)
Anggota DPR RI Dapil Kaltim, (2009 – 2014)
Badan Legislasi (2011 – 2014)
Guru SMP Terbuka NF, Depok (2016 – 2018)
Anggota DPR RI Dapil Kaltim (2018 – 2019), (2019 – 2024).
Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI (2018 – 2019)

**Riwayat Organisasi**
HMI cabang Jakarta (1980 – 1985)
Pendiri Partai Keadilan (1998)
Ketua DPP PKS Wilda Banjabar dan Kalimantan (2002 – 2005)
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (2005 – 2010)
Ketua DPP PKS Badan Penegak Disiplin Organisasi -BPDO- (2010 – 2012)
Anggota MPP PKS (2013 – 2016)
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS (2016 – 2018)
Ketua DPP Wilda Sulawesi (2018 – 2020).

Karena itu, perjalanan politik Aus juga banyak diwarnai pemikiran dan pengalaman ayahnya sebagai anggota PNI. Termasuk semangat dan militansi dalam berpolitik. Hanya saja, perjalanan waktu menentukan lain, Aus memantapkan pilihannya bergabung dengan PKS dibanding partai-partai nasionalis yang ada di Indonesia, tidak seperti dulu yang dilakukan ayahnya. .

## Jenderal Soedirman

Kepiawaian KH. Aus Hidayat Nur menarik simpati masyarakat untuk mendukung dan menjatuhkan pilihan politik kepadanya tak lepas dari perjalanan panjang yang ditempuh selama ini. Sejak kecil Aus sudah terbiasa berpindah tempat. Ketika hendak masuk Sekolah Dasar, Aus kecil ikut dengan kakaknya pindah dari Garut ke Makassar. Di kota yang dulunya bernama Ujung Pandang itu Aus tinggal hingga lulus SLTP, lalu berpindah ke Jakarta.

Selama di Makasar, Aus melewati masa kecilnya yang sangat menyenangkan. Ia banyak belajar dan berhubungan dengan masyarakat Ujung Pandang yang sangat tegas dan terbuka. Di Makassar jugalah, tepatnya di Masjid Jendral Soedirman Aus belajar mengaji dan ilmu agama.

"Nama masjidnya saja mengingatkan kita pada pahlawan Jenderal Soedirman, sehingga menginspirasi untuk menjadi tempat berjuang. Setelah Nabi SAW, sosok yang saya kagumi adalah Pak Dirman. Bahkan saat itu saya pernah juara lomba cipta puisi pada hari pahlawan dengan dengan judul Jenderal Soedirman. Saya juga kagum terhadap pasukan Jenderal Soedirman yang dikenal dengan nama Hizbullah," kata Aus menambahkan.

Setelah tamat SLTP, Aus melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Di ibukota Jakarta ia menamatkan pendidikan SLTA, lalu kuliah bekerja dan juga menikah. Di Jakarta Aus juga mendapatkan tempat untuk menyalurkan kecintaannya terhadap seni baca pusi. Pada saat yang sama Ia juga berkenalan dengan politik, dan membawanya terjun pada dunia politik praktis bersama PKS. ❑

**MBO**

# Al-Mawardi dan Roh Islam dalam NKRI

SEKITAR 4-5 abad sebelum teori politik dan kenegaraan dirumuskan secara sistematis di Barat. Al-Mawardi telah menulis sebuah risalah tentang konsep dan teori politik dan administrasi negara secara terperinci. Warisan pemikir politik Islam abad ke-11 yang tertuang dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* itu masih terasa hingga kini, karena kerap dikutip dalam diskusi-diskusi mengenai negara dan Islam.

Al-Mawardi, lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashr, lahir di Basrah pada 975 M. Mula-mula Ia dikenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih mazhab Syafi'i. Ia menjadi qadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang ketika itu pamor-kekuasaannya mulai turun. Kariernya meningkat setelah menjadi hakim agung (*qadi al-qudat*), penasihat raja di bidang agama dan pemerintahan.

Selain Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, ia antara lain menulis *Qanun al-Wazarah* (kanun tentang kementerian), dan *Nasihat al-Mulk* (nasihat untuk para penguasa). Kitab-kitab klasik tersebut mengupas tentang fungsi dan tugas pemimpin (khalifah/sultan), perdana menteri, menteri-menteri, hubungan antara berbagai elemen publik dengan pemerintah, serta langkah-langkah untuk menguatkan pemerintahan dan memastikan kemenangan dalam peperangan. Ada pula ulasan yang terkait dengan batas-batas negara, reklamasi tanah, suplai air, pajak, serta hal mengenai tugas dan hubungan negara dengan rakyatnya.

Dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah negara mesti memiliki enam pilar: [1] menjadikan agama sebagai pedoman, [2] memiliki pemimpin yang bijak dan otoritas yang valid, [3] menerapkan keadilan yang merata yang dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, [4] memberikan keamanan yang menyeluruh, [5] memiliki dan menjaga kesuburan tanah dan air; serta [6] menjaga pertahanan dan harapan untuk mengembangkan kehidupan.

Menurut Al-Mawardi, kepala negara merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Orang-orang yang dapat dicalonkan sebagai pemimpin harus memiliki sejumlah syarat. Di antaranya adil, berilmu (guna melakukan ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah hukum, sehat pendengaran, mata dan lisan, supaya bisa langsung berurusan dengan tanggung jawabnya, berbadan sehat, supaya sigap dan tak terhalang dalam beraktivitas, cakap dalam mengatur urusan rakyat dan segala kemaslahatan umum, tegas dan berani membela rakyat , serta siap dalam menghadapi musuh.

Bagi Al-Mawardi, agama memiliki posisi sentral dan seharusnya dijadikan sumber legitimasi atas realitas politik. Namun hal itu bukan berarti semacam pencarian pembenaran, tetapi berusaha mempertemukan yang ideal (ketentuan agama) dengan realitas politik. Sebuah sistem politik dan/atau pemerintahan menjadi layak dan pantas ketika ia terkonfirmasi dalam agama. Karena itu, ia melihat pengelolaan negara melalui upaya memfungsikan lembaga-lembaga dalam struktur negara sesuai dengan [aturan] syariat. Al-Mawardi memang berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama.

Tanpa hendak memaksakan, sepintas kilas saya melihat, cara pengompromian antara yang ideal (syariat) dan realitas politik seperti dilakukan Al-Mawardi itu tampak di-*copy* oleh sebagian pendiri NKRI dari kalangan muslim ketika "menyiasati" bentuk republik negara kesatuan ini. Negara Indonesia yang meski bukan negara agama (Islam) ini tidak bisa serta merta disebut negara sekuler, karena ditetapkannya keberadaan lembaga atau kementerian agama dalam

Oleh:
**Arsul Sani, SH., M.Si., Pr.M**
Wakil Ketua MPR RI

struktur pemerintahan yang mengurus beberapa hal yang urusannya terkait langsung dengan aturan syariat Islam, seperti haji, wakaf, perkawinan dan yang lain.

Lalu apa tujuan bernegara menurut Al-Mawardi?

Al-Mawardi mendefinisikan negara sebagai sebuah institusi yang diciptakan sebagai alat atau sarana untuk melayani kepentingan-kepentingan umum atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu keberadaan negara menurut dia merupakan sebuah keharusan, baik atas dasar pertimbangan akal maupun syariat. Pertimbangan akal yang dia maksudkan dalam hal ini adalah karena manusia selalu menginginkan kehidupan yang teratur dan aman. Dan, untuk itu pula diperlukan sebuah institusi yang mesti ditaati oleh para anggotanya. Sedangkan pertimbangan kedua untuk memastikan bahwa segala usaha untuk peniadaan ketidakadilan harus tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan Tuhan.

Selanjutnya, dalam sebuah pemerintahan (negara) Al-Mawardi tampak memberatkan timbangan pada bahasan posisi pemimpin. Kata dia, pemimpin negara mempunyai tugas untuk mencegah permusuhan di antara manusia, dan mendorong mereka untuk saling membantu dalam mewujudkan kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa fungsi seorang pemimpin di dalam negara adalah sebagai penjaga agar tidak terjadi ketidakadilan di negara yang dipimpinnya.

Sebuah negara memperoleh kemaslahatan, menurut Al-Mawardi, apabila ia telah mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosialnya. Dan, kunci utama dari kesejahteraan dan keadilan itu ialah pemimpinnya.

Apabila tujuan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dengan bersandar pada tegaknya hukum atau syariat Islam demi kemaslahatan dalam suatu negara yang diidealkan oleh Al-Mawardi itu kita rinci, akan ditemukan lima hal pokok dari pelaksanaan hukum atau syariah (*maqashid al-syari'ah*) itu, sebagai bagian dari tujuan kita bernegara. Yakni [1]*hifdzu an-nafs,* terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, hak atas perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan; [2] *Hifdzu ad-din,* terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan dalam beragama); [3] *Hifdzu al-'aql*, terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat; [4] *Hifdzu an-nasl*, terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus; dan [5] *Hifdzu al-maal,* terpeliharanya harta benda.

Sementara kita, bangsa Indonesia, membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan landasan dan tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tafsiran saya, fondasi bernegara kita ialah Berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan spirit (jiwa) atau dorongan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas-merdeka. Dan, tujuan bernegaranya ialah [1] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; [2] memajukan kesejahteraan umum; [3] mencerdaskan kehidupan bangsa; dan [4] ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan menggunakan simpulan Al-Mawardi, dan merenungkan dua asas (landasan dan tujuan) NKRI, saya tak ragu pada dua hal. Pertama, berterima-kasih pada para pendiri bangsa yang telah merumuskannya dalam Konstitusi NKRI. Kedua, sebagai muslim, menyatakan bahwa sebenarnyalah negara kita ini memiliki roh Islami. ❑

# Agar Etika Pancasila Hidup di Tengah Masyarakat

Seorang Guru Besar Filsafat UGM membuat buku yang membahas etika Pancasila. Pembudayaan, aktualisasi, dan realisasi etika menurutnya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya kelompok elit.

SALING mem-buli, gontok-gontokan, dan upaya menjatuhkan dalam dunia politik di tanah air tidak akan terjadi bila semua membaca buku berjudul: *Etika Kehidupan Berbangsa, Prinsip-Prinsip Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila.* Buku yang ditulis oleh Guru Besar Filsafat UGM, Prof. Dr. H. Kaelan, MS., itu terbilang tebal. Terbagi dalam XII Bab yang jumlahnya halamannya mencapai xxviii + 472 halaman.

Sesuai judulnya, dalam buku itu dikupas dan dibahas bagaimana etika bisa masuk dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, dalam *Bab XII tentang Etika Lingkungan*.

Dalam bagian pengantar, Kaelan mengatakan, akhir-akhir ini nampak etika kehidupan berbangsa dan bernegara mendapat tantangan serta cobaan seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan politik negara. Pasca reformasi bangsa Indonesia menenggelamkan Pancasila sebagai dasar filosofinya sendiri dalam bernegara dengan mendasarkan sistem ketatanegaraan pada sistem liberalisme. Hal demikian, menurutnya, berkonsekuensi bahwa etika berbangsa semakin pudar sehingga berbagai dinamika kenegaraan bahkan kegaduhan dalam negara sering muncul ke permukaan yang mewarnai panggung politik Indonesia.

Agar tahu duduk perkaranya, penulis lebih dahulu dalam Bab I menjelaskan *Pengertian dan Lingkup Etika*. Di halaman 1 dijelaskan etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap pelbagai ajaran moral (Suseno, 1987).

Lalu dari mana bangsa ini mengambil sumber etika sebagai ajaran dan pandangan moral? Dalam Bab III dijelaskan dalam judulnya, *Pancasila Sebagai Sumber Etika Berbangsa*. Dalam halaman 55 dijelaskan, berbeda dengan ideologi besar dunia lainnya, filsafat Pancasila lahir bukanlah berdasarkan pada pemikiran seseorang atau beberapa orang, melainkan berdasar pada realitas sosial, budaya, adat istiadat, wilayah geografi serta realitas kehidupan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.

Lebih lanjut dalam buku yang bersampul merah putih itu dipaparkan, semangat kebersamaan itu muncul pada awalnya berdasarkan pada keinginan bersama di antara berbagai unsur bangsa untuk membentuk suatu bangsa yang kemudian kulminasinya pada tanggal 28 Oktober 1928.

Di halaman selanjutnya dijelaskan, dalam proses perumusan Pancasila terjadi suatu sintesis yang integratif antara politik dan agama yang direalisasikan dalam kehidupan kenegaraan. Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara sekuler, karena negara sekuler memisahkan antara eksistensi agama dengan negara. Meski demikian dalam buku itu diterangkan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah negara teokrasi.

Penulis menerangkan agar etika kehidupan berbangsa dan bernegara hidup di tengah masyarakat maka realisasi dan pembudayaan etika harus mampu menjangkau seluruh elemen bangsa Indonesia, baik kalangan elit negara maupun seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan penting untuk diletakkan fondasi etika mengingat sangat kompleksnya permasalahan saat ini. Hal demikian berdasarkan fakta bahwa komunikasi manusia dengan manusia dalam kehidupan, terutama dalam politik, sering menimbulkan berbagai kepentingan sehingga acap kali dapat melemahkan solidaritas kebangsaan Indonesia.

Fondasi etika harus diletakkan dalam kehidupan karena senantiasa disadari bahwa terbentuknya suatu bangsa dan negara pada hakikatnya didasarkan pada suatu komitmen etis antarwarga dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Untuk itu, perlu disadari keberlangsungan hidup sangat ditentukan oleh fundamen etika, yaitu relasi etis antarsegenap warga bangsa.

Dari sinilah, menurut buku itu, proses pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai etika menjadi sangat penting untuk direalisasikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ❑

**AWG**

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI